

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 22 - 24 Mei 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Efektif	: 31 Mei 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	: 5 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	: 6 - 8 Juni 2023	Pasar Tunai	: 9 Juni 2025
Tanggal Penjatahan	: 8 Juni 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 11 Desember 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Juni 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Juni 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 12 Juni 2023	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 10 Juni 2025
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 12 Juni 2023		

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN, KNP, DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Kantor Pusat & Fabrik 1:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Cahaya Raya Kav H5
Leuwintug, Citeureup.
Bogor, Jawa Barat 16180

Telpon: 021 8790 0305

Faksimili: 021 8790 4683

E-mail: corsec@maxisnacks.com

Website: www.maxisnacks.com

Lokasi Fabrik 2:

Kawasan Industri Sentul
Jl. Olympic Raya Kav B11Sentul, Babakan
Madang.
Bogor, Jawa Barat 16180

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan
- 2) Sebanyak-banyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), (selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "Saham Yang Ditawarkan") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh KNP dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Penjamin Emisi Efek

(Akan ditentukan kemudian)

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH KEAMANAN PANGAN, DIMANA PERSEROAN MENGHADAPI RISIKO BAWAAN TENTANG KEAMANAN PANGAN ATAS PRODUK JADI YANG DIHASILKAN, DIPASARKAN, DAN DIKONSUMSI OLEH PARA KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 080/KET-EKS/MAXI/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No.: S-03087/BEI.PP2/04-2023 tertanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	33
B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN	35
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	35
D. PERIZINAN	39
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	46
F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	49
G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	53
H. SUMBER DAYA MANUSIA	53
I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	54
J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	56
K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	58
L. ASURANSI	63
M. TANAH DAN BANGUNAN	64
N. KENDARAAN	58
O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	67
P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	79
IX. EKUITAS	84
X. PERPAJAKAN	85
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	87
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	88
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	89
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 91	97
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK	97
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	103
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	104
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	105

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPPSK**”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. suami atau istri;
 - ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. orang tua dan anak;
 - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Anggota Kliring : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- Anggota Bursa Efek : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Bank Kustodian : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- BAE : berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
- Bursa Efek : berarti PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Saham : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efek : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Efektif : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan

<i>Force Majeure</i>	:	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Hari Bursa	:	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	:	berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	:	pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Masa Penawaran	:	berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	:	berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020, termasuk diantaranya

		PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-001/SHM/KSEI/0123 tanggal 1 Februari 2023.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 9 tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 28 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 10 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 10 tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 28 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi

Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 11 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 2 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7 tanggal 17 April 2023, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 5 tanggal 10 Mei 2023, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat.
- Pernyataan Efektif : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 28 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Maxindo Karya Anugerah Tbk.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- POJK No. 4/2022 : berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 8/2017 : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 16/2020 : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PP No. 5/2021	: berarti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham.

Saham Divestasi	: berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 8 Juni 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 4 Maret 2023.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Waran	: berarti berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

BMG	: PT Bintang Mulia Gemilang
KNP	: PT Karya Nusa Persada
AMI	: PT Akasia Mas Investama
EPI	: PT Esta Prima Investama
DCA	: PT Dalles Capital Asia

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 6 tertanggal 13 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tertanggal 21 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan No. AHU-0003068.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 Januari 2023, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0007830 tertanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 Januari 2023, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0020740 tertanggal 16 Januari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-009635.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Januari 2023 ("**Akta No. 6/2023**").

Perseroan adalah produsen makanan ringan yang berdomisili di Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia dan China. Produk Perseroan pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di Wilayah Bogor, Jawa Barat – Indonesia.

Bisnis Perseroan pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Dengan perkembangan teknologi yang inovatif didukung dengan permintaan pasar yang tinggi, Perseroan saat ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan Perseroan. Perseroan memproduksi makanan ringan dengan merek Maxi dan juga memproduksi merek-merek lain (private label/OEM) dari pelanggan-pelanggan Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi pengolahan snack, dimana keduanya berada di Kabupaten Bogor, dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas Pabrik Perseroan I:

Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5 Leuwikutug, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16180

Fasilitas Pabrik Perseroan II:

Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok setiap manusia di setiap negara, kebutuhan ini diperlukan dan dikonsumsi setiap hari. Makanan dan minuman dalam kemasan adalah salah satu produk yang hadir di pasar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dan juga di akselerasi dengan gaya hidup masyarakat dengan mobilitas yang makin tinggi. Meskipun semua industri terpuak berat pada saat pandemi covid-19 melanda dunia mulai dari awal 2020, namun data menunjukkan bahwa masih terdapat perkembangan positif pada industri makanan dan minuman, khususnya di Indonesia.

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan primer yang paling utama yaitu makanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dalam bisnis perdagangan makanan dan minuman. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur mampu menyediakan bahan baku sehingga dapat memicu peningkatan hasil produksi terhadap produk komoditi primer makanan dan minuman olahan. Ketika kebutuhan masyarakat dalam negeri telah terpenuhi maka kelebihan produksi makanan dan minuman dapat di ekspor ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Juliantari & Nyoman, 2015).

Indonesia tergabung pada *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bersama dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru yang menjadi kerjasama regional antara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Potensi dan peluang pasar RCEP diperhitungkan sangat besar dan mampu mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar RCEP kecuali pada negara Australia, Kamboja, Jepang, Korea dan Laos. Sedangkan posisi dinamika ekspor industri makanan dan minuman Indonesia berada pada posisi rising star pada sepuluh negara dan sisanya berada pada posisi falling star dan retreat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap industri ekspor makanan dan minuman dari Indonesia adalah jarak ekonomi, GDP riil perkapita negara tujuan, populasi negara tujuan, harga ekspor, keterbukaan perdagangan dan tarif (Wardani et al., 2018).

Selain itu, Perseroan saat ini merupakan bagian dari Rainforest Alliance, yaitu jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan

komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif. Perseroan meyakini bahwa dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga iklim.

Perkembangan kesadaran masyarakat bukan hanya di negara – negara mau tapi juga trend kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, mengandung banyak serat, vitamin, natural dan juga produk-produk dengan “clean label” semakin meningkat juga di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Perseroan memberikan solusi dengan menawarkan produk – produk makanan ringan yang diolah dari umbi – umbian langsung dari alam, natural, berserat tinggi dan memiliki kandungan vitamin.

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham biasa atas nama yang terdiri dari:
		1) Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“ Saham Baru ”); dan
		2) Sebanyak-banyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual (“ Saham Divestasi ”),
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah)
Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	1 : 1 (setiap pemegang 1 (satu) saham baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma)
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Waran Seri I
Nilai Emisi Saham Yang Ditawarkan	:	sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
		1) Sekurang-kurangnya sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp49.500.000.000 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta) dari Emisi Saham Baru; dan
		2) Sekurang-kurangnya sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.500.000.000 (enam puluh miliar lima ratus juta) dari Emisi Saham Divestasi,

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini terdiri dari Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan Saham Divestasi dari KNP. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

C. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN WARAN SERI I

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Berdasarkan Akta No. 6/2023, Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66

16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.937.000.000	29.370.000.000	30,56
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,0	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000		26.890.000.000	268.900.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
19. Masyarakat – Saham Divestasi				550.000.000	5.500.000.000	5,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000		26.890.000.000	268.900.000.000	

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

a. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Persada** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("**Akta Pendirian KNP**"). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("**Akta KNP No. 25/2022**").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Keterangan singkat mengenai KNP terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

b. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, KNP menawarkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 5,72% (lima koma tujuh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

c. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

KNP merupakan pemilik dari 2.937.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 32,06% (tiga puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Sebelum Penerbitan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Setelah Penerbitan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85	2.964.750.000	29.647.500.000	27,94
2. PT Karya Nusa Perdana	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84	2.387.000.000	23.870.000.000	22,50
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,37	900.000.000	9.000.000.000	8,48
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,27	698.250.000	6.982.500.000	6,58
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	2,87	275.520.000	2.755.200.000	2,60
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,60	250.000.000	2.500.000.000	2,36
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,00	192.000.000	1.920.000.000	1,81
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,55	148.960.000	1.489.600.000	1,40
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,55	148.747.000	1.487.470.000	1,40
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,43	137.600.000	1.376.000.000	1,30
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,36	130.880.000	1.308.800.000	1,23
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,24	119.093.000	1.190.930.000	1,12
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,86	82.560.000	825.600.000	0,78
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,69	66.267.000	662.670.000	0,62
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,62	60.000.000	600.000.000	0,57
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,31	29.760.000	297.600.000	0,28
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,19	18.613.000	186.130.000	0,18
18. Masyarakat – Saham Baru	450.000.000	4.500.000.000	4,68	450.000.000	4.500.000.000	4,24
19. Masyarakat – Saham Divestasi	550.000.000	5.500.000.000	5,72	550.000.000	5.500.000.000	5,18
20. Masyarakat – Waran Seri I				1.000.000.000	10.000.000.000	9,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00	10.610.000.000	106.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	26.890.000.000	268.900.000.000		25.890.000.000	258.900.000.000	

D. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama KNP dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022").

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Oktober	31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	38.828.639.177	48.629.345.941	39.905.437.265	39.416.531.947	39.516.502.084
Aset Tidak Lancar	115.940.648.045	114.058.731.442	109.881.838.629	109.692.216.632	110.643.980.397
Total Aset	154.769.287.222	162.688.077.383	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481
Liabilitas Jangka Pendek	11.613.684.256	15.020.996.061	11.715.959.044	17.946.440.153	57.911.947.996
Liabilitas Jangka Panjang	37.106.832.632	39.201.054.758	47.431.136.364	52.103.093.872	21.192.363.589
Total Liabilitas	48.720.516.888	54.222.050.819	59.147.095.408	70.049.534.025	79.104.311.585
Ekuitas	106.048.770.333	108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Oktober		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	19.098.065.425	27.575.664.669	91.623.399.769	129.111.490.531	149.345.740.363	115.591.435.877	124.464.667.356
Laba Kotor	5.083.068.271	6.395.247.802	21.815.227.179	36.138.686.561	40.022.910.740	37.723.566.489	37.251.555.294
Laba (Rugi) Usaha	(628.567.552)	7.998.174	2.623.053.911	16.598.324.332	16.733.982.340	17.221.020.320	20.626.676.744

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Oktober		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(1.920.310.583)	(671.068.963)	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(1.707.418.641)	(437.819.119)	1.225.846.078	11.691.335.252	11.580.965.932	8.003.043.658	12.493.961.545

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Oktober		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN (%)							
Penjualan	(30,7%)	(29,9%)	(29,0%)	34,0%	29,2%	(7,1%)	2,5%
Laba Kotor	(20,5%)	(47,5%)	(39,6%)	14,9%	6,1%	1,3%	10,2%
Laba (Rugi) Usaha	(7958,9%)	(99,9%)	(84,2%)	15,7%	(2,8%)	(16,5%)	13,1%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	186,2%	(112,8%)	(95,3%)	63,0%	32,5%	(33,6%)	11,6%
Aset	(0,5%)	2,2%	8,6%	(0,7%)	0,5%	(0,7%)	38,3%
Liabilitas	1,9%	3,2%	(8,3%)	(18,2%)	(15,6%)	(11,5%)	62,6%
Ekuitas	(1,6%)	1,5%	19,7%	14,8%	14,7%	11,3%	18,5%
PROFITABILITAS							
Laba Kotor/ Penjualan	26,6%	23,2%	23,8%	28,0%	26,8%	32,6%	29,9%
Laba Usaha/ Penjualan	(3,29%)	0,0%	2,9%	12,9%	11,2%	14,9%	16,6%
Laba Tahun Berjalan/ Penjualan	(10,1%)	(2,4%)	0,6%	8,5%	7,1%	7,0%	9,7%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan	(10,1%)	(2,4%)	1,3%	9,1%	7,8%	6,9%	10,0%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Aset	(0,4%)	(0,44%)	0,3%	7,3%	7,1%	5,4%	11,1%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Ekuitas	(0,4%)	(0,73%)	0,5%	12,0%	13,5%	10,2%	20,2%
RASIO KEUANGAN (x)							
Liabilitas/Ekuitas	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1
Liabilitas/Aset	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	3,3	3,3	3,2	5,7	3,4	2,2	0,7
Interest Coverage Ratio (ICR)	0,1	1,8	2,3	6,6	5,9	3,6	7,0
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	(0,1)	(0,0)	0,0	0,2	0,3	0,2	0,5

F. FAKTOR RISIKO

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Keamanan Pangan

Risiko Usaha Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kenaikan Harga Komoditas dan Bahan Baku
2. Risiko Terganggunya Proses Produksi dan Distribusi
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Pemasaran Produk
5. Risiko Pendanaan

Risiko Umum yang Berdampak Pada Perseroan

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global
2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan

1. Risiko Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Risiko Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
5. Risiko Pembagian Dividen

Rincian mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dari Prospektus ini.

G. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- 3) Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**"); dan
- 4) Sebanyak-banyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik KNP sebagai Pemegang Saham Penjual ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh KNP dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Kantor Pusat & Pabrik 1:
Kawasan Industri Sentul
Jl. Cahaya Raya Kav H5
Leuwikutug, Citeureup.
Bogor, Jawa Barat 16180

Telpon: 021 8790 0305
Faksimili: 021 8790 4683
E-mail: corsec@maxisnacks.com
Website: www.maxisnacks.com

Lokasi Pabrik 2:
Kawasan Industri Sentul
Jl. Olympic Raya Kav B11Sentul, Babakan
Madang.
Bogor, Jawa Barat 16180

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH KEAMANAN PANGAN, DIMANA PERSEROAN MENGHADAPI RISIKO BAWAAN TENTANG KEAMANAN PANGAN ATAS PRODUK JADI YANG DIHASILKAN, DIPASARKAN, DAN DIKONSUMSI OLEH PARA KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 6/2023 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham Baru

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.937.000.000	29.370.000.000	30,56
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,0	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000		26.890.000.000	268.900.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi

Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi		
	Nilai Nominal Rp10 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83	900.000.000	9.000.000.000	9,37
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62	698.250.000	6.982.500.000	7,27
5. Armada Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01	275.520.000	2.755.200.000	2,87
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73	250.000.000	2.500.000.000	2,60
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10	192.000.000	1.920.000.000	2,00
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63	148.960.000	1.489.600.000	1,55
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62	148.747.000	1.487.470.000	1,55
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50	137.600.000	1.376.000.000	1,43
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43	130.880.000	1.308.800.000	1,36
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30	119.093.000	1.190.930.000	1,24
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90	82.560.000	825.600.000	0,86
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72	66.267.000	662.670.000	0,69
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66	60.000.000	600.000.000	0,62
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32	29.760.000	297.600.000	0,31
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20	18.613.000	186.130.000	0,19
18. Masyarakat – Saham Baru				450.000.000	4.500.000.000	4,68
19. Masyarakat – Saham Divestasi				550.000.000	5.500.000.000	5,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000		26.890.000.000	268.900.000.000	

Informasi Terkait Pemegang Saham yang melakukan Divestasi

d. Keterangan Singkat, Alamat dan Hubungan dengan Perseroan

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Persada** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 ("**Akta Pendirian KNP**"). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541 tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("**Akta KNP No. 25/2022**").

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Keterangan singkat mengenai KNP terdapat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Prospek Usaha sub bab Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum.

e. Jenis, jumlah dan persentase Saham Divestasi

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, KNP menawarkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama miliknya dalam Perseroan atau mewakili sebanyak 5,72% (lima koma tujuh dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

f. Jumlah dan presentase saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

KNP merupakan pemilik dari 2.937.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 32,06% (tiga puluh dua koma nol enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Sebelum Penerbitan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Baru Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Divestasi Setelah Penerbitan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp10 per saham			Nilai Nominal Rp10 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000		36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:						
21. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	30,85	2.964.750.000	29.647.500.000	27,94
22. PT Karya Nusa Perdana	2.387.000.000	23.870.000.000	24,84	2.387.000.000	23.870.000.000	22,50
23. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,37	900.000.000	9.000.000.000	8,48
24. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,27	698.250.000	6.982.500.000	6,58
25. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	2,87	275.520.000	2.755.200.000	2,60
26. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,60	250.000.000	2.500.000.000	2,36
27. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,00	192.000.000	1.920.000.000	1,81
28. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,55	148.960.000	1.489.600.000	1,40
29. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,55	148.747.000	1.487.470.000	1,40
30. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,43	137.600.000	1.376.000.000	1,30
31. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,36	130.880.000	1.308.800.000	1,23
32. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,24	119.093.000	1.190.930.000	1,12
33. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,86	82.560.000	825.600.000	0,78
34. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,69	66.267.000	662.670.000	0,62
35. Bambang Hariyanto	60.000.000	600.000.000	0,62	60.000.000	600.000.000	0,57
36. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,31	29.760.000	297.600.000	0,28
37. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,19	18.613.000	186.130.000	0,18
38. Masyarakat – Saham Baru	450.000.000	4.500.000.000	4,68	450.000.000	4.500.000.000	4,24
39. Masyarakat – Saham Divestasi	550.000.000	5.500.000.000	5,72	550.000.000	5.500.000.000	5,18
40. Masyarakat – Waran Seri I				1.000.000.000	10.000.000.000	9,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.610.000.000	96.100.000.000	100,00	10.610.000.000	106.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	26.890.000.000	268.900.000.000		25.890.000.000	258.900.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan setelah Waran diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. ada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} + \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah Harga Pelaksanaan, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{C - D}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak- memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian tersebut berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantian tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
 Satrio Tower, 9th Floor A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
 Telp. +62 2598 4818
 Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan, pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 8.610.000.000 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta) saham atau sebesar 89,59% (delapan puluh Sembilan koma lima Sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 9.610.000.000 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No.: S-03087/BEI.PP2/04-2023 tertanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yang keduanya tertanggal 13 Januari 2023.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I yang akan digunakan untuk Modal Kerja, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama KNP dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang tidak termasuk dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar •% dari nilai Emisi yang meliputi:

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar •% yang terdiri dari:

- Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) •%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%;

Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar •%, yang terdiri dari biaya jasa:

- Konsultan Hukum sebesar •%;
- biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%; dan
- biaya jasa Notaris sebesar •%.

Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar •%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

Biaya lain-lain •%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham Penjual dan Perseroan masing-masing adalah sekitar 55,00%*) akan dibayar oleh KNP dan sekitar 45,00%*) akan dibayar oleh Perseroan.

*) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tertanggal 9 Mei 2023 yang menyatakan bahwa: "*segala biaya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang timbul akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi) dan jumlah Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Baru). Sehingga, KNP selaku Pemegang Saham Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya terkait Penawaran Umum atas Saham Divestasi.*"

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha - Pihak Ketiga	3.139.595.309
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	668.819.380
Beban Akrua	1.068.941.104
Utang Pajak	131.671.677
Uang Muka Pelanggan	27.387.500
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:	
Utang Bank	9.537.968.819
Liabilitas Sewa	391.814.104
Utang Pembiayaan Konsumen	54.798.168
Total Liabilitas Jangka Pendek	15.020.996.061
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:	
Utang Bank	33.408.470.694
Liabilitas Sewa	429.633.626
Utang Pembiayaan Konsumen	63.183.487
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	5.299.766.951
Total Liabilitas Jangka Panjang	39.201.054.758
Total Liabilitas	54.222.050.819

Rincian atas akun-akun liabilitas sebagai berikut:

1. Utang Usaha - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Asian Agro Agung Jaya	546.015.610
PT Polikemas Sanputra	536.353.999
PT Umas Jaya Agrotama	359.640.000
PT Mentari Prima Jayaabadi	178.710.000
PT Uniair Indotama	115.250.523
PT Kemasindo Cepat Nusantara	98.716.186
PT Interflex Sejahtera Perdana	6.493.500
Lainnya (Di bawah Rp 300 juta)	1.298.415.491
Total	3.139.595.309

2. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Oktober 2022, akun ini merupakan utang lain-lain atas operasional Perusahaan.

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 Ayat 2	23.358.300
Pasal 21	99.653.682
Pasal 23	8.659.696
Total	131.671.678

4. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh dari bank dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit No. 32/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/I/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas Kredit Lokal dijamin dengan aset seperti yang dijamin dalam fasilitas kredit pada utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Perseroan, telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh Hana .

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tanggal 27 Februari 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp13.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 14 November 2017 yang diaktakan oleh Lisa Karwati S.H, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00659 tanggal 13 Maret 2019, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00512 tanggal 26 Februari 2020, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00803 tanggal 22 Maret 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00542 tanggal 21 Februari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 103 luas 6.076m² a/n Perseroan, terletak di Jl. Olympic Raya Blok B-11, Bogor.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perseroan wajib melaksanakan hal-hal berikut:

- Memberitahu BCA secara tertulis apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direksi dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.

- Mempertahankan merek dagang Perseroan.
- Menjaga Debt-to-Equity Ratio maksimal sebesar 3x dan EBITDA/Installment minimal 1x.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari BCA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjamin harta kekayaan kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
- Mengubah status kelembagaan.
- Membagikan dividen lebih dari 30% laba bersih tahun berjalan.
- Apabila ada, utang pemegang saham tidak dapat dilunasi, kecuali dialihkan menjadi setoran modal.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari bank BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan No.00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang pada pokoknya menyampaikan hal persetujuan Perubahan Status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, dengan syarat:

- Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit.
- Menyerahkan kepada BCA berupa Prospectus dan Due dilligence Perusahaan sebelum dilakukan listing.
- Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA.
- Mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Persada. Selain itu, manajemen harus tetap berada dibawah kontrol Sarkoro Handajani.

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perusahaan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No.00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA.

Keterangan	Persyaratan	31 Oktober 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Debt-to-Equity ratio	Maksimal 3x	0,40x	0,52x	0,73x	0,53x
EBITDA/installment	Minimal 1x	3x	6x	1x	10x

Pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh BCA.

5. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini merupakan utang yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	Jumlah	
Total utang bank jangka panjang	42.946.439.513	
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang	9.537.968.819	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	33.408.470.694	

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberitahuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 29/153/C2/Kredit/17 tanggal 21 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Investment Loan 1 (IL 1) sebesar Rp23.000.000.000, dengan jangka waktu 8 tahun. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,25% fixed 2 tahun pertama dengan selanjutnya suku bunga floating dan provisi 0,5% untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 032/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 2 (IL 2) berjumlah USD1.350.000, yang bertujuan untuk alokasi plafond dari Fasilitas Kredit IL 1 dengan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan + 3% efektif mengambang (floating). IL 2 berjangka waktu enam tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, yang bertujuan untuk pembelian tanah kavling industri di kawasan Industri Kendal, Jl. Saptanegara, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, seluas 35.379 m2, dengan tingkat suku bunga 10% p.a. dan provisi 0,5%. IL 3 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk masa tenggang (Grace Period/GP) selama dua tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 4 (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, yang bertujuan untuk pembiayaan Pembangunan Konstruksi Pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal Kel. Brangsong, Kec. Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 4 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk GP selama dua tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, yang bertujuan untuk pembelian mesin-mesin baru yang akan ditempatkan di pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 5 ini berjangka waktu 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/I/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 4 (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP selama 2 tahun, menjadi 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama.
- Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) berjumlah Rp19.000.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan, menjadi 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.
- Fasilitas Kredit Investment Loan 5 (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perseroan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investment Loan 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 3 tahun sejak pencairan kredit pertama.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 216 luas 370m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 313 luas 3.134m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 314 luas 527m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 319 luas 521m2 a/n Perseroan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- Mesin-mesin atas nama Perseroan senilai Rp8.137.148.474.
- Tanah Kavling Industri PPJB No. 047/KAV/PPJB-KIK/2020 seluas 35.379 m2.
- Jaminan Perseroan atas nama PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.
- Letter Of Comfort dari Seluruh Pemegang Saham PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama dan PT Akasia Mas Investama.
- Mesin-mesin atas nama Perseroan senilai Rp31.985.316.760, yang akan dibeli dan ditempatkan di kawasan industri Kendal.

Selama jangka waktu pinjaman dengan HANA, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari HANA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.
- Wajib menjaga saldo rekening koran pada bank untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 bulan.
- Melakukan perubahan anggaran dasar.
- Melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang ditentukan oleh HANA.

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank KEB Hana Indonesia sehubungan dengan perubahan terakhir dalam perubahan kelima No. 004/PK/BGR/2023. Pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HANA sebelum membayar dividen dan melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari HANA berdasarkan surat pemberitahuan No.35/036/COM2/Kredit/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perusahaan dengan syarat bahwa Perusahaan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana dan PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari HANA minimal 30 hari sebelum perubahan pemegang saham.

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/N/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud.

6. Liabilitas Sewa

Perseroan memiliki kontrak sewa dengan Tuan Wansoen Widjaja, pihak ketiga, untuk sewa tanah dan bangunan yang digunakan dalam operasinya. Tanah dan bangunan memiliki jangka waktu sewa 3 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan yang mencakup opsi perpanjangan. Pada tanggal 31 Oktober 2022, nilai tercatat aset hak guna adalah sebesar Rp1.202.138.567.

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	
Penambahan	1.272.852.601
Penambahan bunga	16.095.129
Pembayaran	
Pokok	(451.404.871)
Bunga	(16.095.129)
Total	821.447.730
<hr/>	
Jangka pendek	391.814.104
Jangka panjang	429.633.626
Total	821.447.730

Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perseroan adalah 9,25%.

Jumlah total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek:	
Beban usaha	216.416.668
Beban penyusutan atas aset hak guna	70.714.033
Beban bunga atas liabilitas sewa	16.095.129
Total	303.225.830

Total arus kas keluar untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp683.916.668 yang termasuk biaya sewa yang tidak diakui dalam kewajiban sewa.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang pembiayaan konsumen	125.800.000
Dikurangi beban bunga di masa depan	(7.818.345)
Nilai tunai pembayaran utang pembiayaan konsumen	117.981.655
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(54.798.168)
Bagian jangka panjang	63.183.487

Utang pembiayaan konsumen ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% - 9,17% per tahun dengan menggunakan metode anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% - 4,50% per tahun dan akan dilunasi selama 2-3 tahun melalui angsuran bulanan.

Aset tetap - kendaraan yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Oktober 2022.

Pembayaran atas pokok utang pembiayaan konsumen tersebut sebesar Rp43.226.345 pada tanggal 31 Oktober 2022.

Beban bunga atas utang pembiayaan konsumen tersebut sebesar Rp7.093.655 untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.

8. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan dengan Peraturan Perseroan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perseroan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk

periode pelaporan berikutnya. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dalam laporannya tertanggal 22 Desember 2022 dan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Tingkat Diskonto per tahun	7,12% - 7,62%
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	8%
Usia pensiun normal	58
Tingkat mortalitas	100% TMI-2019

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Beban jasa kini	536.117.677
Beban bunga	317.563.536
Total	853.681.213

Rincian imbalan kerja karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pengukuran kembali	
Pengaruh penyesuaian pengalaman	(636.375.347)
Pengaruh perubahan asumsi keuangan	(273.419.275)
(Kerugian)	(909.794.622)

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 OKTOBER 2022, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XVIII Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari *Crowe Global*), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022")

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Oktober	31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
ASET					
Kas dan setara kas	2.782.398.917	6.026.605.530	4.676.042.551	1.367.710.829	1.367.597.777
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	16.278.076.036	23.550.289.953	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433
Piutang Lain-lain	326.138.696	494.793.201	365.946.168	76.717.503	110.001.499
Persediaan	7.951.745.615	8.172.898.635	7.561.293.636	11.087.561.212	10.615.689.553
Pajak Dibayar di muka	8.427.631.124	8.497.141.017	8.448.091.188	12.278.765.174	12.749.364.701
Beban Dibayar di muka	45.084.990	9.801.897	253.974.673	209.031.077	200.223.627
Uang Muka	2.467.563.798	1.327.815.708	1.489.414.695	3.315.392.942	3.655.854.494
Beban Ditangguhkan	550.000.000	550.000.000	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	38.828.639.177	48.629.345.941	39.905.437.265	39.416.531.947	39.516.502.084
Aset Tetap	114.703.868.709	111.173.315.233	108.703.544.950	108.104.778.077	109.231.104.510
Aset Pajak Tangguhan	1.236.779.336	1.240.482.821	1.178.293.679	1.587.438.555	1.412.875.887
Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan	-	1.644.933.388	-	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	115.940.648.045	114.058.731.442	109.881.838.629	109.692.216.632	110.643.980.397
TOTAL ASET	154.769.287.222	162.688.077.383	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Utang Bank Jangka Pendek	1.394.244.813	-	2.142.051.698	8.870.207.957	19.596.054.867
Utang Usaha - Pihak Ketiga	2.223.362.316	3.139.595.309	3.778.081.561	4.748.668.575	5.698.788.990
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	1.941.585.420	668.819.380	629.949.427	266.326.470	28.867.146.469
Beban Akrual	1.461.191.037	1.068.941.104	623.661.737	10.139.704	474.152.624
Utang Pajak	188.090.457	131.671.677	1.399.891.973	339.187.078	577.494.192
Uang Muka Pelanggan	28.800.000	27.387.500	13.239.501	13.087.334	11.971.689
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:					
Utang Bank	3.954.957.941	9.537.968.819	3.076.949.911	3.655.904.917	2.464.719.482
Liabilitas Sewa	391.814.104	391.814.104	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	29.638.168	54.798.168	52.133.236	42.918.118	221.619.683
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	11.613.684.256	15.020.996.061	11.715.959.044	17.946.440.153	57.911.947.996
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:					
Utang Bank	31.331.082.591	33.408.470.694	41.966.181.240	44.887.464.074	15.497.941.925
Liabilitas Sewa	429.633.626	429.633.626	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	63.183.487	63.183.487	109.074.764	-	42.918.118
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	5.282.932.928	5.299.766.951	5.355.880.360	7.215.629.798	5.651.503.546
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	37.106.832.632	39.201.054.758	47.431.136.364	52.103.093.872	21.192.363.589
TOTAL LIABILITAS	48.720.516.888	54.222.050.819	59.147.095.408	70.049.534.025	79.104.311.585
EKUITAS					
Modal Saham	91.600.000.000	91.600.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Tambahan Modal	88.513.500	88.513.500	88.513.500	88.513.500	88.513.500
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	5.360.256.833	7.777.513.064	45.551.666.986	33.970.701.054	25.967.657.396
TOTAL EKUITAS	106.048.770.333	108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	154.769.287.222	162.688.077.383	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Oktober		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	19.098.065.425	27.575.664.669	91.623.399.769	129.111.490.531	149.345.740.363	115.591.435.877	124.464.667.356
Beban Pokok Penjualan	14.014.997.154	21.180.416.867	69.808.172.590	92.972.803.970	109.322.829.623	77.867.869.388	87.213.112.062
Laba Kotor	5.083.068.271	6.395.247.802	21.815.227.179	36.138.686.561	40.022.910.740	37.723.566.489	37.251.555.294
Beban Usaha	5.711.635.823	6.387.249.628	19.192.173.268	19.540.362.229	23.288.928.400	20.502.546.169	16.624.878.550
Laba (Rugi) Usaha	(628.567.552)	7.998.174	2.623.053.911	16.598.324.332	16.733.982.340	17.221.020.320	20.626.676.744
Beban Lain-Lain	(155.001.392)	(157.977.801)	(1.926.537.737)	(2.591.572.143)	(3.089.146.659)	(6.813.531.736)	(4.475.096.597)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(1.976.653.543)	(733.306.339)	696.516.174	14.006.752.189	13.644.835.681	10.407.488.584	16.151.580.147
Beban Pajak Penghasilan	56.342.960	62.237.376	(180.309.901)	(3.092.916.418)	(2.996.869.126)	(2.373.240.016)	(4.053.371.139)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(1.920.310.583)	(671.068.963)	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain:							
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	272.938.387	299.038.362	909.794.622	996.794.206	1.196.153.047	(40.006.295)	527.670.050
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Terkait	(60.046.445)	(65.788.418)	(200.154.817)	(219.294.725)	(263.153.670)	8.801.385	(131.917.513)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	212.891.942	233.249.844	709.639.805	777.499.481	932.999.377	(31.204.910)	395.752.537
Total Laba Komprehensif	(1.707.418.641)	(437.819.119)	1.225.846.078	11.691.335.252	11.580.965.932	8.003.043.658	12.493.961.545

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Oktober		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN (%)							
Penjualan	(30,7%)	(29,9%)	(29,0%)	34,0%	29,2%	(7,1%)	2,5%
Laba Kotor	(20,5%)	(47,5%)	(39,6%)	14,9%	6,1%	1,3%	10,2%
Laba Usaha	(7958,9%)	(99,9%)	(84,2%)	15,7%	(2,8%)	(16,5%)	13,1%
Laba Bersih Tahun Berjalan	186,2%	(112,8%)	(95,3%)	63,0%	32,5%	(33,6%)	11,6%
Aset	(0,5%)	2,2%	8,6%	(0,7%)	0,5%	(0,7%)	38,3%
Liabilitas	1,9%	3,2%	(8,3%)	(18,2%)	(15,6%)	(11,5%)	62,6%
Ekuitas	(1,6%)	1,5%	19,7%	14,8%	14,7%	11,3%	18,5%
PROFITABILITAS							
Laba Kotor/Penjualan	26,6%	23,2%	23,8%	28,0%	26,8%	32,6%	29,9%
Laba Usaha/ Penjualan	(3,29%)	0,0%	2,9%	12,9%	11,2%	14,9%	16,6%
Laba Tahun Berjalan/ Penjualan	(10,1%)	(2,4%)	0,6%	8,5%	7,1%	7,0%	9,7%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ Penjualan	(10,1%)	(2,4%)	1,3%	9,1%	7,8%	6,9%	10,0%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Aset	(0,4%)	(0,44%)	0,3%	7,3%	7,1%	5,4%	11,1%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Ekuitas	(0,4%)	(0,73%)	0,5%	12,0%	13,5%	10,2%	20,2%
RASIO KEUANGAN (x)							
Liabilitas/Ekuitas	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1
Liabilitas/Aset	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	3,3	3,3	3,2	5,7	3,4	2,2	0,7
Interest Coverage Ratio (ICR)	0,1	1,8	2,3	6,6	5,9	3,6	7,0
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	(0,1)	(0,0)	0,0	0,2	0,3	0,2	0,5

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global), dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 6/2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri makanan lainnya. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002.

Perusahaan berdomisili di Bogor dengan alamat di Jl. Olympic Raya B-11, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa pos pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 Laporan Keuangan.

b) Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Penerapan dari interpretasi standar baru dan standar revisi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- o Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Biaya untuk memenuhi kontrak sendiri terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan

kontrak, yang lebih lanjut terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

o Penyesuaian Tahunan 2020

Penyesuaian ini terdiri dari:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.
- PSAK 73, "Sewa"
PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian biaya properti sewaan dari pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan terkait perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena bagaimana insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

C. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	91.623.399.769	129.111.490.531	149.345.740.363	115.591.435.877	124.464.667.356
Laba Kotor	21.815.227.179	36.138.686.561	40.022.910.740	37.723.566.489	37.251.555.294
Laba Usaha	2.623.053.911	16.598.324.332	16.733.982.340	17.221.020.320	20.626.676.744
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.225.846.078	11.691.335.252	11.580.965.932	8.003.043.658	12.493.961.545

a) Penjualan

Perbandingan Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp91.623.399.769 mengalami penurunan sebesar Rp37.488.090.762 atau sebesar (29,0%) dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp129.111.490.531. Hal ini terutama dikarenakan terganggunya sistem logistik global yang mengakibatkan sulitnya memperoleh *space* maupun kontainer, mengingat bahwa penjualan Perseroan seluruhnya merupakan penjualan ekspor. Menurunnya penjualan Perseroan untuk periode tersebut menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk periode berjalan.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.345.740.363 mengalami peningkatan sebesar Rp33.754.304.486 atau sebesar 29,2% dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp115.591.435.877. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor yang melakukan *lockdown* dari pandemi covid, sehingga warga negara di Negara bersangkutan tinggal dirumah yang mengakibatkan konsumsi makanan ringan meningkat. Meningkatnya penjualan Perseroan untuk tahun tersebut menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk periode berjalan.

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.591.435.877 mengalami penurunan sebesar Rp8.873.231.479 atau sebesar (7,1%) dari Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp124.464.667.356. Hal ini terutama dikarenakan efek ekonomi global akibat dimulainya pandemi covid. Menurunnya penjualan Perseroan untuk tahun tersebut menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan dan laba bersih Perseroan untuk tahun berjalan.

b) Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp2.623.053.911 mengalami penurunan sebesar Rp13.975.270.422 atau sebesar (84,2%) dari Laba Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp16.598.324.332. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik. Menurunnya laba usaha Perseroan untuk periode tersebut menyebabkan penurunan laba bersih Perseroan untuk tahun berjalan.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 16.733.982.340 mengalami penurunan sebesar Rp487.037.980 atau sebesar (2,8%) dari Labanya Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.221.020.320. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh bahan baku.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.221.020.320 mengalami penurunan sebesar Rp3.405.656.424 atau sebesar (16,5%) dari Labanya Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.626.676.744. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan beban usaha pada beban umum dan administrasi.

c) Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Labanya Bersih Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp516.206.273 mengalami penurunan sebesar Rp10.397.629.498 atau sebesar (95,3%) dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp10.913.835.771. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.647.966.555 mengalami peningkatan sebesar Rp2.613.717.987 atau sebesar 32,5% dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.034.248.568. Hal ini terutama dikarenakan penurunan beban keuangan dan dampak perubahan program manfaat karyawan.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.034.248.568 mengalami penurunan sebesar Rp4.063.960.440 atau sebesar (33,6%) dari Labanya Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.098.209.008. Hal ini terutama dikarenakan penurunan laba usaha dan meningkatnya beban keuangan.

d) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021

Labanya Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp1.225.846.078 mengalami penurunan sebesar Rp10.465.489.174 atau sebesar (89,5%) dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp11.691.335.252. Hal ini terutama dikarenakan penurunan penjualan akibat terganggunya sistem logistik.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.580.965.932 mengalami peningkatan sebesar Rp3.577.922.274 atau sebesar 44,7% dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.003.043.658. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan laba bersih tahun berjalan dan dampak dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Labanya Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.003.043.658 mengalami penurunan sebesar Rp4.490.917.887 atau sebesar (35,9%) dari Labanya Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.493.961.545. Hal ini terutama dikarenakan penurunan laba bersih tahun berjalan dan dampak dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

2. Laporan Posisi Keuangan

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	48.629.345.941	39.905.437.265	39.416.531.947	39.516.502.084
Aset Tidak Lancar	114.058.731.442	109.881.838.629	109.692.216.632	110.643.980.397

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset	162.688.077.383	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481
Liabilitas Jangka Pendek	15.020.996.061	11.715.959.044	17.946.440.153	57.911.947.996
Liabilitas Jangka Panjang	39.201.054.758	47.431.136.364	52.103.093.872	21.192.363.589
Total Liabilitas	54.222.050.819	59.147.095.408	70.049.534.025	79.104.311.585
Ekuitas	108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896

a) Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp48.629.345.941 mengalami kenaikan sebesar Rp8.723.908.676 atau sebesar 21,9% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.905.437.265. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.905.437.265 mengalami kenaikan sebesar Rp488.905.318 atau sebesar 1,2% dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 39.416.531.947. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Perbandingan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.416.531.947 mengalami penurunan sebesar Rp99.970.137 atau sebesar (0,3%) dari Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.516.502.084. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

b) Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp114.058.731.442 mengalami kenaikan sebesar Rp4.176.892.813 atau sebesar 3,8% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.881.838.629. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap dan diperkirakan akan melakukan restitusi pajak penghasilan tahun 2022.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.881.838.629 mengalami kenaikan sebesar Rp189.621.997 atau sebesar 0,2% dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp109.692.216.632. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan aset pajak tangguhan.

Perbandingan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp109.692.216.632 mengalami penurunan sebesar Rp951.763.765 atau sebesar (0,9%) dari Aset Tidak Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp110.643.980.397. Hal ini terutama dikarenakan penyusutan aset tetap.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp15.020.996.061 mengalami kenaikan sebesar Rp3.305.037.017 atau sebesar 28,2% dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.715.959.044. Hal ini terutama dikarenakan adanya pelunasan utang bank jangka pendek dari PT Bank BCA dan juga bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dari utang bank jangka panjang dari PT Bank Hana.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.715.959.044 mengalami penurunan sebesar Rp6.230.481.109 atau sebesar (34,7%) dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.946.440.153. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek. Penurunan liabilitas jangka pendek yang terutama disebabkan pembayaran sebagian utang bank jangka pendek berdampak pada turunnya beban keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2021.

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.946.440.153 mengalami penurunan sebesar Rp39.965.507.843 atau sebesar (69,0%) dari Liabilitas Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp57.911.947.996. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka pendek dan utang lain-lain pihak ketiga.

d) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp39.201.054.758 mengalami penurunan sebesar Rp8.230.081.606 atau sebesar (17,4%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.431.136.364. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan utang bank jangka panjang dari PT Bank Hana dan net-of dengan kenaikan liabilitas sewa

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.431.136.364 mengalami penurunan sebesar Rp4.671.957.508 atau sebesar (9,0%) dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52.103.093.872. Hal ini terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka panjang dan sebagai akibat penerapan PP 35 tahun 2021 dalam penghitungan imbalan kerja jangka panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.103.093.872 mengalami kenaikan sebesar Rp30.910.730.283 atau sebesar 145,9% dari Liabilitas Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.192.363.589. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan utang bank jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e) Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Total Liabilitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp54.222.050.819 mengalami penurunan sebesar Rp4.925.044.589 atau sebesar (8,3%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.147.095.408. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan kenaikan liabilitas jangka panjang.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.147.095.408 mengalami penurunan sebesar Rp10.902.438.617 atau sebesar (15,6%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.049.534.025. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.049.534.025 mengalami penurunan sebesar Rp9.054.777.560 atau sebesar (11,4%) dari Total Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp79.104.311.585. Hal ini terutama dikarenakan penurunan liabilitas jangka pendek dan kenaikan liabilitas jangka panjang.

f) Ekuitas

Perbandingan Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021

Ekuitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp108.466.026.564 mengalami kenaikan sebesar Rp17.825.846.078 atau sebesar 19,7% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp90.640.180.486. Hal ini terutama dikarenakan penambahan setoran modal saham dan laba komprehensif periode 2022.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.640.180.486 mengalami penurunan sebesar Rp11.580.965.932 atau sebesar 14,6% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp79.059.214.554. Hal ini terutama dikarenakan penambahan dari laba komprehensif tahun 2021.

Perbandingan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.059.214.554 mengalami kenaikan sebesar Rp8.003.043.658 atau sebesar 11,3% dari Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp71.056.170.896. Hal ini terutama dikarenakan penambahan dari laba komprehensif tahun 2020.

D. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	48.629.345.941	38.485.519.751	39.905.437.265	39.416.531.947	39.516.502.084
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.020.996.061	6.763.967.394	11.715.959.044	17.946.440.153	57.911.947.996
Rasio Lancar (x)	3,2	5,7	3,4	2,2	0,7

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,2x; 5,7x; 3,4x; 2,2x; dan 0,7x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,3	6,6	5,9	3,6	7,0
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,0	0,2	0,3	0,2	0,5

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,3x; 0,4x; 0,4x; 0,5x; dan 0,5x. Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,5x; 0,6x; 0,7x; 0,9x; dan 1,1x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba Bersih Tahun Berjalan	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008
Jumlah Aset	162.688.077.383	148.080.158.548	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	0,3%	7,3%	7,1%	5,4%	11,1%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,3%; 7,3%; 7,1%; 5,4%; dan 11,1%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba Bersih Tahun Berjalan	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008
Jumlah Ekuitas	108.466.026.564	90.750.549.803	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	0,5%	12,0%	13,5%	10,2%	20,2%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,5%; 12,0%; 13,5%; 10,2%; dan 20,2%.

E. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Uraian	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(5.484.276.393)	20.394.782.078	19.249.693.674	(16.326.951.750)	17.887.630.067
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(5.031.786.077)	(4.658.214.107)	(5.665.017.734)	(3.306.176.190)	(26.849.598.851)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	14.008.677.147	(2.592.925.239)	(3.548.187.959)	30.359.087.901	2.241.433.262
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	3.492.614.677	13.143.642.732	10.036.487.981	10.725.959.961	(6.720.535.522)
Kas dan Setara Kas Awal Periode / Tahun	2.533.990.853	(7.502.497.128)	(7.502.497.128)	(18.228.457.089)	(11.507.921.567)
Kas dan Setara Kas Akhir Periode / Tahun	6.026.605.530	5.641.145.604	2.533.990.853	(7.502.497.128)	(18.228.457.089)

(dalam Rupiah)

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp(5.484.276.393), dibandingkan dengan Rp20.394.782.078 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pelanggan.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp19.249.693.674, dibandingkan dengan Rp(16.326.951.750) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya penerimaan dari pelanggan dan berkurangnya pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp(16.326.951.750), dibandingkan dengan Rp17.887.630.067 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pelanggan dan bertambahnya pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya yang cukup signifikan.

Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp(5.031.786.077), dibandingkan dengan Rp(4.658.214.107) pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp(5.665.017.734), dibandingkan dengan Rp(3.306.176.190) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap dan penambahan uang muka atas pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp(3.306.176.190), dibandingkan dengan Rp(26.849.598.851) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan penggunaan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya perolehan aset tetap dan berkurangnya uang muka atas pembelian aset tetap.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari kegiatan pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah Rp14.008.677.147, dibandingkan dengan Rp(2.592.925.239) pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal sebesar Rp16.600.000.000.

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp(3.548.187.959), dibandingkan dengan Rp30.359.087.901 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran utang bank jangka panjang.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp30.359.087.901, dibandingkan dengan Rp2.241.433.262 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari utang bank jangka panjang.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kerjasama dengan pelanggan-pelanggan Perseroan yang telah berlangsung lama. Perseroan tidak memiliki pola arus kas tertentu dan tidak memiliki siklus tertentu dalam bisnis yang dijalankannya. Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan/penurunan likuiditas yang signifikan.

F. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pihak terkait dalam perjanjian untuk pembangunan pabrik di Kawasan Industri Kendal adalah KEB Hana Bank sebagai kreditor, sedangkan untuk kontraktor pembangunan pabrik dan pembelian mesin-mesin, Perseroan belum melakukan suatu perikatan. Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk pembangunan pabrik pellet di Kawasan Industri Kendal dengan luas tanah sebesar 3.5 ha.

Sumber dana yang akan digunakan diperoleh dari kredit investasi KEB Hana Bank:

- Investment Loan 4 - pembangunan pabrik Kendal = USD 4.1jt
- Investment Loan 5 - pembelian mesin Kendal = Rp 19 M
- selebihnya menggunakan modal Perseroan sendiri.

Perseroan mengharapkan setelah pembangunan pabrik, maka akan ada peningkatan kapasitas produksi seperti tabel dibawah ini:

	Sales Volume (ton)/ tahun	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sentul						
	Pellet	1.558	1.648				
	Chips	743	771	898	1.020	1.055	1.305
2	Kendal		Start to operate on q3				
	Pellet		550	2.302	2.616	3.156	3.347
	Extruder site		204	534	694	419	518
	Prawner site			534	1.041	837	1.036
	NEW category 2026 - site				347	1.256	1.036
	NEW category 2027 - site					391	967
	NEW category 2028 - site						131
	Total tonase			3.370	4.698	6.059	7.035
	naik x			2,04	2,85	3,68	4,27

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Jika kedepan arus kas operasi Perseroan tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, tidak ada kejadian material yang terjadi terkait dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi selama 3 tahun terakhir.

G. SEGMENT OPERASI

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan benua. Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen mengenai hasil operasi Perseroan sebagai berikut:

31 Oktober 2022

Keterangan	Amerika	Asia	Australia	Eropa	Total
Penjualan Bersih	25.857.617.897	1.791.553.137	32.637.836.981	31.336.391.754	91.623.399.769
Beban Pokok Penjualan	19.701.004.956	1.364.990.285	24.866.876.395	23.875.300.954	69.808.172.590
Laba Kotor	6.156.612.941	426.562.852	7.770.960.586	7.461.090.800	21.815.227.179
Beban Usaha	5.416.344.343	375.273.110	6.836.583.493	6.563.972.322	19.192.173.268
Laba Usaha	740.268.598	51.289.742	934.377.093	897.118.478	2.623.053.911
Beban Lain-lain - Bersih					(1.926.537.737)
Laba sebelum beban pajak penghasilan					696.516.174
Beban pajak penghasilan - Bersih					(180.309.901)
Laba Bersih Periode Berjalan					516.206.273
Total Penghasilan Komprehensif Lain					709.639.805
Total Laba Komprehensif					1.225.846.078
Aset tidak dapat dialokasi					162.688.077.383
Liabilitas tidak dapat dialokasi					54.222.050.819

H. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

I. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal 12 Mei 2023.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal-tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keamanan Pangan

Sebagai produsen produk pangan dalam kemasan yang melayani konsumen dari segala usia, Perseroan menghadapi risiko bawaan tentang keamanan pangan atas produk jadi yang dihasilkan, dipasarkan, dan dikonsumsi oleh para konsumen. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan proses pengolahan, dari penyediaan dan penanganan bahan baku hingga produksi, penyimpanan produk jadi, dan distribusi produk.

Standar prosedur operasional Perseroan juga telah mengadopsi prinsip-prinsip praktik pengolahan pangan yang baik (Good Manufacturing Practices) serta standar mutu dan keamanan pangan internasional, seperti ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000 dan Hazard Analysis & Critical Control Points ("HACCP"). Seluruh produk Perseroan yang diproduksi di Indonesia, telah memperoleh sertifikasi halal sesuai ketentuan Jaminan Produk Halal, dan berbagai sertifikasi lain, seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia dan Ijin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ("BPOM RI"). Selain itu, Perseroan juga mengadopsi Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Kesehatan COVID-19 yang diterbitkan oleh BPOM RI.

B. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Harga Komoditas dan Bahan Baku

Biaya produksi dan harga jual produk yang dihasilkan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga berbagai komoditas dan bahan baku. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga antara lain tingkat permintaan dan pasokan komoditas dan bahan baku, kondisi cuaca, tren konsumsi, regulasi dari pemerintah, kondisi perekonomian, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan peristiwa geopolitik. Kenaikan harga komoditas bahan baku serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus memperkuat rantai pasokan dengan menjalin kemitraan strategis dengan para petani dan pemasok dalam negeri, memperluas diversifikasi pemasok bahan baku, dan melakukan substitusi bahan baku berbiaya tinggi tanpa mengurangi kualitas dari produk akhir. Perseroan juga melakukan simulasi harga komoditas dan bahan baku untuk menelaah dampak pergerakan harga terhadap kinerja Perseroan.

2. Risiko Terganggunya Proses Produksi dan Distribusi

Salah satu hal yang harus selalu dipertahankan oleh Perseroan untuk bertahan dalam persaingan usaha adalah kemampuan menjaga konsistensi pasokan produknya ke pasar. Dalam hal terjadi gangguan pada proses produksi dan distribusi, seperti kerusakan mesin, atau putusnya jaringan distribusi sehingga konsumen tidak mendapatkan produk Perseroan, maka hal tersebut berpotensi menjadikan mereka beralih ke produk pesaing yang serupa. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja usaha dan keuangan Perseroan

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi pada industri *food and beverage* yang kompetitif, di mana perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri juga berupaya meraih pangsa pasar dan berbagai peluang. Tingkat persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan atau meningkatkan volume penjualannya yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara terus-menerus memantau kondisi pasar, melakukan riset pasar, melakukan inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

4. Risiko Pemasaran Produk

Keberhasilan penjualan dan pemasaran sangat penting bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi pasar produk-produk Perseroan yang ada saat ini dan mempromosikan produk-produk baru di masa mendatang. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan atau mempertahankan efektivitas dan efisiensi kegiatan penjualan dan pemasarannya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan dan prospek bisnis Perseroan.

5. Risiko Pendanaan

Perseroan mungkin tidak mampu untuk memperoleh pendanaan, tidak diperpanjang atau dapat diperpanjang namun memiliki pembatasan-pembatasan yang tidak menguntungkan Perseroan di masa mendatang baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk investasi baru, perkiraan belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Pendanaan yang diperoleh Perseroan dapat mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi operasional Perseroannya seperti: membatasi kemampuannya membayarkan dividen atau mewajibkannya untuk meminta persetujuan atas pembayaran dividen; meningkatkan kerentanannya terhadap kondisi ekonomi dan industri yang secara umum merugikan; membatasi kemampuannya menjalankan rencana pertumbuhannya; mewajibkannya untuk menyisihkan sebagian besar dari arus kasnya dari kegiatan operasional untuk pembayaran hutangnya, dan dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kasnya untuk mendanai belanja modal, kewajiban modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya; dan membatasi fleksibilitasnya dalam merencanakan, atau menanggapi terhadap, perubahan usaha dan industrinya. Apabila Perseroan tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perseroan maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, profitabilitas, hasil operasional dan kemampuannya untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

C. RISIKO UMUM YANG BERDAMPAK PADA PERSEROAN

1. Risiko Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada Negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruh karena Perseroan bekerjasama dengan prinsipal-prinsipal merek yang berasal dari luar negeri. Pengaruh perubahan kondisi perekonomian negara asal prinsipal merek akan mempengaruhi kinerjanya dan akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Melemahnya perekonomian global yang signifikan termasuk perekonomian Indonesia, akan mempengaruhi Perseroan dalam melakukan distribusi dan penjualan kepada konsumen. Tidak stabilnya perekonomian global akan mempengaruhi daya beli konsumen sehingga intensitas penjualan dan distribusi produk oleh Perseroan berubah. Daya beli konsumen yang menurun dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum baik kontrak, lisensi, sertifikasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk dan proses kegiatan usahanya. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas, dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya tuntutan atau gugatan hukum akan memberikan citra buruk terhadap Perseroan, serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan

4. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia, serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Perseroan harus memenuhi ataupun terdaftar baik pada ijin, sertifikasi, maupun lisensi dalam Proses pasokan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi produk barang konsumen yang menyangkut kualitas dan keamanan dan kesehatan makanan, kandungan bahan baku, pemasaran, serta aturan tertentu yang menyangkut distributor. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa lisensi atau izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan akan selamanya disetujui atau diperbaharui tepat pada waktunya, atau bahkan tidak dapat diperpanjang. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam mendapatkan, memperbaharui atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan lisensi, peraturan dan izin, baik yang telah ada, yang baru, ataupun yang direvisi penafsiran atau pelaksanaannya dapat menghambat operasional perseroan serta memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri makanan dan distribusinya telah dilakukan ke negara lain Perseroan telah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan mengabaikan atau lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut.

6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan saat ini memiliki transaksi dengan mata uang asing terutama yang berhubungan dengan penjualan produk Perseroan. Dalam hal penjualan (ekspor), fluktuasi kurs Rupiah akan mengakibatkan harga produk Perseroan tidak kompetitif dan akan berdampak negatif bagi usaha Perseroan.

Dalam hal Perseroan tidak mampu mengantisipasi fluktuasi dalam kurs valuta asing, hal tersebut dapat memberikan risiko kerugian kurs serta akan mempengaruhi kinerja usaha maupun keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang disusun oleh Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 12 Mei 2023 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, dan laporan Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022") serta mengacu pada Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas SEOJK No. 20 Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 kecuali telah diungkapkan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002.

Berikut susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	6.000	600.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Darmawan Hadikusuma	1.200	120.000.000	80,00
2. Grace Lestari Hadikusuma	300	30.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.500	450.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 6/2023, yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT MAXINDO KARYA ANUGERAH menjadi PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam Keputusan X dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui pengeluaran saham-saham baru dalam simpanan/portepel Perseroan sehubungan dengan dan untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:
 - Pengalihan Saham Divestasi;
 - Pengeluaran Saham Baru,yang mana Saham Divestasi dan Saham Baru tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan dari Saham Divestasi dan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Menyetujui untuk mencatatkan Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI- dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengangkatan Komisaris Independen baru, pengangkatan mana berlaku sejak tanggal 13-1-2023 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh tiga), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham

untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal 13-1-2023 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh tiga) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Dirketur Utama : Tuan Sarkoro Handajani
Direktur : Nyonya Carolina Renata Djaja
Direktur : Tuan Garrett Suryowijoyo Kartono

Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Insinyur Wong Budi Setiawan
Komisaris : Tuan Candra Gunawan
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Latip Wiyono

8. Menyetujui penetapan Nyonya Carolina Renata Djaja dan Nyonya Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pihak pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan sebagai pihak pemilik manfaat akhir Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
9. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan sebagai Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dan Saham Baru Perseroan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Selanjutnya, menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perseroan;
 - d. menetapkan rentang harga penawaran awal dan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
 - e. menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;
 - h. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - i. menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - j. mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - k. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - l. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - m. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - n. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam satu atau lebih akta Notaris dengan hak substitusi kepada pihak-pihak lain yang ditunjuknya;
 - o. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan akta dalam bentuk akta Notaris dan dalam bentuk lain yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
 - p. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau katakata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani aktaakta tersebut;
 - q. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap dan membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham; dan
 - r. memutuskan halhal dan tindakantindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk halhal lainnya yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan halhal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusankeputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk memberikan hak substitusi/delegasi

berdasarkan tindakantindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atauseluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

10. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan -Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta mencerminkan kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak-pihak berwenang, anggaran dasar mana sebagaimana dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:

- 1) Industri Pengolahan; dan
- 2) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan yang meliputi: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (10794) Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
- 2) Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, yang meliputi: Aktivitas Perusahaan Holding (64200) Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020 dan 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 34 tertanggal 29 November 2019, dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0371834 tertanggal 12 Desember 2019 susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	450.000	45.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	177.886	17.788.600.000	39,53
2. PT Karya Nusa Perdana	176.220	17.622.000.000	39,16
3. PT Akasia Mas Investama	54.000	5.400.000.000	12,00
4. PT Esta Prima Investama	41.894	4.189.400.000	9,31
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	450.000	45.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2022

Terdapat 4 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 masing-masing tertanggal (i) 31 Maret 2022, (ii) 9 Mei 2022, (iii) 13 Mei 2022 dan (iv) 24 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 57 tertanggal 31 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031457.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 28 April 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234440 tertanggal 28 April 2022, dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0086199.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 ("Akta No. 57/2022").

Berdasarkan Akta No. 57/2022, terdapat perubahan nilai nominal dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh rupiah) dan terdapat peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dengan kapitalisasi laba pada tahun buku 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. PT Bintang Mulia Gemilang sebesar Rp11.859.066.670,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah);
2. PT Karya Nusa Perdana sebesar Rp11.748.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
3. PT Akasia Mas Investama sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan
4. PT Esta Prima Investama sebesar Rp2.792.933.330,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 57/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	7.500.000.000	75.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.766.667	29.647.666.670	39,53
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	39,16
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	12,00
4. PT Esta Prima Investama	698.233.333	6.982.333.330	9,31
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 01 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Flora Elisabeth, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019696 tanggal 8 Juni 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106511.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("Akta No. 01/2022").

Berdasarkan Akta No. 01/2022, terdapat pengalihan saham milik PT Bintang Mulia Gemilang sebanyak 16.667 (enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham kepada PT Esta Prima Investama. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	7.500.000.000	75.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	39,53
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	39,16
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	12,00
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	9,31
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

- 3) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 09 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0248840 tanggal 13 Juni 2022, dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109266.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juni 2022 ("Akta No. 09/2022").

Berdasarkan Akta No. 09/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:

- (i) Peningkatan Modal Dasar dari semula Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp365.000.000.000 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah);
- (ii) Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp91.600.000.000 (sembilan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah); dan
- (iii) Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal--ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, para pemegang saham melepaskan hak istimewa (*pre-emptive rights*), sehingga seluruh saham baru yang akan dikeluarkan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham baru dibawah 5% (lima persen).

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut sebesar Rp.16.600.000.000, (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) atau sebanyak 1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta) saham tersebut akan diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham baru Perseroan dengan presentase kepemilikan masing-masing pemegang saham baru Perseroan dibawah 5% (lima persen) dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Armanda Indra Putra sebesar Rp2.755.200.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
2. PT Satu Nusa Investama Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
3. Freddy Soejandy sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta);
4. Meicy Thomas sebesar Rp1.489.600.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);
5. Harry Istianto sebesar Rp1.487.470.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
6. Henny Setiawan sebesar Rp1.376.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
7. Wewe Harjono sebesar Rp1.308.800.000,- (satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);
8. Suwandy sebesar Rp1.190.930.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
9. Yurry Kurniawan Liumenta sebesar Rp825.600.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
10. Edwin Andrianto sebesar Rp662.670.000,- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
11. Bambang Harliyanto sebesar Rp600.00.000,- (enam ratus juta Rupiah);
12. Tan Li Hock sebesar Rp297.600.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah); dan
13. Ir. Indahwati, S.E. sebesar Rp186.130.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 09/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000	
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Satu Nusa Investama	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000	

- 4) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 51 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0028557 tanggal 1 Juli 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125589.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022 (“Akta No. 51/2022”).

Berdasarkan Akta No. 51/2022, terdapat pengalihan saham milik PT Satu Nusa Investama sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal kepada PT Dalles Capital Asia. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000	

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tersebut adalah berdasarkan Akta No. 6/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	36.500.000.000	365.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	29.647.500.000	32,37
2. PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	29.370.000.000	32,06
3. PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9.000.000.000	9,83
4. PT Esta Prima Investama	698.250.000	6.982.500.000	7,62
5. Armanda Indra Putra	275.520.000	2.755.200.000	3,01
6. PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2.500.000.000	2,73
7. Freddy Soejandy	192.000.000	1.920.000.000	2,10
8. Meicy Thomas	148.960.000	1.489.600.000	1,63
9. Harry Istianto	148.747.000	1.487.470.000	1,62
10. Henny Setiawan	137.600.000	1.376.000.000	1,50
11. Wewe Harjono	130.880.000	1.308.800.000	1,43
12. Suwandy	119.093.000	1.190.930.000	1,30
13. Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	825.600.000	0,90
14. Edwin Andrianto	66.267.000	662.670.000	0,72
15. Bambang Harliyanto	60.000.000	600.000.000	0,66
16. Tan Li Hock	29.760.000	297.600.000	0,32
17. Ir. Indahwati, S.E.	18.613.000	186.130.000	0,20
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.160.000.000	91.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.340.000.000	273.400.000.000	

D. PERIZINAN

Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120106822132 tertanggal 20 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
Kode dan Nama KBLI yang memiliki Izin Usaha : 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
Status Penanaman Modal : PMDN

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha
1.	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Kawasan Industri Sentul, Jl. Cahaya Raya Blok H5, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: DEDIH PURWADI, A. PTNH, MH Nomor Izin: 313, 314, 216, 319, 499 Tanggal terbit: 15 Desember 2015
2.	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Kavling B11 Desa Sentul Kec. Babakan Madang-Kab. Bogor, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: DRS KHAI DIR YUSUF, MBA Nomor Izin: 216 Tanggal terbit: 11 Februari 2003

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Izin Usaha

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Perseroan telah mendapatkan Izin Usaha Industri (“IUI”) tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk lokasi usaha di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
NIB : 8120106822132
Alamat : Kawasan Industri Sentul Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode KBLI : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sentul Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Perseroan telah mendapatkan IUI tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk lokasi usaha di Jalan Olympic Raya Blok B-11, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
NIB : 8120106822132
Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810

Kode KBLI	:	10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
Lokasi Usaha	:	Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810

Sehubungan kedua IUI di atas yang diterbitkan sebelum rezim perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana diatur di dalam PP No. 5/2021, berdasarkan Pasal 562 huruf a PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP No. 5/2021 tidak harus memenuhi ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021. Sebagaimana dinyatakan di dokumen IUI Perseroan, IUI untuk kedua lokasi usaha Perseroan telah terbit dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP No. 5/2021. Sehingga, IUI untuk kedua lokasi usaha Perseroan tersebut tidak harus mengikuti dengan ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ada pada PP No. 5/2021 dan dinyatakan masih berlaku efektif.

3. Izin Lingkungan

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Maxindo Karya Anugerah
Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Luas Lahan	:	4552 m ²
Kode KBLI	:	10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

Sebagai dasar atas Izin Lingkungan tersebut, Perseroan telah memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") tertanggal 20 November 2015 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan surat nomor 660.1/3173/DAM-BLH perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Keripik Singkong oleh Perseroan.

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah memiliki UKL-UPL tertanggal 12 Juli 2010 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan surat nomor 660.1/1.483/DAM-BLH perihal Pengesahan Dokumen UKL-UPL dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Maxindo Karya Anugerah
Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
NIB	:	8120106822132
Lokasi Usaha	:	Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
Luas Lahan	:	6.076 m ²
Kapasitas Produksi Riil / Tahun	:	1.000 ton

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 4 November 2016 No. 660.1/2992/DAM-BLH, disampaikan bahwa Perseroan tidak perlu menerbitkan Izin Lingkungan atas lokasi usaha tersebut mengingat dokumen lingkungan yang dimiliki telah diterbitkan rekomendasinya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan tetap berlaku serta dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

4. Izin Komersial / Operasional – Izin Pembuangan Air Limbah

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya raya Kavling H-5, Perseroan telah memiliki Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi nomor 658.31/228/00079/DPMPSTP/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
 Alamat Kantor : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
 Jenis Usaha / Sifat Usaha : Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
 NPWP : 01.810.874.6-403.000
 Masa Berlaku : 22 Oktober 2020 s.d. 25 September 2025

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Untuk lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah menerima Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi nomor 658.31/228/00012/DPMPSTP/2020 tertanggal 17 Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
 Alamat Kantor : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16810
 Jenis Usaha / Sifat Usaha : Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
 NPWP : 01.810.874.6-403.000
 Masa Berlaku : 17 Februari 2020 s.d. 8 Januari 2025

5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB UMKU”)

a. Izin Edar

Atas seluruh produk yang masih diproduksi dan diedarkan oleh Perseroan di wilayah negara Republik Indonesia, Perseroan telah mendapatkan Izin Edar atas seluruh produk tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku	Nama Produk	Merek	Jenis Kemasan	Variasi
1	MD 272810001599	1 Februari 2026	Keripik Campuran Umbi Rasa Garam Laut (Tropical Roots Chips Sea Salt)	MAXI	Plastik (100 g)	Variasi Mayor Label
2	MD 272810003599	3 Februari 2026	Keripik Campuran Umbi Rasa Bawang dan Rosemari (Tropical Roots Chips Garlic & Rosemary)	MAXI	Plastik (100 g)	Variasi Mayor Label
3	MD 272810007051	21 Desember 2026	Keripik Umbi Campur Rasa Garam & Ketumbar (Mixed Roots Coriander Seasalt)	MAXI	Plastik (80 g)	Variasi Mayor ING dan Label
4	MD 273510006051	11 Juni 2025	Kerupuk Singkong Rasa Original (Cassava Crackers Original)	MAXI	Plastik (50 g, 113 g)	Variasi Mayor Label
5	MD 273510021051	24 Agustus 2025	Kerupuk Singkong Rasa Pedas (Cassava Crackers Hot & Spicy)	MAXI	Plastik (50 g)	Tidak ada Variasi
6	MD 672810005051	16 April 2025	Keripik Talas Rasa Jagung Bakar (Taro Chips Roasted Corn)	MAXI Talos	Aluminium Foil (50 g)	Variasi Mayor ING dan Label

No	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku	Nama Produk	Merek	Jenis Kemasan	Variasi
7	MD 672810009051	29 Desember 2025	Keripik Ubi Ungu Rasa Original (Purple Sweet Potato Chips Original)	MAXI	Aluminium Foil (50 g)	Variasi Mayor Label
8	MD 672810010051	29 Desember 2025	Keripik Ubi Kuning Rasa Original (Yellow Sweet Potato Chips Original)	MAXI	Aluminium Foil (50 g)	Variasi Mayor ING dan Label
9	MD 672810012051	7 Januari 2026	Keripik Talas Rasa Lada Hitam (Taro Chips Blackpepper)	Maxi Talos	Aluminium Foil (45 g & 100 g)	Variasi Mayor ING dan Label
10	MD 872810001051	2 Desember 2024	Keripik Singkong Rasa Balado (Cassava Chips)	MAXI	Plastik dalam karton (50 gram)	Variasi Mayor ING dan Label
11	MD 872810002051	12 Desember 2024	Keripik Umbi Campur Rasa Rosemary dan Bawang Putih (Mixed Roots Chips Rosemary & Garlic)	MAXI	Plastik dalam karton (80 gram)	Variasi Mayor ING dan Label
12	MD 872810003051	13 Desember 2024	Keripik Umbi Campur Rasa Balado (Mixed Roots Chips Sweetie Hot)	MAXI	Plastik dalam karton (40 gram)	Variasi Mayor ING dan Label

b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (“CPPOB”)

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Kami telah menerima Izin Penerapan CPPOB dengan nomor PW-S.04.09.1.53.53211.22-3187.P tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat Kantor : Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Jenis Pangan : Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang)

Masa Berlaku : 25 Oktober 2022 s.d. 25 Oktober 2027

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan nomor PW-S.04.09.1.53.53211.22-3186.P tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Jenis Pangan : Kerupuk Mentah

Masa Berlaku : 25 Oktober 2022 s.d. 25 Oktober 2027

c. Izin Pengusahaan Air Tanah (“IPAT”)

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 dengan nomor sumur SB-1, Perseroan telah memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor: 833/291252/DPMPSTP/2022 tertanggal 20 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
NIB : 8120106822132
Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia
KBLI : 10794
Lokasi Usaha : Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwintug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwintug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11 dengan nomor sumur SG-1, Perseroan telah memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 546.2/133/291020d/DPMPTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah tertanggal 24 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
NIB : 8120106822132
Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia
Bidang Usaha : Industri Kerupuk Keripik
Lokasi Usaha : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia
Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Lebih lanjut, Atas lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11 dengan nomor sumur SP-1, Perseroan memiliki IPAT sebagaimana dibuktikan melalui dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 546.2/134/291020d/DPMPTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah tertanggal 24 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah
NIB : 8120106822132
Alamat Kantor : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia
Bidang Usaha : Industri Kerupuk / Keripik
Lokasi Usaha : Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia
Masa Berlaku : 2 tahun sejak tanggal penerbitan

Perseroan telah melakukan pengurusan perpanjangan atas kedua IPAT tersebut melalui OSS dengan status terakhir masih menunggu verifikasi persyaratan sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar tertanggal 8 Mei 2023.

6. Sertifikasi

a. Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perseroan telah mendapatkan Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen K3 dengan no. reg SMK3.2022/MAL.SK.905 tertanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah

Alamat : Plant I: Jl. Olympic Raya Kav. B11 Kawasan Industri Sentul , Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16810, Indonesia

Plant II: Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya Raya Kavling H-5 Desa Leuwintug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor , Kel. Leuwintug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Sektor Industri : Industri Kerupuk dan Keripik

Hasil pencapaian : 85,93 % untuk kategori tingkat Awal (64 Kriteria)

Masa Berlaku : 3 tahun sejak dikeluarkan atau sampai dengan 13 Mei 2025

b. Surat Keterangan untuk Lift Barang, Alat Berat, dan Mesin

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Atas penggunaan lift barang, alat berat, dan mesin pada lokasi usaha Perseroan di Jalan Cahaya Raya Kavling H-5, Perseroan telah mendapatkan 11 (sebelas) surat keterangan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang didasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 dari PJK3 PT Mustika Arga Kencana dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Dokumen	Peralatan	No. Seri / Pembuat / Tipe	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo
1.	23653/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Lift Barang , Bahan Penunjang L1 2000 Kg	I7D9457003 / Hitachi Industrial Equipment System Co. Ltd.	17 November 2022	17 November 2023
2.	23654/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Lift Barang , Kardus L2 1000 Kg	FA-18171 / Elephant Chain Block Co., Ltd.	17 November 2022	17 November 2023
3.	23203/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	Instalasi Listrik 240 kva	-	17 November 2022	17 November 2023
4.	24673/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	Motor Diesel 303 KW	Cummins	17 November 2022	17 November 2023
5.	20371/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Fire Alarm	19KZ001 / Siemens / FC122-ZA	27 Agustus 2022	27 Agustus 2023
6.	3245/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Bejana Tekan (Air Receiver Tank)	035/DPT/IX/2018 / PT Daya Perkasa Teknik	13 Desember 2021	13 Desember 2023
7.	6656/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Bejana Tekan (Air Receiver Tank)	015/DPT/III/2018 / PT Daya Perkasa Teknik	5 Februari 2022	5 Februari 2024
8.	566.84.6938/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021	Air Receiver Compressor	08190270 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd.	13 Juni 2021	13 Juni 2023
9.	566.84.6939/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021	Air Receiver Compressor	17190053 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd.	13 Juni 2021	13 Juni 2023

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Atas penggunaan lift barang, alat berat, dan mesin pada lokasi usaha Perseroan di Jalan Olympic Raya Blok B-11, Perseroan telah mendapatkan 11 (sebelas) surat keterangan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang didasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja ("PJK3") PT Mustika Arga Kencana dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Dokumen	Peralatan	No. Seri / Pembuat / Tipe	Tanggal Terbit	Tanggal Jatuh Tempo
----	---------------	-----------	---------------------------	----------------	---------------------

1.	15665/TK-04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Lift Barang	BQ8643B08 / Meiden Host System Co., Ltd	12 Agustus 2022	12 Agustus 2023
2.	5347/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	Instalasi Penyalur Petir	-	24 Maret 2023	24 Maret 2025
3.	20927/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	Instalasi Listrik (Resertifikat)	-	26 Oktober 2022	26 Oktober 2023
4.	23611/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR	Ketel Uap 500 Kg	H 10-19 / PT Grand Kartech / Hoken Boiler	29 November 2022	29 November 2023
5.	23602/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR	Ketel Uap (Resertifikat)1000 Kg	WK 20-14 / PT Sanggar Teknik Prima Utama / Wins Ketel	28 November 2022	28 November 2023
6.	566.84.6257/PK-WIL.I.BGR/SKT/PU-K3/2021	Ketel Uap Miura 750 Kg	ID12100025 / PT Miura Indonesia	31 Mei 2021	31 Mei 2023
7.	24674/TK-04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Motor Diesel 100 Kva	U820582K / Perkins	17 November 2022	17 November 2023
8.	566.84.6936/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021	Air Receiver Compressor	A 122437 / Bison	13 Juni 2021	13 Juni 2023
9.	566.84.6937/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021	Air Receiver Compressor	14190714 / Tong Cheng Iron Works Co. Ltd.	13 Juni 2021	13 Juni 2023
10.	3180/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Monorail Crane 500kg	FA 03165 / Elephant Chain Block Co., Ltd.	6 Februari 2023	6 Februari 2024
11.	3163/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	Monorail Crane 500kg	FA 03110 / Elephant Chain Block Co., Ltd.	6 Februari 2023	6 Februari 2024

c. Surat Keterangan Sistem Proteksi Kebakaran

Lokasi Usaha Jalan Cahaya Raya Kavling H-5

Kami telah menerima Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 400.7.22.1/64/SKT/III/2023/DPK tertanggal 28 Maret 2023 yang didasarkan pada Pemeriksaan serta Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran terhadap Bangunan Kebakaran pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Kav H5

Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor

Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak penerbitan atau sampai dengan 28 Maret 2024

serta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	APAR Jenis Powder	2,5 Kg	24 Tabung
2.	APAR Jenis Powder	3,0 Kg	1 Tabung
3.	APAR Jenis Powder	6,0 Kg	8 Tabung
4.	APAR CO ²	4,6 Kg	1 Tabung
5.	APAR Jenis Foam	6,0 Kg	3 Tabung
6.	Smoke Detector	-	18 Titik
7.	Manual Call Point	-	8 Titik
Pada waktu dilakukan pengujian semua peralatan sistem proteksi berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan.			

Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11

Kami telah menerima Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 400.7.22.1/64.1/SKT/III/2023/DPK tertanggal 28 Maret 2023 yang didasarkan pada Pemeriksaan serta Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran terhadap Bangunan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maxindo Karya Anugerah Kav B11

Alamat : Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor

Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak penerbitan atau sampai dengan 28 Maret 2024

serta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Jenis	Ukuran	Jumlah
1.	APAR Jenis Powder	2,5 Kg	5 Tabung
2.	APAR Jenis Powder	3,0 Kg	1 Tabung
3.	APAR Jenis Powder	6,0 Kg	12 Tabung
4.	APAR Jenis Foam	6,0 Kg	2 Tabung
5.	Smoke Detector	-	14 Titik
6.	Manual Call Point	-	12 Titik
Pada waktu dilakukan pengujian semua peralatan sistem proteksi berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan.			

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Maxindo Karya Anugerah Tbk No. 6 tanggal 13 Januari 2023, dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Wong Budi Setiawan
 Komisaris : Candra Gunawan
 Komisaris Independen : Drs. Latip Wiyono Ak

Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris

- Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
- Memantau perkembangan kegiatan Perseroan;
- Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan dan mengawasipengimplementasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Direksi

Direktur Utama : Sarkoro Handajani
 Direktur : Carolina Renata Djaja
 Direktur : Garrett Suryowijoyo Kartono

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima. Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ir. Wong Budi Setiawan, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana *Civil Engineering Construction* di *Petra Christian University* Surabaya Tahun 1996 dan gelar *Magister of Fiancial Management* di *Indonesian University* Jakarta Tahun 2002

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai *President Director* di PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dari tahun 2004 sampai saat ini, *Commissioner & Controlling Shareholders* PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Akasia Mas dari tahun 2011 sampai saat ini dan sebagai *Direktur* di PT Akasiamas Investama dari tahun 2018 sampai saat ini.

Candra Gunawan, Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.



Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 1999 dan gelar *Magister Management Development Program* tahun 2008.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai *Senior Manager* di PT KPMG Handi Sudjendro Indonesia (1984 s.d 1990), *General Manager Underwriting* di PT Putra Saridaya Persada (1990 s.d 1991), *Direktur Utama* PT Putra Swareka Perdana (1992 s.d 1994), *Direktur Keuangan* PT Prima Swadana Perkasa Finance (1997 s.d 2004), *Direktur Keuangan* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2004 s.d 2005), *Direktur Marketing* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2006 s.d 2009), *Presiden Direktur* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2009 s.d 2011), *Komisaris* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2011 s.d 2012), *Presiden Direktur* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2012 s.d 2019), *Komisaris* PT Esta Dana Ventura (2019 s.d Mei 2022), *Advisor* PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2020 s.d 2021), *Advisor* PT Pan Pacific Insurance (2021 sd. Juni 2022) dan *Direktur Utama* PT Pan Pacific Insurance (Juli 2022 s.d Sekarang).

Drs. Latip Wiyono Ak, Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2023.



Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Gajah Mada Tahun 1987.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai *Direktur* PT Batavia Prosperindo Sekuritas (Maret 2017 s.d sekarang).

Direksi



Sarkoro Handajani, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Marketing di Universitas Trisakti Tahun 1995 dan gelar Magister Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung Tahun 1980.

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Komisaris Independen PT Kresna Reksa Finance (2016 s.d sekarang), Komisaris Independen PT Asuransi Bina Dharma Arta bk (2011 s.d 2014, Komisaris Independen PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (2009 s.d sekarang).



Carolina Renata Djaja, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Finance & Accounting di Curtin University Perth Western Australia Tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai direktur Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Assistant Manager PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (2000 s.d 2009).



Garrett Suryowijoyo Kartono, Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business in Marketing dan gelar Master of International business and trade di Holmes Institute Australia masing-masing tahun 2008 dan 2010.

Sebelum menjabat sebagai direktur Perseroan, jabatan lainnya diantaranya adalah sebagai Marketing Associate di DOB Sydney (2008 s.d sekarang).

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp2.365.000.000, Rp2.365.000.000, Rp3.225.000.000, Rp2.532.232.500 dan Rp2.255.000.000.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan remunerasi bagi Direksi ditetapkan dan ditelaah oleh Dewan Komisaris serta mengacu pada keputusan RUPS Perseroan. Secara umum prosedur penetapan remunerasi mengacu pada pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
- Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Ir. Wong Budi Setiawan	2	2	100%
Candra Gunawan	2	2	100%
Drs. Latip Wiyono Ak *	2	0	0%

*Komisaris Independen baru diangkat pada tanggal 13 Januari 2023

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Sarkoro Handajani	4	4	100%
Carolina Renata Djaja	4	4	100%
Garrett Suryowijoyo Kartono	4	4	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Keputusan 067/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Carolina Renata Djaja
Jabatan : *Corporate Secretary* / Sekretaris Perusahaan
Alamat : Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5, Desa Leuwinutug, Kec. Citeureup Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia
Telepon : +62 816953283
Email : carolina.djaja@gmail.com

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direksi.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Latip Wiyono Ak
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.
- Anggota : Andri Indradi
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1976. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2000. Saat ini menjabat juga sebagai Raw Material Manager di Perseroan sejak tahun 2018 hingga sekarang.
- Anggota : Stephanie Kuntara
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 jurusan Industrial Engineering di Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan gelar S2 Industrial Engineering Management di Universitas Pelita Harapan. Saat ini menjabat juga sebagai *Supply Chain Manager* di Perseroan sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Januari 2023. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan (i) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 065/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023; dan (ii) Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 064/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

- Ketua : Bun Toro
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1963. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 jurusan Akuntansi di STEI Indonesia Jakarta pada tahun 1989. Saat ini menjabat juga sebagai FA Manager di Perseroan sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Anggota : Shandy Artha
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1984. Meraih gelar S1 di Fakultas Komputer Akuntansi Universitas Bina Nusantara pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Accounting Manager di PT Maxindo Karya Anugerah sejak September 2012 hingga sekarang

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 062/SK-EKS/MAXI/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan memiliki Piagam

Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Latip Wiyono Ak
Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.
- Anggota : Anis Frestiani
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Mengambil subye Kesekretariatan di Institute of Indonesian professional development and education pada tahun 2005. Saat ini menjabat juga sebagai Supervisor Personer di Perseroan sejak tahun 2020 hingga sekarang.
- Anggota : Dixon D. Sinaga
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Januari 2023. Meraih gelar S1 jurusan Majemen Informasi di Universitas Gunadharma tahun 1995. Saat ini menjabat juga sebagai HR & GA Manager di Perseroan sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 13 Januari 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Sistem Pengendalian Internal

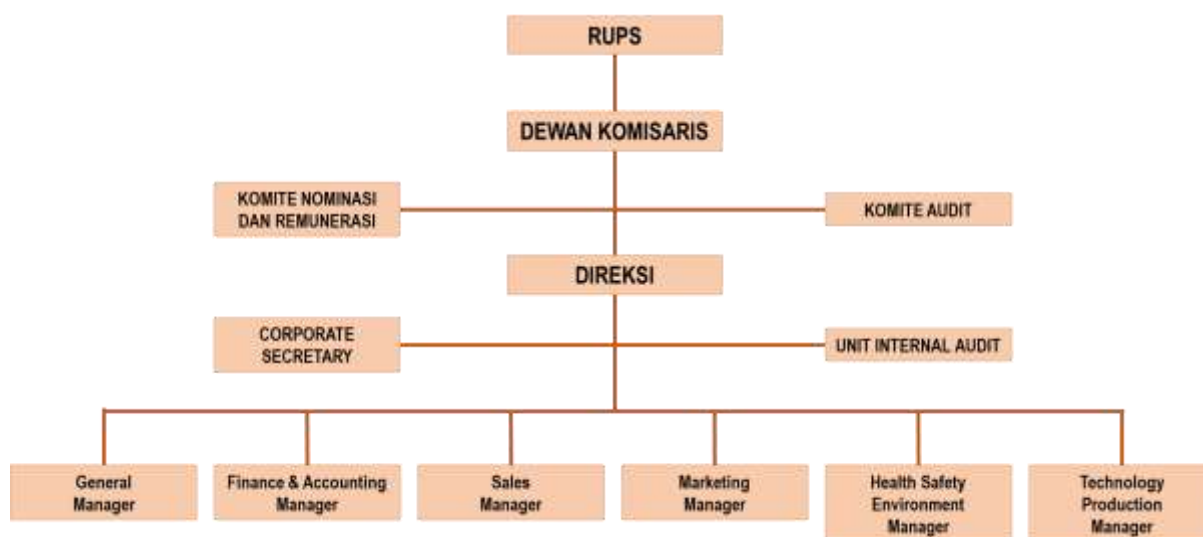
Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



H. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan memiliki 338 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	187	191	166	144
Karyawan Kontrak	151	153	202	211
Total	338	344	368	355

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
General Manager	1	1	1	1
Ast. Manager - Manager	17	15	14	14
Supervisor	15	17	14	11
Pelaksana/Rank n File	305	311	339	329
Total	338	344	368	355

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sarjana S3	0	0	0	0
Sarjana S2	6	4	3	2
Sarjana S1	31	28	33	28
Diploma	13	13	13	17
SMU dan ke bawah	290	299	319	338
Total	338	344	368	355

Menurut Usia

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<25 tahun	52	64	99	95
>25-30 tahun	107	87	99	105
>30-35 tahun	66	79	66	57
>35 tahun keatas	113	114	104	98
Total	338	344	368	355

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Kantor Pusat	338	344	368	355
Total	338	344	368	355

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Accounting	2	2	3	4
Finance	3	3	3	3
Sales	4	4	1	1
IT	2	2	1	1
HR & GA	46	48	42	46
Legal	1	1	1	1
HSE	11	11	0	0
Teknik	31	31	39	34
Produksi	175	178	212	233
RM	30	32	32	31
QA/QC	15	15	15	14
GM	1	1	1	1
R&D	2	3	4	5
Tech. Production	1	0	0	0
Supply Chain	13	13	11	34
Total	338	344	368	355

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan juga menyatakan bahwa Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum di Kabupaten Bogor sebesar Rp4.520.212,25 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan mengenai pemegang saham utama Perseroan:

PT Bintang Mulia Gemilang (“BMG”)

BMG didirikan dengan nama **PT Bintang Mulia Gemilang** sesuai dengan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13005.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020863.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 (“**Akta Pendirian BMG**”). Sejak pendirian, anggaran dasar BMG mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 10 tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059045.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 19 Agustus 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0280999 tertanggal 19 Agustus 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0162815.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“**Akta BMG No. 10/2022**”).

BMG berdomisili di Kota Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Ruko De Mansion, Jl. Jalur Alam Sutera Blok C-12 Kel Kunciran, Kec. Pinang, Kab. Kota Tangerang. BMG sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2020.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta BMG No. 10/2022, maksud dan tujuan BMG adalah untuk berusaha di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga meliputi Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491).
- b. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling, meliputi Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109).

Berdasarkan Akta BMG No. 10/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMG adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		2.964.750.000	29.647.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Carolina Renata Djaja	959.306.400	9.593.064.000	32,35
2.	Liknawaty Kuwikatmadja	697.313.700	6.973.137.000	23,52
3.	Hariati Tupang	558.151.000	5.581.510.000	18,84
4.	Stephen Surya Djaja	523.318.600	5.233.186.000	17,65
5.	Sukidjo Tupang	139.496.100	1.394.961.000	4,70
6.	Tinawati Susanto	87.164.200	871.642.000	2,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.964.750.000	29.647.500.000	100,00

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS No. 14 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0072833.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 20 September 2019, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan data perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0334908 tertanggal 20 September 2019 (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0175198.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 (“**Akta BMG No. 14/2019**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMG adalah sebagai berikut:

Dewan

Komisaris : Sukidjo Tupang

Direksi

Direktur Utama : Liknawaty Kuwikatmadja

Direktur : Stephen Surya Djaja

PT Karya Nusa Persada (“KNP”)

KNP didirikan dengan nama **PT Karya Nusa Persada** sesuai dengan Akta Pendirian No. 90 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 2 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, pengganti dari Hasubillah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 27 Januari 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007261.AH.01.09.Tahun 2011 (“**Akta Pendirian KNP**”). Sejak pendirian, anggaran dasar KNP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 25 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045400.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0259541

tanggal 1 Juli 2022, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125530.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 (“**Akta KNP No. 25/2022**”).

KNP berdomisili di Tangerang Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Malibu Blok D Nomor 4 Sektor VII BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. KNP sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2011.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta KNP No. 25/2022, maksud dan tujuan KNP adalah untuk berusaha di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KNP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga meliputi Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491).
- b. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling, meliputi Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109).

Berdasarkan Akta KNP No. 25/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KNP adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Modal dasar		2.937.000.000	29.370.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Murniaty Kartono	1.291.500.000	12.915.000.000	43,97
2.	Tjhin Leeris Harni	645.000.000	6.450.000.000	21,96
3.	Bong Jun Ngian	613.500.000	6.135.000.000	20,89
4.	Jenty	387.000.000	3.870.000.000	13,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.937.000.000	29.370.000.000	100,00

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KNP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS No. 23 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074659.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, (ii) mendapatkan penerimaan pemberitahuan data perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0336893 tanggal 25 September 2019, (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0178793.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 (“**Akta KNP No. 23/2019**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMG adalah sebagai berikut:

Dewan

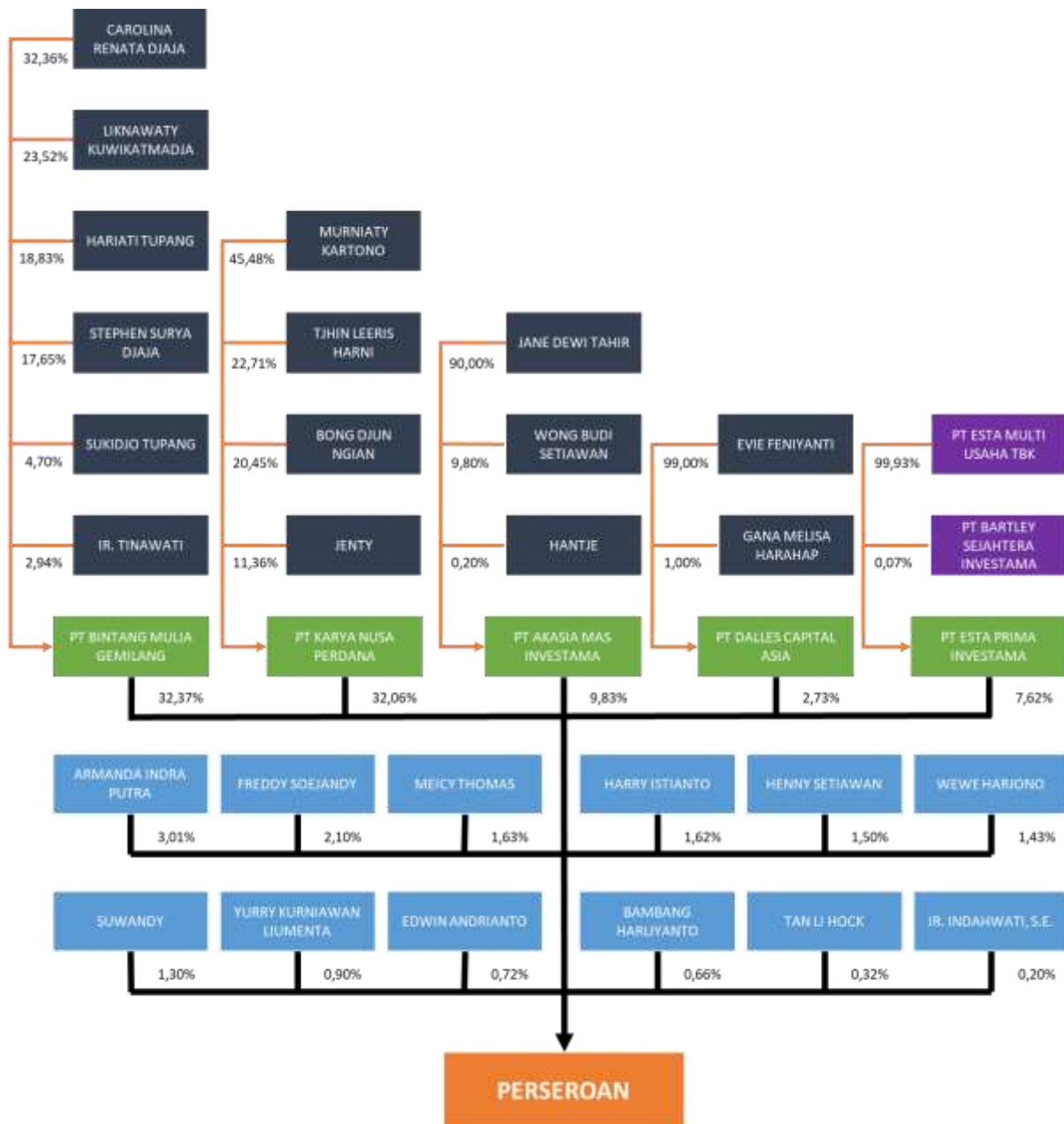
Komisaris : Michael Sudana Arifin

Direksi

Direktur : Feny Setiawan

J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK 3/2021**”), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 6/2023 telah menetapkan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”), Perseroan melalui Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor telah melaporkan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2023.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama Pengurus	Perseroan	BMG	KNP	AMI	EPI	DCA
Ir. Wong Budi Setiawan	KU	-	-	D	-	-
Candra Gunawan	K	-	-	-	-	-
Drs. Latip Wiyono Ak	KI	-	-	-	-	-
Sarkoro Handajani	DU	-	-	-	-	-
Carolina Renata Djaja	D	-	-	-	-	-
Garrett Suryowijoyo Kartono	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama **DU** : Direktur Utama
K : Komisaris **D** : Direktur
KI : Komisaris Independen

K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**Perjanjian Kerjasama**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku antara Perseroan dan Budiono tertanggal 12 Januari 2023	1. Perseroan; dan 2. Budiono.	Kerjasama penyediaan bahan baku ubi merah, ubi ungu dan talas Belitung.	13 Januari 2023 – 12 Januari 2024
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku antara Perseroan dan Triswanto tertanggal 10 Januari 2023	1. Perseroan; dan 2. Triswanto.	Kerjasama penyediaan bahan baku ubi merah dan ubi ungu.	11 Januari 2023 – 10 Januari 2024
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Supplier antara Perseroan dan Safei tertanggal 16 Februari 2022	1. Perseroan; dan 2. Safei.	Kerjasama penyediaan bahan baku singkong.	4 Februari 2023 – 3 Februari 2024.
4.	Perjanjian Jual Beli Gula Kristal Rafinasi No. 003/PERJ-SMP/SUJ-LGL/IV/2022 antara Perseroan dan PT Sentra Usahatama Jaya tertanggal 4 April 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Sentra Usahatama Jaya.	Jual beli Gula Krsital Refinasi	-
5.	Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama No. 030/PTRI/IS-62/CT/50042081 antara Perseroan dan PT Rentokil Indonesia tertanggal 1 September 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Rentokil Indonesia.	Layanan pengendalian hama	18 September 2021 – 17 September 2023
6.	Perjanjian Supply antara Wai Lana Production, LLC dan Perseroan tertanggal 7 Mei 2021	1. PT Maxindo Karya Anugerah; dan 2. Wai Lana Production, LLC.	Perseroan melakukan suplai/penjualan atas produk-produk keripik milik Perseroan kepada Wai Lana sebagai berikut: 1. Wai Lana Cassava Chips 6 Flavors; 2. Wai Lana Cassava Chips 5 Flavors; 3. Wai Lana Turmeric Cheese; 4. Wai Lana Purple Sweet Potato; 5. Wai Lana Yellow Sweet Potato; 6. Wai Lana Mixed Roots; 7. Wai Lana Cassava Chips;	Berlaku dari waktu ke waktu selama Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian berlaku secara efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian yaitu pada tanggal 7 Mei 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
			8. Wai Lana Cassava Pellet.	
7.	Perjanjian Supply antara The Vege Chips Company Pte. Ltd. tertanggal 3 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Perjanjian Addendum antara The Vege Chips Company Pty. Ltd. tertanggal 24 September 2021	1. PT Maxindo Karya Anugerah; dan 2. The Vege Chip Company Pty. Ltd.	Perseroan melakukan suplai/penjualan atas produk-produk milik Perseroan kepada Vege.	Berlaku dari waktu ke waktu selama Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian berlaku secara efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian yaitu pada tanggal 3 Maret 2018.

Perjanjian Kredit Perseroan

Berikut 2 (dua) perjanjian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai Penerima Kredit/peminjam. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian- perjanjian kredit tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Outstanding
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 38 tertanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Zuwanna Corna Gumanti S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Kelima No. 004/PK/BGR/2023 tertanggal 27 Januari 2023 ("Perjanjian Kredit KEB Hana")	Perseroan; dan 2. PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana").	<u>Fasilitas Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (PRK)</u> Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 2</u> US Dollar 1,350,000 (satu juta tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 3</u> Rp31.500.000.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus Rupiah) <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 4</u> US Dollar 4,100,000 (empat juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 5</u> Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah)	<u>Fasilitas Kredit Modal Kerja - Pinjaman Rekening Koran (PRK)</u> Diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 2</u> Diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2026. <u>Fasilitas Kredit Investasi - Installment 3</u> Diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2028 termasuk GP selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Januari 2023.	Rp55.500.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai Outstanding
				<u>Fasilitas Kredit</u> <u>Investasi</u> – <u>Installment 4</u> Diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk GP selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencairan kredit pertama (saat ini telah setting fasilitas/bleum cair) <u>Fasilitas Kredit</u> <u>Investasi</u> – <u>Installment 5</u> Diberikan untuk 5 (ima) tahun sejak pencairan kredit pertama, termasuk GP selama 18 (delapan belas) bulan sejak pencairan kredit pertama.	
3.	Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tertanggal 27 Februari 2015 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tertanggal 26 Januari 2023. (“Perjanjian Kredit BCA”)	Perseroan; dan PT Bank Central Asia Tbk.	<u>Fasilitas Kredit Lokal</u> Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)	Berakhir pada tanggal 26 Januari 2024	Rp35.000.000.000

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan:

- a. **Perjanjian Kredit KEB Hana**, pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KEB Hana sebelum membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank KEB Hana berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 35/036/COM2/Kredit/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank KEB Hana (**“Surat Waiver KEB Hana”**), yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana, PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perseroan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, sebelum melakukan perubahan pemegang saham, minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan pemegang saham.

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, tidak terdapat dan tidak diperlukan untuk dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertian di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud di atas.

- b. **Perjanjian Kredit BCA**, pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari BCA sebelum (i) mengubah status kelembagaan, dan (ii) membagikan dividen lebih dari 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah memenuhi kewajiban di BCA pada tahun berjalan. Sehubungan dengan

pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan No. 00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA (“**Surat Waiver BCA**”), yang pada pokoknya menyampaikan hal persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan syarat:

- (i) Menandatangani perubahan Perjanjian Kredit BCA;
- (ii) Menyerahkan prospeketus dan *due diligence* Perseroan ke BCA sebelum dilakukan listing;
- (iii) Menyerahkan Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA;
- (iv) Selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, debitur wajib mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Persada. Selain itu, manajemen harus tetap berada di bawah kontrol Bapak Sarkoro Handajani.

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perseroan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA.

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Perseroan memiliki 4 (empat) Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Perseroan, berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai																
1.	Surat Perjanjian No. 060/KET-EKS/MAXI/III/2019 antara Sarkoro Handajani dan Perseroan tertanggal 4 Februari 2019	1. Perseroan; dan 2. Sarkoro Handajani	Pemberian izin oleh Sarkoro Handajani kepada Perseroan untuk menggunakan merek-merek sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Merek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Maxi Mixed Roots</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Maxi Round Crackers</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Maxi Talos</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cassato Crackers</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Maxi Cassava Crackers</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Maxi Talos</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Maxi Cassavae Chips</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Merek	1.	Maxi Mixed Roots	2.	Maxi Round Crackers	3.	Maxi Talos	4.	Cassato Crackers	5.	Maxi Cassava Crackers	6.	Maxi Talos	7.	Maxi Cassavae Chips	Sarkoro Handajani merupakan Driektur Utama Perseroan.	Sampai batas masa berlaku dari masing-masing merek.	-
No.	Nama Merek																					
1.	Maxi Mixed Roots																					
2.	Maxi Round Crackers																					
3.	Maxi Talos																					
4.	Cassato Crackers																					
5.	Maxi Cassava Crackers																					
6.	Maxi Talos																					
7.	Maxi Cassavae Chips																					
2.	Surat Perjanjian No. 085/KET-EKS/MAXI/III/2019 antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan tertanggal 4 Februari 2019	1. Perseroan; dan 2. Garrett Suryowijoyo	Pemberian izin oleh Garrett Suryowijoyo kepada Perseroan untuk menggunakan merek sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Merek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>MAXI</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Merek	1.	MAXI	Garrett Suryowijoyo merupakan Driektur Perseroan.	Sampai batas masa berlaku dari masing-masing merek.	-												
No.	Nama Merek																					
1.	MAXI																					
3.	Perjanjian Pengalihan Merek antara Sarkoro Handajani dan Perseroan tertanggal 24 Februari 2023	1. Perseroan; dan 2. Sarkoro Handajani	Persetujuan Sarkoro Handajani untuk mengalihkan merek-merek (sebagaimana disebutkan dibawah) kepada Perseroan. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Merek</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	No.	Nama Merek	Sarkoro Handajani merupakan Driektur Utama Perseroan.	-	-														
No.	Nama Merek																					

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek		Hubungan Afiliasi		Jangka Waktu Perjanjian		Nilai			
	("Perjanjian Pengalihan Merek Bapak Sarkoro")		1.	Cassato Crackers	27 Mei 2015	IDM009	057607	27 Mei 2025				
			2.	Maxi Cassave Chips	27 Mei 2015	IDM007	057607	27 Mei 2025				
			3.	Maxi Cassava Crackers	27 Mei 2015	IDM008	057542	27 Mei 2025				
			4.	Maxi Mixed Roots	29 Mei 2015	IDM002	057275	29 Mei 2025				
			5.	Maxi Round Crackers	29 Mei 2015	IDM004	057275	29 Mei 2025				
			6.	Maxi Talos	29 Mei 2015	IDM001	057275	29 Mei 2025				
			7.	Maxi Talos	29 Mei 2015	IDM003	057275	29 Mei 2025				
4.	Perjanjian Pengalihan Merek antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan tertanggal 24 Februari 2023 ("Perjanjian Pengalihan Merek Bapak Garrett")	1. Perseroan; dan 2. Garrett Suryowijoyo	Persetujuan Garrett Suryowijoyo untuk mengalihkan merek-merek (sebagaimana disebutkan dibawah) kepada Perseroan.		Garrett Suryowijoyo merupakan Driektur Perseroan.		-	-				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Merek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>MAXI</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama Merek	1.	MAXI				
No.	Nama Merek											
1.	MAXI											

L. ASURANSI

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank/ Leasing Clause	Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Asuransi Mesin dan Bangunan								
1.	Polis Property All Risk dengan No. Polis 102010322 120000269	PT Asuransi Central Asia	PT Bank KEB Hana Indonesia Perseroan	23 November 2021 – 23 November 2023	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp40.592.097,84	Rp23.756.070.000	Mesin dan bangunan dengan risiko lokasi terletak di Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Blok H No. 5, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat (Hak Guna Bangunan No. 00313, 00314, 00216, 00319)
2.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis 012801372 300142	PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)	PT Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Bogor qq. Perseroan	27 Februari 2023 – 27 Februari 2024	PT Bank Central Asia, Tbk	Rp11.833.057,63	Rp10.328.500.000	Bangunan dengan risiko lokasi terletak di Jl. Olympic Raya Kav. B No. 11, RT/RW 000/000, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16863 (Hak Guna Bangunan No. 103/Sentul)
Asuransi Kendaraan								
1.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 008793	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	Perseroan	1 Agustus 2022 – 1 Agustus 2023	-	-	Rp250.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000	Toyota Kijang Innova 2.4 Innova G M/T Minibus tahun 2019 dengan plat nomor F 1418 JC
2.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 040990220 00007 - 005569	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Perseroan	2 Agustus 2022 – 2 Agustus 2023	-	Rp820.000	Rp50.000.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp10.000.000	Suzuki Carry PU 1.5 (ST 150) tahun 2012 dengan plat nomor F8587 GF

No	Nama Polis	Penanggung	Tertang	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank/ Leasing Clause	Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
3.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 023832	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	Perseroan	19 Januari 2023 – 19 Januari 2024	-	Rp3.053.000	Rp170.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000	Isuzu NKR 55 E2-1 LWB Truck tahun 2015 dengan plat nomor F 8701 GS
4.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010221220 008804	PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi	Perseroan	1 Agustus 2022 – 1 Agustus 2023	-	Rp70.000.000	Rp305.000.000 Jaminan Tambahan (Tanggung Jawab Pihak Ketiga): Rp10.000.000	Hino Truck WU342R-HKMTJD M/T Truck tahun 2021 dengan plat nomor F 8797 HN
5.	Sertifikat No. Reg 10-M-00118-000-12-2021	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT BCA Finance qq. BCA qq. Perseroan	24 Desember 2021 – 24 Desember 2024	BCA	-	Kerugian Fisik/Materi Rp207.800.000 Risiko Sendiri Rp300.000 Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp25.000.000	Toyota Avanza 1.3 E M.T Minibus tahun 2021

M. TANAH DAN BANGUNAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tanah dan bangunan dan atas seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor	Lokasi				Luas (m2)	Masa Berlaku	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa				
1.	Hak Guna Bangunan No. 216 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 14 September 2008 Surat Ukur No. 23/Leuwinutug/2008	Jawa Barat	Bogor	Citeureup	Leuwinutug	370	23 September 2038	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 5789/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana.</i>	Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman
2.	Hak Guna Bangunan No. 103 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 11 Februari 2003 Surat Ukur No. 9/Sentul/2003	Jawa Barat	Bogor	Babakan Madang	Sentul	6.076	21 Desember 2027	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 3715/16 dan APHT No. 113/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Yuris Zarde, S.H., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit BCA.</i>	Produksi raw pellet dan gudang
3.	Hak Guna Bangunan No. 313 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 Surat Ukur No. 118/Leuwinutug/2015	Jawa Barat	Bogor	Citeureup	Leuwinutug	3.134	21 Januari 2036	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana.</i>	Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman
4.	Hak Guna Bangunan No. 314 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 Surat Ukur No. 118/Leuwinutug/2015	Jawa Barat	Bogor	Citeureup	Leuwinutug	527	23 September 2038	Dijaminkan <u>Catatan:</u> <i>Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan</i>	Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman

No.	Nomor	Lokasi				Luas (m2)	Masa Berlaku	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa				
	ota Bogor tanggal 15 Desember 2015 Surat Ukur No. 119/Leuwintug/2015							APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana.	
5.	Hak Guna Bangunan No. 499 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 1 Agustus 2019 Surat Ukur No. 379/Leuwintug/2019	Jawa Barat	Bogor	Citeureup	Leuwintug	546	22 September 2049	Tidak Dijaminkan	Penyimpanan produk jadi atau finish good
6.	Hak Guna Bangunan No. 319 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 16 Maret 2016 Surat Ukur No. 126/Leuwintug/2016	Jawa Barat	Bogor	Citeureup	Leuwintug	521	18 Februari 2046	Dijaminkan Catatan: <i>Dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Perjanjian Kredit KEB Hana.</i>	Ruang kantor, bangunan pabrik, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman
7.	Hak Guna Bangunan No. 00288 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 23 Desember 2019 Surat Ukur No.	Jawa Tengah	Kendal	Kaliwungu	Wonorejo	35.379	22 Desember 2045	Tidak Dijaminkan	Ruang kantor, bangunan pabrik produksi, gudang, mushola, WWT, pos security, dan taman pada tahun 2023

No.	Nomor	Lokasi				Luas (m ²)	Masa Berlaku	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa				
	00944/Wonor ejo/2019								

N. KENDARAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	M-05814416	F 8939 GN	Toyota Dyna Long 3.700 BU343R-TKMQSD3	2004
2.	E-3424321	F 8823 FS	Mitsubishi FE 334	2006
3.	M-03388803	F 8567 GF	Suzuki ST150-PICK UP	2012
4.	K-02958551	F 1140 KI	Nissan Evalia 1.5 4X2 MT	2013
5.	L-12982424	F 8701 GS	Isuzu NHR 55 E2-1LWB	2015
6.	M-00437706	F 1621 LX	Nissan Evalia 1.5 4X2 MT	2015
7.	P-00813673	F 1418 JC	Toyota	2019
8.	S-03242076	F 1693 FAF	Toyota W100RE-LMDFJ 1.3 E M/T	2021
9.	Q-07127269	F 8797 HN	Hino WU342R-HKMTJD3M/T	2021

O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Lebih lanjut, Perseroan berhak menggunakan asset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek dan terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek "Maxi Cassava Chips"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Cassava Chips
Tanggal Penerimaan	:	29 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000572753
Tanggal Pengumuman	:	4 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	29 Mei 2015
Tanggal Kadaluaarsa	:	29 Mei 2025
Kelas	:	30

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037228 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Cassava Chips" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

2. Sertifikat Merek "Maxi Cassava Crackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Cassava Crackers
Tanggal Penerimaan	:	29 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000572754
Tanggal Pengumuman	:	4 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	29 Mei 2015
Tanggal Kadaluaarsa	:	29 Mei 2025
Kelas	:	29

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037167 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Cassava Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

3. Sertifikat Merek "Maxi Talos"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Talos
Tanggal Penerimaan	:	29 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000572751
Tanggal Pengumuman	:	4 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	29 Mei 2015
Tanggal Kadaluausa	:	29 Mei 2025
Kelas	:	30

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037297 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Talos" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

4. Sertifikat Merek "Maxi Mixed Roots"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Mixed Roots
Tanggal Penerimaan	:	27 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000576079
Tanggal Pengumuman	:	25 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	27 Mei 2015
Tanggal Kadaluausa	:	27 Mei 2025
Kelas	:	29

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037244 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Mixed Roots" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

5. Sertifikat Merek "Cassato Crackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Cassato Crackers
Tanggal Penerimaan	:	29 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000572752
Tanggal Pengumuman	:	4 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	29 Mei 2015
Tanggal Kadaluausa	:	29 Mei 2025
Kelas	:	30

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037212 tanggal 2 Maret 2023, merek "Cassato Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

6. Sertifikat Merek "Maxi Talos"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Talos
Tanggal Penerimaan	:	27 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000575428
Tanggal Pengumuman	:	25 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	27 Mei 2015
Tanggal Kadaluausa	:	27 Mei 2025
Kelas	:	29

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037279 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Talos" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

7. Sertifikat Merek "Maxi Round Chackers"

Nama pemilik merek : Sarkoro Handajani

Untuk merek dengan :

Nama	:	Maxi Round Chackers
Tanggal Penerimaan	:	27 Mei 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000576077
Tanggal Pengumuman	:	25 Januari 2017
Tanggal Pendaftaran Merek	:	27 Mei 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	27 Mei 2025
Kelas	:	30

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037274 tanggal 2 Maret 2023, merek "Maxi Round Crackers" sedang dalam proses pengalihan dari Sarkoro Handajani kepada Perseroan.

8. Sertifikat Merek "MAXI"

Nama pemilik merek : Garrett Suryowijoyo

Untuk merek dengan :

Nama	:	MAXI
Tanggal Penerimaan	:	3 Juli 2015
No. Pendaftaran	:	IDM000625038
Tanggal Pengumuman	:	23 Agustus 2015
Tanggal Pendaftaran Merek	:	3 Juli 2015
Tanggal Kadaluarsa	:	3 Juli 2025
Kelas	:	30

Catatan:

Berdasarkan Formulir Pengalihan Merek No. IPT2023037310 tanggal 2 Maret 2023, merek "MAXI" sedang dalam proses pengalihan dari Garrett Suryowidjojo kepada Perseroan.

Perseroan memiliki hak untuk menggunakan sertifikat-sertifikat merek di atas berdasarkan Surat Perjanjian No. 060/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Sarkoro Handajani dan Perseroan dan Surat Perjanjian No. 085/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Garrett Suryowijoyo dan Perseroan, yang pada dasarnya memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan merek-merek di atas.

Walaupun demikian, perjanjian-perjanjian tersebut belum dicatatkan kepada Menkumham. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah oleh Perppu CK ("UU Merek") menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menkumham dikenai dengan biaya serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (5) UU Merek menentukan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan tidak melanjutkan proses pendaftaran perjanjian lisensi ke Menkumham dikarenakan merek-merek tersebut di atas masih dalam proses peralihan ke Perseroan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("Ditjen KI") sebagaimana dibuktikan dengan: (a) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Sarkoro Handajani tanggal 24 Februari 2023; (b) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Garrett Suryowidjojo tanggal 24 Februari 2023; serta (c) Formulir-Formulir Pengalihan Merek tanggal 2 Maret 2023 yang telah disampaikan Perseroan kepada Ditjen KI. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, proses peralihan merek akan selesai dalam tiga bulan setelah dokumen disampaikan ke Ditjen KI.

P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah produsen makanan ringan yang berdomisili di Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180, Indonesia yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia dan China. Produk Perseroan pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di Wilayah Bogor, Jawa Barat – Indonesia.

Bisnis Perseroan pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Dengan perkembangan teknologi yang inovatif didukung dengan permintaan pasar yang tinggi, Perseroan saat ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan Perseroan. Perseroan memproduksi makanan ringan dengan merek Maxi dan juga memproduksi merek-merek lain (private label/OEM) dari pelanggan-pelanggan Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi pengolahan snack, dimana keduanya berada di Kabupaten Bogor, dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas Pabrik Perseroan I

Kawasan Industri Sentul Jl. Cahaya Raya Kav H5, Leuwinutug, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16180



Fasilitas Pabrik Perseroan II

Olympic Raya B-11, Sentul Industrial Estate, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16180



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI


Menjadi perusahaan makanan ringan berkualitas terbaik yang dapat diterima dimarket global maupun lokal. Dan tidak meyampingkan aspek kesinambungan dalam kegiatan usahanya.

MISI

- Menggunakan bahan baku berkualitas baik dan didukung oleh kemampuan karyawan serta didukung dengan teknologi yang mumpuni agar menghasilkan produk yang baik, sehat dan berkualitas tinggi.
- Aktif dan giat dalam memasarkan produk ke market global, agar produk produk Perseroan dapat lebih dikenal di pasar global.
- Ikut dan ambil andil dalam kegiatan / aktifitas yg berkelanjutan, dengan mulai mensertifikasi produk dan tempat usaha dengan sertifikasi berkelanjutan usaha.

Untuk memastikan standar kualitas produk Perseroan, Perseroan telah memiliki sertifikasi BRC/GFSI, ISO 9001. Penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) dan teknologi inovatif kami menjamin kualitas dan kebersihan semua batch yang kami produksi. Kontrol kualitas dan jaminan kualitas yang ketat juga dilakukan dalam pemeriksaan, pemilihan bahan baku dan pada tahap akhir proses.

Berikut beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

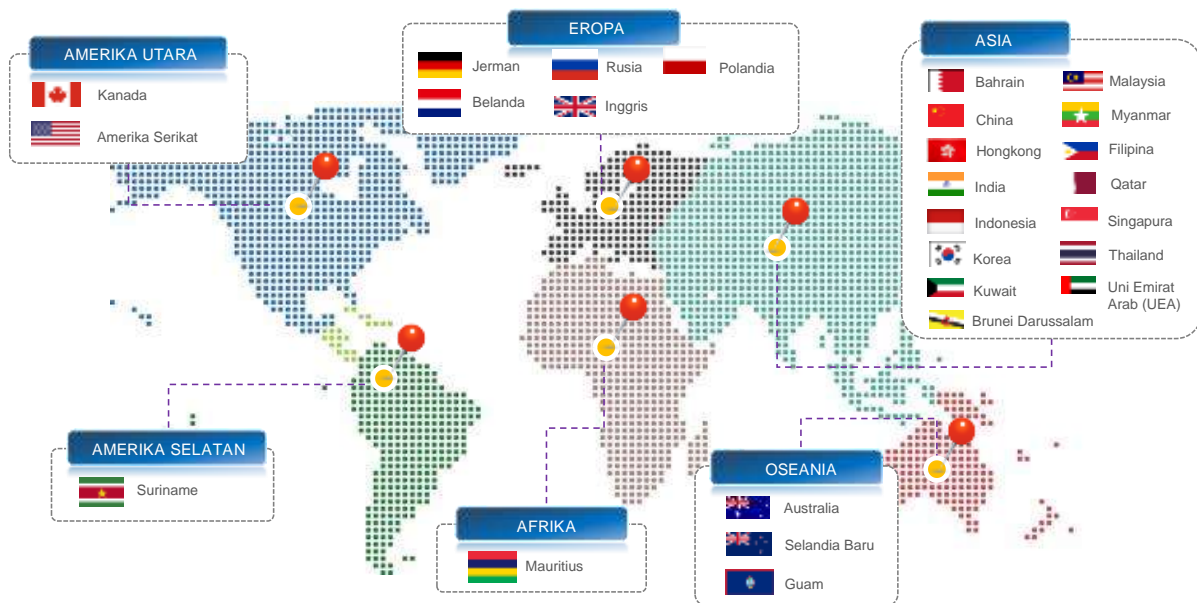
Logo Sertifikasi	Keterangan Mengenai Sertifikasi	Instansi Yang Menerbitkan
	<p>Keamanan Pangan Berstandar Global atau BRCGS adalah organisasi merek dan perlindungan konsumen terkemuka. BRCGS Global Standard menjamin standarisasi kriteria kualitas, keselamatan dan operasional serta memastikan bahwa produsen memenuhi kewajiban hukumnya, dan memberikan perlindungan bagi konsumen akhir. BRCGS adalah sertifikasi pertama yang diakui oleh GFSI (Global Food Safety Initiative). Sertifikasi BRCGS lebih ketat dari Sertifikasi lainnya</p>	<p>BRCGS Badan Sertifikasi : PT SGS Indonesia</p>
	<p>FoodChain ID Standar Global Non-GMO diakui dalam industri sebagai tolak ukur untuk sistem produksi non-GMO, karena menerapkan pendekatan sistem manajemen mutu untuk pelestarian identitas</p>	<p>Badan Sertifikasi : FoodChain ID</p>
	<p>Bersertifikat bebas gluten akan meyakinkan konsumen yang mencari makanan bebas gluten bahwa produk kami memenuhi kebutuhan mereka.</p>	<p>Certification Body : FoodChain ID</p>
	<p>Rainforest Alliance adalah jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif.</p>	<p>Rainforest Alliance Certification Body : Ecocert</p>
	<p>Standar ini didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus pelanggan yang kuat, motivasi dan implikasi dari manajemen puncak, pendekatan proses dan peningkatan berkelanjutan. Menggunakan ISO 9001:2015 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan produk dan layanan yang konsisten dan berkualitas baik, yang pada gilirannya membawa banyak keuntungan bisnis.</p>	<p>Certification Body : TÜV SÜD Indonesia</p>

Logo Sertifikasi	Keterangan Mengenai Sertifikasi	Instansi Yang Menerbitkan
	Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA atau US FDA) adalah agen federal dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. FDA bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan masyarakat melalui kontrol dan pengawasan salah satunya adalah keamanan pangan. Semua produk yang diekspor ke AS harus mematuhi peraturan FDA. Agen AS untuk FDA : Registrar Corp	U.S. Agent for FDA : Registrar Corp
	Kosher (juga kashrut, kashrus atau kashruth) menandakan makanan yang memenuhi hukum diet Yahudi	Kosher Australia PTY LTD
	Sertifikasi Halal menandakan apa yang diperbolehkan atau halal dalam hukum Islam. Ini sering diterapkan pada makanan dan minuman yang diizinkan.	LPPOM MUI BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan saat ini berfokus pada pasar ekspor seperti ke pasar Amerika, Eropa, Australia dan China. Saat ini, Perseroan telah berhasil dipercaya oleh pelanggannya dengan melakukan ekspor produk-produk Perseroan ke banyak negara maju termasuk Australia, Bahrain, Brunei Darussalam, Kanada, China, Jerman, Guam, Hongkong, India, Korea, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Polandia, Qatar, Rusia, Singapura, Suriname, Thailand, UEA, Inggris, dan Amerika Serikat.

Berikut adalah Negara Tujuan Ekspor penjualan produk-produk Perseroan sebagai berikut:



Berikut dibawah ini adalah 4 Pelanggan Utama Perseroan, sebagai berikut:

No	Instansi / Perusahaan	Jenis Usaha	Tujuan Distribusi
1.	The Vege Chip Co.	Snack manufacturer & Distributor	Australia
2.	Wai Lana Productions LLC	Health, Wellness and Fitness industry	USA
3.	Intersnack Nederland BV	Snack manufacturer & Distributor	Netherland
4.	Baland International BV	importer food products from South East Asia	Netherland

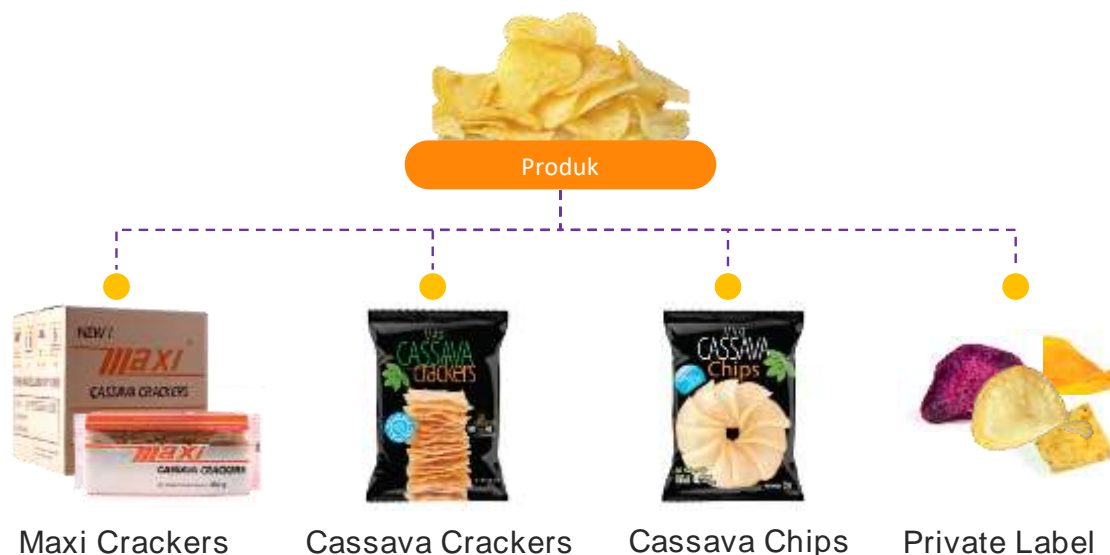
3. PRODUK PERSEROAN

Bisnis Perseroan saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti Talas, Ubi Merah, Ubi Ungu, dan Talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Perseroan mengolah umbi-umbian segar dengan melalui tahapan proses produksi yang dilakukan dengan mesin modern dan higienis sesuai dengan standard GMP, yang menjadikan produk olahan tersebut menjadi makanan ringan yang siap dijual dan dinikmati oleh semua kalangan dengan standard kualitas pangsa internasional.

Perseroan telah melakukan penjualan ekspor ke lebih dari 25 (dua puluh lima) negara diseluruh dunia dengan dua jenis merek yakni:

1. Maxi
2. OEM/Private label

Berikut adalah produk-produk Perseroan sebagai berikut:



Saat ini, selain produk-produk yang dipasarkan sebagai produk Perseroan sendiri, Perseroan menawarkan kepada klien solusi label pribadi (*private label*) yang dipesan lebih dahulu untuk menyesuaikan branding dan kriteria distributor dan atau klien.

Hasil produksi PT Maxindo Karya Anugerah memiliki dua jenis :

1. Produk siap goreng (Pellets)



Pellet Mentah (Raw Pellet)

Pellet mentah kami adalah jajanan akar tradisional dari Jawa Barat-Indonesia. Memiliki cita rasa rempah khas Indonesia dan kami produksi dengan proses

teknologi pangan yang modern dan higienis.



2. Produk siap makan

Kerupuk Goreng (*Fried Crackers*)

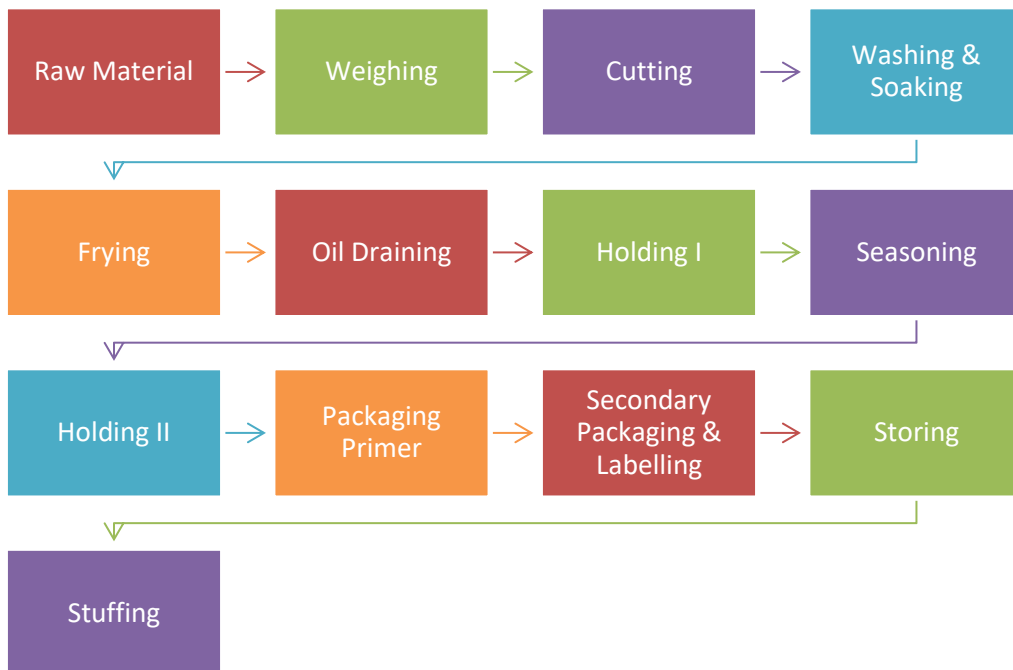
Selain produk pelet mentah, kami juga memiliki kerupuk siap saji yang diolah dari pelet mentah kami; gorengan, bumbu, pengemasan dalam kontrol kualitas yang ketat dan jaminan kualitas juga dilakukan dalam pemeriksaan, pemilihan bahan baku dan dalam proses tahap akhir.

Keripik goreng (*Fried Chips*)

Juga dikenal sebagai produk keripik goreng iris berkualitas tinggi di banyak negara seperti Australia, Singapura, Cina, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Belanda dan lain-lain. Diproduksi di manufaktur kami yang berasal dari umbi-umbian termasuk singkong, ubi ungu, ubi oranye dan talas.

4. PROSES PRODUKSI

Berikut adalah proses produksi untuk pengolahan Keripik dan Pellet dengan perincian sebagai berikut:



- 1) Bahan baku seperti singkong, ubi jalan, ubi ungi, kentang dan talas diterima oleh Perseroan dalam keadaan sudah terkupas dan dilakukan pengecekan kualitas. Barang akan ditolak apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan
- 2) Setelah pengecekan, dilakukan penimbangan yang nantinya akan disesuaikan dengan penggorengan.
- 3) Pemotongan dilakukan disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat.
- 4) Hasil pemotongan akan di sortir kembali. Khusus untuk singkong dan talas akan dilakukan pencucian dan perendaman kembali
- 5) Penggorengan. Bahan baku akan masuk ke dalam penggorengan.
- 6) Setelah digoreng, hasil produksi akan ditiriskan agar minyaknya.
- 7) Hasil produksi akan disimpan (didiamkan) tanpa bumbu (*without seasoning*) selama maksimal 10 hari.
- 8) Pemberian bumbu disesuaikan dengan jenis produk yang akan dihasilkan.
- 9) Hasil produksi akan disimpan (didiamkan) kembali yang sudah dibumbui selama maksimal 4 hari.
- 10) *Packaging primer* yaitu pemberian bungkus utama dari hasil produk yang dihasilkan.
- 11) *Secondary Packaging* yaitu pembungkusan hasil produksi menggunakan karton.
- 12) Hasil produksi yang sudah dibungkus karton akan disimpan di dalam gudang.
- 13) Pengiriman hasil produksi.

Berikut beberapa aktifitas produksi produk Perseroan:



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan kumulatif selama 3 tahun terakhir:

Kapasitas Pabrik Plant I

	2019	2020	2021	Jan – Okt 22022
Kapasitas Produksi (Kg)	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.360.000
Volume Produksi (Kg)	1.006.224	907.596	1.039.682	652.830
Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai (%)	38,34%	44,39%	36,29%	52,00%

Kapasitas Pabrik Plant II

	2019	2020	2021	Jan – Okt 22022
Kapasitas Produksi (Kg)	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.600.000
Volume Produksi (Kg)	1.090.944	1.022.832	1.334.496	1.035.064

Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai (%)	43,18%	46,73%	30,50%	35,31%
--	--------	--------	--------	--------

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya:

1. Perseroan senantiasa menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Seluruh bahan baku umbi-umbian Perseroan diperoleh dari Indonesia dengan kekayaan alam melimpah dan memiliki kualitas yang tinggi sehingga Perseroan dapat memproduksi produk-produk makanan ringan yang dapat diterima pada pasar ekspor. Selain itu, untuk bahan baku singkong yang digunakan telah tersertifikasi *Rain Forest Alliance* yang adalah lembaga internasional aliansi petani, masyarakat, perusahaan dan konsumen untuk menciptakan keselarasan antara manusia dan alam.
2. Menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai standard internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat diterima di 25 negara-negara di kawasan Amerika, Eropa, Australia dan Asia. Produk-produk yang dipasarkan dengan tujuan ekspor harus memiliki kualitas yang tinggi untuk dapat diterima oleh pasar luar negeri, oleh karena itu, Perseroan memerlukan teknologi yang canggih dan moderen untuk menghasilkan produk-produk yang premium.
3. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidangnya serta berkualitas sehingga mampu menghasilkan produk-produk Perseroan yang memiliki kualitas premium yang dapat diterima oleh Pasar Internasional.
4. Perseroan telah memiliki berbagai macam sertifikasi standar seperti Sertifikasi Badan Keamanan Pangan Internasional, Sertifikasi Non Gluten Free, Sertifikasi Rainforest Alliance, Sertifikasi ISO, Sertifikasi FDA (sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Negara Amerika Serikat), Sertifikasi Kohser (sertifikasi untuk makanan diet dari Israel) dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia.
5. Produk makanan ringan/snacks yang di produksi Perseroan merupakan makanan yang sehat (*healthy food*). Mengingat saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya untuk menjaga kesehatan, oleh karena itu, produk-produk makanan ringan Perseroan merupakan produk yang aman untuk di konsumsi dengan kategori healthy food. Hal ini dikarenakan produk makanan ringan Perseroan telah disertifikasi dan diawasi oleh badan sertifikasi internasional dengan pengawasan yang sangat ketat dan standar produksi yang tinggi untuk menghasilkan produk-produk makanan ringan yang bermutu dan kualitas yang premium.
6. Perseroan didukung oleh Manajemen yang memiliki pengalaman di industri makanan ringan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

6. PERSAINGAN USAHA

Berikut adalah beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan:

Di Indonesia:

- 1) PT Indofood (Qtela, Chitato)
- 2) CV Arira Pangindo (Kusuka)
- 3) PT Universal Cipta Pangan (Kingkong)
- 4) PT Inovasi pangan nusantara/BareFood (Pota)
- 5) PT Sentral Multirasa Utama /Acefood (Chuba)
- 6) Calbee (Japota)

Internasional:

- 1) The Hain Celestial Group (Terra chips)
- 2) Frito-Lay (Lays)
- 3) the Veggie Straw (Veggie Straw)
- 4) Procter & Gamble (Pringles)

No.	Nama Kompetitor	Merek	Produk	Pangsa Pasar (%)	DalamNegeri / LuarNegeri
1	PT. Titani Alam Semesta	Senna	Pellet singkong	NA	Dalam negeri
2	PT Sekar Laut Tbk	Finna & Krobe	Pellet singkong and keripik singkong (cassava crackers)	NA	Dalam negeri
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Qtela	Keripik singkong dan ubi	NA	Dalam negeri
4	PT Universal Cipta Pangan	King Kong, Lemonilo	Keripik singkong dan ubi campur	NA	Dalam negeri
5	CV Arira Pangindo	Kusuka	Keripik singkong, ubi dan talas	NA	Dalam negeri

No.	Nama Kompetitor	Merek	Produk	Pangsa Pasar (%)	DalamNegeri / LuarNegeri
6	Bionic Farm – part of Propan Group	Sweetatoes for Starbuck Indonesia group	Keripik ubi ungu dan oranye	NA	Dalam negeri
7	Acefood Group	Chuba	Keripik singkong	NA	Dalam negeri
8	The Hain Celestial Group	Terra Chips & Sensible Portions – Garden Veggie Straws	Ubi ungu dan oranye, talas dan juga straws (chips bentuk sedotan stik)	NA	Luar negeri – USA & Canada
9	PSN Interfood Co., Ltd.	Veganic	Keripik ubi ungu, oranye, talas	NA	Luar negeri – Thailand
10	Food Incident Co., Ltd.	Nutriz	Keripik ubi ungu, oranye, talas	NA	Luar negeri – Thailand
11	Snack Brands Australia	Thins & Kettle	Keripik kentang dan extruder	NA	Luar negeri – Australia
13	Nong Shim	Sweet Potato Snack	Keripik ubi	NA	Luar negeri – Korea

7. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan sebagai berikut:

1. Diversifikasi produk ke pasar snack/makanan ringan untuk *medium-high* dan pasar lokal. Saat ini, Perseroan melakukan penjualan kepada pasar dengan tujuan ekspor dan dengan harga premium untuk kelas high-end. Kedepannya dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilakukan, Perseroan akan melakukan pengembangan snack dengan bahan dasar umbi-umbian untuk pasar menengah atas (*medium-high*) yang menurut penilaian Perseroan masih memiliki prospek permintaan yang cukup tinggi.
2. Perseroan akan membuka pasar untuk tujuan ekspor dan jalur distribusi baru ke negara di daerah Timur Tengah dan Asia. Saat ini Perseroan telah melakukan penjualan produk snack Perseroan dengan tujuan ekspor ke negara Amerika, Eropa dan Australia. Kedepannya dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilakukan Perseroan, Manajemen akan membuka pasar baru dengan tujuan ekspor Timur Tengah (*Middle East*) dan Asia seperti China dan Singapura yang memiliki potensi permintaan untuk produk makanan ringan premium.
3. Tidak hanya untuk pasar luar negeri, sebagai strategi usaha Perseroan untuk mengembangkan kepada pasar lokal. Perseroan akan melakukan penjualan dan pemasaran untuk pasar domestik. Perseroan menilai bahwa permintaan untuk pasar Domestik memiliki potensi dari sisi permintaan yang cukup tinggi, oleh karena itu kedepannya Perseroan akan melakukan penjualan dan pemasaran untuk pasar domestik dengan kualitas makanan ringan *Medium-High*.

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan kedepannya Perseroan akan melakukan pengembangan produk-produk baru dengan varian rasa baru yang dapat diterima oleh pasar baik tujuan ekspor maupun untuk pasar domestik. Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan produk-produk dengan kualitas yang baik dan harga yang cukup terjangkau untuk pasar medium-high.

8. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Saat ini, penjualan dan pemasaran dari Perseroan dilakukan melalui mekanisme B2B (*Business to Business*) dimana Perseroan melakukan penjualan melalui perusahaan perdagangan (pihak ketiga) dan kemudian perusahaan tersebut melakukan distribusi kepada toko-toko dan wholesale di pasar luar negeri di Amerika, Eropa dan Australia. Produk-produk Perseroan telah masuk di toko-toko besar seperti Walmart, Target, Costco dan beberapa toko-toko lainnya di luar negeri. Kedepannya dalam rangka pembukaan jalur distribusi baru baik untuk tujuan ekspor Timur Tengah dan Asia, Perseroan akan melakukan penambahan dan memperkuat tim Marketing agar dapat melakukan pemasaran untuk tujuan ekspor di negara-negara di Timur Tengah dan Asia.

Berikut dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Country	Currency	Total 2020	Total 2021	Total 2022
1	USA	USD	1.083.688,33	985.629,12	1.949.210,82
2	Netherland	USD	2.155.909,68	3.242.819,24	2.619.773,70
3	China	USD	11.208,18	4.907,52	4.953,60
4	Japan	USD	7.318,08	-	-
5	Thailand	USD	6.579,00	13.723,98	-
6	Korea	USD	29.319,68	29.286,40	-

7	Mauritius	USD	13.698,36	-	-
8	Norway	USD	22.734,10	17.054,44	-
9	Philippines	USD	111.324,00	62.990,38	-
10	Brunei	USD	-	15.888,60	11.148,00
11	India	USD	-	2.315,52	-
12	Saudi Arabia	USD	-	8.422,22	17.077,20
13	Maldives	USD	-	-	12.392,44
14	Australia	USD	-	16.109,25	8.268,64
15	Singapore	USD	38.801,55	25.448,77	18.838,10
16	Singapore	SGD	65.851,00	55.753,00	24.800,00
17	Australia	AUD	6.348.727,42	7.834.766,87	3.488.216,25
Total			9.895.159,38	12.315.115,31	8.154.678,75

Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan masa mendatang, Perseroan akan membuka jalur distribusi baru untuk pasar domestik. Perseroan akan menggarap beberapa potensi di pasar domestik yang masih memiliki peluang untuk bertumbuh. Atas hal tersebut, Perseroan akan melakukan tim pemasaran dan penjualan untuk melakukan penjualan di pasar domestik. Seiring dengan pembukaan jalur distribusi baru untuk pasar domestik, Perseroan akan melakukan pemasaran melalui sosial media, event-event, exhibition dan pameran makanan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru.

9. PROSPEK USAHA

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok setiap manusia di setiap negara, kebutuhan ini diperlukan dan dikonsumsi setiap hari. Makanan dan minuman dalam kemasan adalah salah satu produk yang hadir di pasar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dan juga di akselerasi dengan gaya hidup masyarakat dengan mobilitas yang makin tinggi. Meskipun semua industri terpuak berat pada saat pandemi covid-19 melanda dunia mulai dari awal 2020, namun data menunjukkan bahwa masih terdapat perkembangan positif pada industri makanan dan minuman, khususnya di Indonesia.

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan primer yang paling utama yaitu makanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dalam bisnis perdagangan makanan dan minuman. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur mampu menyediakan bahan baku sehingga dapat memicu peningkatan hasil produksi terhadap produk komoditi primer makanan dan minuman olahan. Ketika kebutuhan masyarakat dalam negeri telah terpenuhi maka kelebihan produksi makanan dan minuman dapat di ekspor ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Juliantari & Nyoman, 2015).

Indonesia tergabung pada *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* bersama dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru yang menjadi kerjasama regional antara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Potensi dan peluang pasar RCEP diperhitungkan sangat besar dan mampu mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar RCEP kecuali pada negara Australia, Kamboja, Jepang, Korea dan Laos. Sedangkan posisi dinamika ekspor industri makanan dan minuman Indonesia berada pada posisi rising star pada sepuluh negara dan sisanya berada pada posisi falling star dan retreat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap industry ekspor makanan dan minuman dari Indonesia adalah jarak ekonomi, GDP riil perkapita negara tujuan, populasi negara tujuan, harga ekspor, keterbukaan perdagangan dan tarif (Wardani et al., 2018).

Selain itu, Perseroan saat ini merupakan bagian dari Rainforest Alliance, yaitu jaringan petani, rimbawan, komunitas, ilmuwan, pemerintah, pemerhati lingkungan, dan bisnis yang terus berkembang yang didedikasikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Rainforest Alliance bekerja untuk membangun hutan yang kuat, lanskap pertanian yang sehat, dan komunitas yang berkembang melalui kolaborasi pragmatis yang kreatif. Perseroan meyakini bahwa dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga iklim.

Perkembangan kesadaran masyarakat bukan hanya di negara – negara mau tapi juga trend kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, mengandung banyak serat, vitamin, natural dan juga produk-produk dengan “clean label” semakin meningkat juga di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Perseroan memberikan solusi dengan menawarkan produk – produk makanan ringan yang diolah dari umbi – umbian langsung dari alam, natural, berserat tinggi dan memiliki kandungan vitamin.

Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi pelatihan dan sosialisasi kepada petani secara cuma-cuma. Perseroan berusaha selalu meningkatkan kualitas hidup para petani yang juga merupakan hulu dari produk Perseroan untuk tetap dapat menghasilkan hasil pertanian berupa singkong dan ubi dengan kualitas terjaga. Hal ini tentu melekat juga pada kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Pertanian Kepada Petani



2) Pelatihan Penggunaan Pestisida Pada Petani



3) Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Pada Petani



4) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Petani



5) Donasi Kepada Yayasan dan Yatim Piatu dan Dhuafa



6) Pemeriksaan Mata dan Pembagian Kaca Mata Gratis kepada Masyarakat



7) Sumbangan APD (Alat Pelindung Diri) Kepada Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19



8) Sumbangan air, makanan & selimut untuk pemasok bahan baku kami di Cipanas, Cianjur Gempa – 21 Nov 2022



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota dari Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1029.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen masing-masing pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal Saham	91.600.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Tambahan Modal	88.513.500	88.513.500	88.513.500	88.513.500
Saldo laba	16.777.513.064	45.551.666.986	33.970.701.054	25.967.657.396
Jumlah Ekuitas	108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2022	91.600	88	16.778	108.466
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2022				
Penawaran Umum dari Saham Baru sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) saham dengan harga penawaran Rp● per saham		●		●
Biaya Emisi		●		●
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	●			●

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai dengan UUPT pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 57/2022, Perseroan telah melakukan pembagian dividen bonus melalui kapitalisasi laba pada tahun buku 2021 sebesar Rp30.0000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Adapun pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat pembagian dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, Peraturan No. IX.A.7, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	●	●	●
Total Penjaminan Emisi Efek				100,00

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan KNP sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan KNP dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan, KNP dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp● setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
Cyber 2 Tower Lantai 9 Unit A,B,C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950
- No. STTD : STTD.AP-569/PM.2/2018 atas nama Juninho Widjaja, CPA
Tanggal STTD : 5 Juni 2018
Surat Penunjukan : No. KNMT&R/IIIa/EL-0007/05/2022/JW tanggal 30 Mei 2022
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)**
Wisma 46 - Kota BNI
32nd and 41st Floor (Main Reception)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
- No. STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018 atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Keanggotaan Asosiasi : Profesi Penunjang Pasar Modal
Surat Penunjukan : 1086/EKW/VIII/21 Tanggal 10 September 2021
Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Notaris** : **Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn.**
Komplek Bina Marga II
Jl. Swakarsa V No. 57B
Pondok Kelapa, Duren Sawit
Jakarta 13450
- No. STTD : STTD.No-40/PM.22/2018
Nomor Keanggotaan : No. 0046519650703
Asosiasi :
Surat Penunjukan : 095/NOT/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021
Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : **PT Bima Registra**
Satrio Tower, 9th Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2,
Kuningan, East Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta City, Jakarta 12950

No Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukan : 606/BIMA/BID/XI/2022 tanggal 22 November 2022
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha -dalam bidang:

- 1) Industri Pengolahan; dan
- 2) Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri pengolahan yang meliputi: Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (10794) Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
- 2) Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, yang meliputi: Aktivitas Perusahaan Holding (64200) Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp365.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 36.500.000.000 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) atau sejumlah 916.000.000 (sembilan ratus enam belas juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp91.600.000.000,- (sembilan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja dan sebagaimana dapat berubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT"), peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 anggaran dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda tidak bergerak yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang

- menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah- yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau- efek lain yang dapat dikonversi menjadi- saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang- HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang- saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portefolio untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal- serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan-anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%- (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat- dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6- (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua)- bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Direksi (Pasal 15)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (i) tidak pernah menjadi anggota Direksi
 - (ii) dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

- 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam-ayat (2) dan/atau (3) Pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS
11. –
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlakusejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
12. –
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
13. –
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud- pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf- a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan
 - (i) untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - (ii) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - (i) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau
 - (ii) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS- maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud- dalam huruf c ayat ini.
14. RUPS dapat;
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri -atau untuk mengisi lowongan adalah untuk -sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS
15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat (11) anggaran dasar ini.
19. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sepanjang jabatan rangkap tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

D. Dewan Komisaris (Pasal 18)

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

- 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ataupun pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhikewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
 - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 - b. Pernyataan independensi sebagaimana huruf a ayat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5) dan (6) Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan/atau ayat (6) Pasal ini.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. –
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. –
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujui pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowongan dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sepanjang jabatan rangkap tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal yang akan berlangsung sejak tanggal 22 - 24 Mei 2023 atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi.corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 22 - 24 Mei 2023

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 6 - 8 Juni 2023.

Masa Penawaran Umum	Tanggal Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	6 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	7 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	8 Juni 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

9. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor c tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% atau senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian mengenai jumlah dana yang akan dihimpun akan ditentukan setelah Masa Penawaran Awal telah selesai.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
 - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibanding dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 6 - 8 Juni 2023 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan ditentukan kemudian jika ada)

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Jakarta, 16 Mei 2023

Kepada Yth.

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk.

Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya Blok B-11
Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat 16810

Up.: **Direksi PT Maxindo Karya Anugerah, Tbk.**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Maxindo Karya Anugerah, Tbk. ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 1086/EKW/VIII/21 tertanggal 10 September 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

1. Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**");
2. Sebanyak-banyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Karya Nusa Persada ("**KNP**") yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan ("**Saham Divestasi**"),

(selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut "**Saham Yang Ditawarkan**")

yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang



PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 2 -

memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran dimaksud diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan merupakan saham dalam portepel yang dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain, kecuali dalam Penawaran Umum Perdana ini. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") di mana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-03087/BEI.PP2/04-2023 dari PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2023..

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT Shinhan Sekuritas Indonesia** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Maxindo Karya Anugerah Tbk Nomor 8 tertanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 11 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 28 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7 tanggal 17 April 2023, (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 5 tanggal 10 Mei 2023, dan (v) Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat ("**Akta PPEE**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari: (i) Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham; dan (ii) dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor ("**Modal Kerja**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 3 -

setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 13 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tertanggal 21 Maret 2023, seluruh dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003068.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 17 Januari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0007830 tertanggal 17 Januari 2023, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-002740 tanggal 16 Januari 2023; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009635.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023; serta (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 007 dan Tambahan BNRI ("**TBNRI**") No. 002433 tanggal 24 Januari 2023 ("**Akta No. 6/2023**").

Berdasarkan Akta No. 6/2023, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Maxindo Karya Anugerah menjadi PT Maxindo Karya Anugerah Tbk.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
3. Menyetujui pengeluaran saham-saham baru dalam simpanan/portepel Perseroan sehubungan dengan dan untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:
 - a. Pengalihan Saham Divestasi;
 - b. Pengeluaran Saham Baru,

yang mana Saham Divestasi dan Saham Baru tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 4 -

bidang Pasar Modal, termasuk peraturan OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan dari Saham Divestasi dan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

4. Menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Menyetujui untuk mencatatkan Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
6. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
7. Menyetujui penetapan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pihak pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan sebagai pihak pemilik manfaat akhir Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan sebagai Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dan Saham Baru Perseroan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

Selanjutnya, menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. menetapkan rentang harga penawaran awal dan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
2. menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
5. mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 5 -

9. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta mencerminkan kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 786/EKW/V/23 tanggal 16 Mei 2023 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No. 746/EKW/IV/23 tertanggal 10 Mei 2023, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya;
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal;
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 6 -

2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Direksi, Komisaris Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No. 6/2023 yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:
 - a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Maxindo Karya Anugerah menjadi PT Maxindo Karya Anugerah Tbk.
 - b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif,

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 7 -

yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

- c. Menyetujui pengeluaran saham-saham baru dalam simpanan/portepel Perseroan sehubungan dengan dan untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 10,41% (sepuluh koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari:

- i. Pengalihan Saham Divestasi;
- ii. Pengeluaran Saham Baru,

yang mana Saham Divestasi dan Saham Baru tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan dari Saham Divestasi dan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

- d. Menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,92% (sepuluh koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- e. Menyetujui untuk mencatatkan Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- f. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
- g. Menyetujui penetapan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pihak pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan sebagai pihak pemilik manfaat akhir Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 8 -

- h. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan sebagai Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dan Saham Baru Perseroan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

Selanjutnya, menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. menetapkan rentang harga penawaran awal dan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
 2. menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perseroan serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 4. menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 5. mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- i. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta mencerminkan kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
2. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Adapun

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 9 -

modal kerja yang dimaksud adalah terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru dan merujuk kepada POJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dari Saham Baru tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman dari pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.

3. Penawaran Umum Perdana Saham yang berasal dari Saham Divestasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.
4. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

5. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 10 -

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9 tertanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 28 Maret 2023, dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 10 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 10 tertanggal 18 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 28 Maret 2023, dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
- d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah oleh (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 23 Februari 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 28 Maret 2023, dan (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 16 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-001/SHM/KSEI/0123 tanggal 1 Februari 2023.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu CK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia **kecuali** sehubungan dengan Akta Pendirian Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") dan Tambahan BNRI ("**TBNRI**").

Berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 95**"), yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pendirian Perseroan, pendirian perseroan terbatas diumumkan dalam TBNRI, dan apabila pengumuman tersebut tidak dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 11 -

Namun demikian, tidak terdapat sanksi yang spesifik terkait ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pendirian perseroan dalam TBNRI sebagaimana diatur dalam UUPT 95, kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan TBNRI. Namun, hingga Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan konfirmasi Perseroan, tidak terdapat gugatan dari pihak ketiga mana pun sehubungan dengan Akta Pendirian Perseroan.

Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 6/2023 yang untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya serta Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6/2023, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 6/2023, telah (i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini sudah dijalankan oleh Perseroan, sudah dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, **kecuali** sehubungan dengan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini belum dilakukan oleh Perseroan.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 56 tertanggal 31 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp9.000.000.000,- atau setara dengan 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) dari total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Namun demikian, penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 12 -

belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 16 Januari 2023, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

4. Sehubungan dengan pemilik manfaat serta pengendali Perseroan, berdasarkan bukti pelaporan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Akta No. 6/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menetapkan bahwa (i) pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja; dan (ii) pihak pengendali dari Perseroan adalah Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja.

Dalam rangka pelaksanaan:

- i. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Ditjen AHU**") melalui sistem online tertanggal 16 Januari 2023 melalui Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn.

Lebih lanjut, Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018, dikarenakan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kemudian, Carolina Renata Djaja sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018, dikarenakan menerima manfaat dari perseroan terbatas.

- ii. Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 6/2023 telah menetapkan Carolina Renata Djaja dan Liknawaty Kuwikatmadja sebagai pihak pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Dengan demikian, penetapan Liknawaty Kuwikatmadja dan Carolina Renata Djaja sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan dan pihak pengendali Perseroan telah sesuai dengan Perpres 13/2018 dan POJK 3/2021.

5. Sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, di mana dalam hal lebih dari 1 (satu) orang anggota

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 13 -

Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014"), **kecuali** sehubungan dengan belum dimuatnya pengumuman Sekretaris Perusahaan di dalam situs web Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/2014 mengatur bahwa Perseroan wajib memuat memuat pengumuman pengangkatan Sekretaris Perusahaan dalam situs web Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (1) POJK No. 35/2014 menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran ketentuan POJK No. 35/2014 ini, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

7. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Komite Audit Perseroan

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), **kecuali** sehubungan dengan belum dimuatnya pengumuman Komite Audit di dalam situs web Perseroan.

Berdasarkan 12 ayat (3) POJK No. 55/2015 mengatur bahwa Perseroan wajib memuat memuat pengumuman pengangkatan Sekretaris Perusahaan dalam situs web Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) POJK No. 55/2015 menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran ketentuan POJK No. 55/2015 ini, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 14 -

- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

9. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), kecuali sehubungan dengan belum dimuatnya pengumuman Komite Nominasi Remunerasi di dalam situs web Perseroan.

Berdasarkan 22 POJK No. 34/2014 mengatur bahwa Perseroan wajib memuat memuat pengumuman pengangkatan Sekretaris Perusahaan dalam situs web Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) POJK No. 34/2014 menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran ketentuan POJK No. 34/2014 ini, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting yang material dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan Izin Pengusahaan Air Tanah ("IPAT") untuk Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11 nomor Sumur SG-1 No. 546.2/133/291020d/DPMPPTSP/2021 tertanggal 24 Maret 2021 dan Nomor sumur SP-1 No. 546.2/134/291020d/DPMPPTSP/2021 tertanggal 24 Maret 2021 telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2023.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masa berlaku IPAT untuk Lokasi Usaha Jalan Olympic Raya Blok B-11 nomor Sumur SG-1 No. 546.2/133/291020d/DPMPPTSP/2021 tertanggal 24 Maret 2021 dan Nomor sumur SP-1 No. 546.2/134/291020d/DPMPPTSP/2021 tertanggal 24 Maret 2021 telah berakhir pada tanggal 24 Maret 2023.

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 15 -

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku IPAT sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ("**PP No. 121/2015**") mengatur bahwa pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang tidak mematuhi ketentuan dalam izin berupa perpanjangan atas izin yang sudah habis masa berlakunya, pemegang izin tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan/atau (c) pencabutan izin.

Namun demikian, Perseroan telah melakukan pengurusan perpanjangan atas kedua IPAT tersebut melalui OSS dengan status terakhir masih menunggu verifikasi persyaratan sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar tertanggal 8 Mei 2023 pada laman OSS.

11. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Harta Berwujud, (ii) Harta Tidak Berwujud, dan (iii) Hak Kekayaan Intelektual Perseroan, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, **kecuali** sehubungan dengan aset hak kekayaan intelektual berupa merek yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan (i) Surat Perjanjian No. 060/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Sarkoro Handajani dan Perseroan, dan (ii) Surat Perjanjian No. 085/KET-EKS/MAXI/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 antara Perseroan dengan Garrett Suryowijoyo, yang belum dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Ditjen KI**").

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah oleh Perppu CK ("**UU Merek**") mengatur bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menkumham dan dikenai dengan biaya serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (5) UU Merek menentukan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan tidak melanjutkan proses pendaftaran perjanjian lisensi ke Menkumham dikarenakan merek-merek tersebut di atas masih dalam proses peralihan ke Perseroan di Ditjen KI sebagaimana dibuktikan dengan: (a) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Sarkoro Handajani tanggal 24 Februari 2023; (b) Perjanjian Pengalihan Hak Merek antara Perseroan dan Garrett Suryowidjojo tanggal 24 Februari 2023; serta (c) Formulir-Formulir Pengalihan Merek tanggal 2 Maret 2023 yang telah disampaikan Perseroan kepada Ditjen KI. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, proses peralihan merek akan selesai dalam tiga bulan setelah dokumen disampaikan ke Ditjen KI.

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
- c. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga, **kecuali** sehubungan dengan aset berikut ini yang sedang dalam pembebanan jaminan sebagai berikut:

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 16 -

- (1) Hak Guna Bangunan No. 216 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 14 September 2008, yang sedang dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (“**SHT**”) No. 5789/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“**APHT**”) No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank KEB Hana Indonesia (“**KEB Hana**”);
- (2) Hak Guna Bangunan No. 103 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 11 Februari 2003 yang sedang dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 3715/16 dan APHT No. 113/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Yuris Zarde, S.H., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap PT Bank Central Asia, Tbk. (“**BCA**”);
- (3) Hak Guna Bangunan No. 313 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 yang sedang dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank KEB Hana;
- (4) Hak Guna Bangunan No. 314 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 15 Desember 2015 yang sedang dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank KEB Hana; dan
- (5) Hak Guna Bangunan No. 319 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor tanggal 16 Maret 2016 yang sedang dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan SHT No. 5789/2018 dan APHT No. 271/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti, S.H., M.Kn., untuk penjaminan yang dilakukan terhadap Bank KEB Hana.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan dan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, apabila jaminan atas aset material yang dijaminkan kepada kreditur dieksekusi dan atas hak kepemilikan serta penggunaan aset-aset tersebut menjadi dimiliki oleh pihak ketiga manapun, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan secara material.

12. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan/atau pinjaman yang dimiliki Perseroan.
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 17 -

13. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, **kecuali** sehubungan dengan:
 - (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 30 tertanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Zuwana Corna Gumanti S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Kelima No. 004/PK/BGR/2023 tertanggal 27 Januari 2023 ("**Perjanjian Kredit KEB Hana**"), pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perseroan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KEB Hana sebelum membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bank KEB Hana berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 35/036/COM2/Kredit/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank KEB Hana ("**Surat Waiver KEB Hana**"), yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana, PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perseroan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KEB Hana minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan pemegang saham.

Berdasarkan Surat KEB Hana No. 35/054/COM2/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, KEB Hana telah menyatakan dan memberikan konfirmasi bahwa Surat Waiver KEB Hana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit KEB Hana dan surat tersebut sudah mengikat baik kepada KEB Hana dan Perseroan. Sehingga, diperlukan lagi dibuatnya suatu addendum baru dari Perjanjian Kredit KEB Hana guna menyatakan kembali persetujuan dan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Waiver KEB Hana sebagaimana dimaksud di atas.
 - (ii) Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tertanggal 27 Februari 2015 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tanggal 26 Januari 2023 ("**Perjanjian Kredit**

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 18 -

BCA”), yang telah memperoleh waiver berdasarkan mendapat persetujuan dari BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan No. 00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BCA (“**Surat Waiver BCA**”), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan syarat:

- a. Menandatangani perubahan Perjanjian Kredit BCA;
- b. Menyerahkan prospketus dan due diligence Perseroan ke BCA sebelum dilakukan listing;
- c. Menyerahkan Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA;
- d. Selama masih terdapat fasilitas kredit di BCA, debitur wajib mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Persada. Selain itu, manajemen harus tetap berada di bawah kontrol Bapak Sarkoro Handajani.

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perseroan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA.

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Perseroan.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Sertifikat BPJS Kesehatan atas nama Perseroan tidak tersedia. Namun demikian, Perseroan telah terdaftar pada program BPJS dengan diterimanya bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

15. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tertanggal 16 Mei 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

No. Ref.: 787/EKW/V/23

Halaman - 19 -

peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan rencana penggunaan dananya.

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.
STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018
HKHPM No. 201313

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2021 (TIDAK DIAUDIT)
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE TEN-MONTH PERIOD
ENDED OCTOBER 31, 2022
AND YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND TEN-MONTH PERIOD ENDED
OCTOBER 31, 2021 (UNAUDITED)
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

The original financial statements included herein
are in Indonesian language.

**PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2021 (TIDAK DIAUDIT)
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE TEN-MONTH PERIOD
ENDED OCTOBER 31, 2022
AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND TEN-MONTH PERIOD ENDED
OCTOBER 31, 2021 (UNAUDITED)
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direktur		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 - 5	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	6 - 8	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	9 - 10	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	11 - 113	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
TANGGAL 31 OKTOBER 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2021
(TIDAK DIAUDIT)**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
AS OF OCTOBER 31, 2022
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR TEN-MONTH PERIOD ENDED
OCTOBER 31, 2021 (UNAUDITED)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini / *We, the undersigned:*

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama/Name | : Sarkoro Handajani |
| Alamat Kantor/Office address | : Jalan Olympic Raya B-11 & H-5,
Bogor, Jawa Barat, 16810. |
| Alamat domisili/Domicile address | : Jl. Permata Berlian BL Q/14
RT 001/009, Kel. Grogol Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Phone number | : +62 818 975 022 |
| Jabatan/Title | : Direktur/Director |
| 2. Nama/Name | : Carolina Renata Djaja |
| Alamat Kantor/Office address | : Jalan Olympic Raya B-11 & H-5,
Bogor, Jawa Barat, 16810. |
| Alamat domisili/Domicile address | : Jl. Kembang Wangi II Blok K4 no. 2 Puri Indah
RT 009, RW 002, Kel. Kembangan Selatan
Kec. Kembangan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon/Phone number | : +62 816 953 283 |
| Jabatan/Title | : Direktur/Director |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk ("the Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements of the Company and has been presented completely and accurately; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Sentul, 12 Mei 2023/Sentul, May 12, 2023

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk



Sarkoro Handajani
Direktur Utama/ President Director

Carolina Renata Djaja
Direktur/Director

*) Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan/Director in charge of accounting and finance

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwintug, Kec. Citeureup
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA
Phone : +62-21-87900305
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com



The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00809/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/V/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Oktober 2022, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika yang lain berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report

Report No. 00809/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/V/2023

The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk**Opinion**

We have audited the financial statements of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at October 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the ten-month period then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at October 31, 2022, and its financial performance, and its cash flows for the ten-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matter

Key audit matters are those matter that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Halaman 2**Hal audit utama (lanjutan)**

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2n atas laporan keuangan terlampir, pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan, yaitu pada saat barang diserahkan di pelabuhan. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangkan dengan retur, rabat, dan diskon penjualan.

Laporan laba rugi Perusahaan mencakup nilai penjualan neto sebesar Rp91.623.399.769 untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Hal ini signifikan terhadap audit kami dikarenakan jumlah yang signifikan dan karena mempertimbangkan volume transaksi dalam mengevaluasi apakah kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dan pengendalian telah dialihkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Pengungkapan terkait pendapatan diungkapkan dalam Catatan 19 atas laporan keuangan.

Prosedur audit kami dalam menganalisa pengakuan pendapatan termasuk antara lain:

- Kami telah melakukan penelusuran menyeluruh atas proses keuangan dan operasional terkait proses bisnis atas pendapatan;
- Kami melakukan evaluasi atas desain dan efektifitas operasi terkait dengan *key control* atas proses pendapatan;
- Kami telah melakukan pengujian substantif atas pendapatan secara uji petik untuk memeriksa keakuratan dan keterjadian pendapatan;
- Kami telah melakukan pengujian pisah batas atas pendapatan secara uji petik untuk memastikan bahwa pendapatan telah dicatat sesuai periode terjadinya;
- Kami menilai apakah pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- Berdasarkan uji petik, kami telah memeriksa pengakuan pendapatan yang telah tercatat pada catatan keuangan untuk memastikan bahwa pendapatan yang telah diakui didukung oleh bukti yang sesuai.

The original report included herein is in Indonesian language.

Page 2**Key audit matter (continued)**

The key audit matter identified in our current audit is described as follows:

Revenue recognition

As described in Note 2n to the accompanying financial statements, revenue from sales arising from physical delivery of the Company's products is recognized when control of the goods has transferred, being at the point the goods are delivered in sea port. Revenue is presented net of sales returns, rebates and discounts.

The Company's income statement included net sales of Rp91,623,399,769 for ten-month period ended October 31, 2022. This matter is significant to our audit because of the amount involved the volume of transactions in the evaluation whether performance obligation was satisfied and the control was transferred in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The disclosures related to revenue are included in Note 19 to the financial statements.

Our audit procedures to assess revenue recognition included the following:

- *We have conducted a thorough review of the financial and operational processes related to the business process of revenue;*
- *We performed evaluation of design and operating effectiveness of key controls over the revenue process;*
- *We have conducted substantive testing of revenue on a sample basis to check the accuracy and occurrence of revenue;*
- *We have performed a cut-off test on revenue to ensure that revenue has been recorded in the period in which it was incurred;*
- *We assessed whether the disclosures in the consolidated financial statements are consistent with the requirements of Indonesian Financial Accounting Standards.*
- *On a sample basis, we have examined the revenue recognition that has been recorded in the financial records to ensure that the revenue recognized is supported by appropriate evidence.*

Halaman 3**Hal-hal lain**

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 18 April 2022, 21 April 2021 dan 15 April 2020.

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 29 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Laporan keuangan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Maxindo Karya Anugerah Tbk serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

The original report included herein is in Indonesian language.

Page 3**Other matters**

The financial statements of the Company as at December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended, before restatement, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on April 18, 2022, April 21, 2021, and April 15, 2020.

The financial statements of the Company as at October 31, 2021 and for the ten-month period then ended, which are presented as comparative figures to the financial statements as of October 31, 2022 and for the ten-month period then ended, were not audited.

As part of our audit of the October 31, 2022 financial statements and for the ten-month period then ended, we also audited the adjustments described in Note 29 that were applied to amend the December 31, 2021, 2020 and 2019 financial statements and for the years then ended. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the December 31, 2021, 2020 and 2019 financial statements and for the years then ended of the Company other than with respect to the adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on the December 31, 2021, 2020 and 2019 financial statements and for the years then ended taken as a whole.

The financial statements has been prepared in connection with the proposed Initial Public Offering of the equity shares of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk and is not intended to be and should not be use for any other purposes.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 4

Page 4

Hal-hal lain (lanjutan)

Other matters (continued)

Seperti dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan, sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00015/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 tanggal 19 Januari 2023, No.00075/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, No.00223/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan No.00588/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 atas laporan keuangan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Sehubungan dengan rencana PT Maxindo Karya Anugerah Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Maxindo Karya Anugerah Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

As mentioned in Note 31 to financial statements, previously we have issued the independent auditor's report No.00015/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 dated January 19, 2023, No.00075/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 dated February 24, 2023, No.00223/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 dated March 27, 2023 and No.00588/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2023 dated April 18, 2023 on the financial statements of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk for the ten-month period ended October 31, 2022. In relation with the plan of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk to conduct Initial Public Offering, PT Maxindo Karya Anugerah Tbk reissued its financial statements for ten-month period ended October 31, 2022 with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 5

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Page 5

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Halaman 6

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

The original report included herein is in Indonesian language.


Page 6

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN


Juninho Widjaja, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1029
12 Mei 2023/May 12, 2023

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Oktober 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at October 31, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Disajikan kembali, Catatan 29/As restated, Note 29 31 Desember/December 31,				
		31 Oktober/ October 31, 2022	2021	2020	2019	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2,4,24	6.026.605.530	4.676.042.551	1.367.710.829	1.367.597.777	Cash and cash equivalents
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak ketiga - neto	2,5,24	23.550.289.953	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433	third parties - net
Piutang lain-lain	2,24	494.793.201	365.946.168	76.717.503	110.001.499	Other receivables
Persediaan	2,6	8.172.898.635	7.561.293.636	11.087.561.212	10.615.689.553	Inventories
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	2,12	8.497.141.017	8.448.091.188	12.278.765.174	12.749.364.701	Prepaid Value Added Taxes
Beban dibayar di muka	2,7	9.801.897	253.974.673	209.031.077	200.223.627	Prepaid expenses
Uang muka	2,7	1.327.815.708	1.489.414.695	3.315.392.942	3.655.854.494	Advances
Beban ditangguhkan	2	550.000.000	-	-	-	Deferred charges
Total Aset Lancar		<u>48.629.345.941</u>	<u>39.905.437.265</u>	<u>39.416.531.947</u>	<u>39.516.502.084</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	2,8,13,14,20,21	111.173.315.233	108.703.544.950	108.104.778.077	109.231.104.510	Property, plant and equipment - net
Aset pajak tangguhan	2,12	1.240.482.821	1.178.293.679	1.587.438.555	1.412.875.887	Deferred tax assets
Tagihan restitusi pajak penghasilan	2,12	1.644.933.388	-	-	-	Claim for tax refund
Total Aset Tidak Lancar		<u>114.058.731.442</u>	<u>109.881.838.629</u>	<u>109.692.216.632</u>	<u>110.643.980.397</u>	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		<u>162.688.077.383</u>	<u>149.787.275.894</u>	<u>149.108.748.579</u>	<u>150.160.482.481</u>	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Oktober 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at October 31, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Disajikan kembali, Catatan 29/As restated, Note 29 31 Desember/December 31,				
		31 Oktober 2022/ October 31, 2022	2021	2020	2019	
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS						CURRENT
JANGKA PENDEK						LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2, 13,14,24	-	2.142.051.698	8.870.207.957	19.596.054.867	Short-term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	2,10,24	3.139.595.309	3.778.081.561	4.748.668.575	5.698.788.990	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2,11,24	668.819.380	629.949.427	266.326.470	28.867.146.469	Other payables - third parties
Beban akrual	2,24	1.068.941.104	623.661.737	10.139.704	474.152.624	Accrued expenses
Utang pajak	2,12	131.671.677	1.399.891.973	339.187.078	577.494.192	Taxes payable
Uang muka pelanggan	2	27.387.500	13.239.501	13.087.334	11.971.689	Advance from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	2					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	8,24	9.537.968.819	3.076.949.911	3.655.904.917	2.464.719.482	Bank loans
Liabilitas sewa	15	391.814.104	-	-	-	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	16	54.798.168	52.133.236	42.918.118	221.619.683	Consumer financing payables
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>15.020.996.061</u>	<u>11.715.959.044</u>	<u>17.946.440.153</u>	<u>57.911.947.996</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	2					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	8,24	33.408.470.694	41.966.181.240	44.887.464.074	15.497.941.925	Bank loans
Liabilitas sewa	15	429.633.626	-	-	-	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	16	63.183.487	109.074.764	-	42.918.118	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17,21	5.299.766.951	5.355.880.360	7.215.629.798	5.651.503.546	Long-term employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka panjang		<u>39.201.054.758</u>	<u>47.431.136.364</u>	<u>52.103.093.872</u>	<u>21.192.363.589</u>	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		<u>54.222.050.819</u>	<u>59.147.095.408</u>	<u>70.049.534.025</u>	<u>79.104.311.585</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Oktober 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at October 31, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Disajikan kembali, Catatan 29/As restated, Note 29 31 Desember/December 31,				EQUITY
		31 Oktober 2022/ October 31, 2022	2021	2020	2019	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham pada 31 Oktober 2022, Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Share capital - par value Rp10 per share as at October 31, 2022, Rp100,000 per share as at December 31, 2021, 2020 and 2019
Modal dasar - 36.500.000.000 saham pada 31 Oktober 2022, 450.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Authorized capital - 36,500,000,000 shares as at October 31, 2022, 450,000 shares as at December 31, 2021, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.160.000.000 saham pada 31 Oktober 2022 dan 450.000 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	18	91.600.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	Issued and fully paid capital - 9,160,000,000 shares as at October 31, 2022, and 450,000 shares as at December 31, 2021 and 2019
Tambahan modal disetor	18	88.513.500	88.513.500	88.513.500	88.513.500	Additional paid-in capital
Saldo laba						Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	18	9.000.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		7.777.513.064	45.551.666.986	33.970.701.054	25.967.657.396	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		162.688.077.383	149.787.275.894	149.108.748.579	150.160.482.481	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Periode Sepuluh Bulan
 yang Berakhir pada Tanggal
 31 Oktober 2022 dan Tahun-Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
 Serta untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For The Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022 and Years Ended
 December 31, 2021, 2020, and 2019
 and for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Disajikan kembali, Catatan 29/As restated, Note 29					
		31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
		2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
PENJUALAN NETO	2,19	91.623.399.769	129.111.490.531	149.345.740.363	115.591.435.877	124.464.667.356	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,6, 8,20	69.808.172.590	92.972.803.970	109.322.829.623	77.867.869.388	87.213.112.062	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		21.815.227.179	36.138.686.561	40.022.910.740	37.723.566.489	37.251.555.294	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2,8, 17,21	19.192.173.268	19.540.362.229	23.288.928.400	20.502.546.169	16.624.878.550	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		2.623.053.911	16.598.324.332	16.733.982.340	17.221.020.320	20.626.676.744	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2						OTHER INCOME (EXPENSES)
Kerugian selisih kurs - neto		815.546.966	(874.161.818)	(1.072.473.008)	(1.096.765.628)	(1.077.102.076)	Loss on foreign exchange rates - net
Penghasilan keuangan	9c	775.710.233	49.670.739	76.999.665	8.358.574	6.465.478	Finance income
Keuntungan penjualan aset tetap	8	285.883.166	-	-	118.000.000	-	Gain on sales of property, plant and equipment
Beban keuangan	13,14	(3.059.238.263)	(3.233.422.507)	(3.785.700.123)	(5.204.322.591)	(3.129.846.013)	Finance expenses
Provisi kerugian kredit ekspektasian	5	(329.898.831)	-	-	-	-	Provision for expected credit loss
Perubahan program manfaat karyawan	17	-	1.495.987.535	1.795.185.042	-	-	Employee benefits plan amendment
Beban lain-lain - neto		(414.541.008)	(29.646.092)	(103.158.235)	(638.802.091)	(274.613.986)	Other expenses - net
Beban lain-lain - neto		(1.926.537.737)	(2.591.572.143)	(3.089.146.659)	(6.813.531.736)	(4.475.096.597)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		696.516.174	14.006.752.189	13.644.835.681	10.407.488.584	16.151.580.147	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2,12						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini		(442.653.860)	(2.971.257.080)	(2.850.877.920)	(2.539.001.300)	(3.971.873.250)	Current
Tangguhan		262.343.959	(121.659.338)	(145.991.206)	165.761.284	(81.497.889)	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	2,12	(180.309.901)	(3.092.916.418)	(2.996.869.126)	(2.373.240.016)	(4.053.371.139)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008	NET INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Periode Sepuluh Bulan
 yang Berakhir pada Tanggal
 31 Oktober 2022 dan Tahun-Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
 Serta untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For The Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022 And Years Ended
 December 31, 2021, 2020, and 2019
 and for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Oktober/October 31, 2021		Disajikan kembali, Catatan 29/As restated, Note 29 31 Desember/December 31,			
		2022	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:							<i>Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2,17	909.794.622	996.794.206	1.196.153.047	(40.006.295)	527.670.050	<i>Remeasurement of employee benefits liabilities</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	2,12	(200.154.817)	(219.294.725)	(263.153.670)	8.801.385	(131.917.513)	<i>Related income tax benefit (expense)</i>
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		709.639.805	777.499.481	932.999.377	(31.204.910)	395.752.537	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		1.225.846.078	11.691.335.252	11.580.965.932	8.003.043.658	12.493.961.545	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM Dasar	2,22	0,07	2,43	2,37	1,79	2,99	EARNINGS PER SHARE Basic

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2022 dan
 Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
 Serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Ten-Month Period Ended October 31, 2022 and
 Years Ended December 31, 2021, 2020, and 2019
 and For the Ten-Month Period Ended October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Surplus Revaluasi Aset/ Asset Revaluation Surplus	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo tanggal 1 Januari 2019 /31 Desember 2018 (Sebelum disajikan kembali)		40.000.000.000	(3.084.853.411)	10.225.253.296	12.824.375.890	59.964.775.775	Balance as at January 1, 2019 /December 31, 2018 (Before restatement)
Efek penyajian kembali	28	-	3.173.366.911	(10.225.253.296)	649.319.961	(6.402.566.424)	Restatement effect
Saldo tanggal 1 Januari 2019 /31 Desember 2018 (Setelah disajikan kembali)		40.000.000.000	88.513.500	-	13.473.695.851	53.562.209.351	Balance as at January 1, 2019 /December 31, 2018 (After restatement)
Penerbitan saham baru		5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Issuance of new shares
Laba netto tahun berjalan		-	-	-	12.098.209.008	12.098.209.008	Net income for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:							Other comprehensive income (loss):
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17	-	-	-	527.670.050	527.670.050	Remeasurement of long-term employee benefits liabilities
Manfaat pajak penghasilan terkait	2,12	-	-	-	(131.917.513)	(131.917.513)	Related income tax benefit
Saldo 31 Desember 2019		45.000.000.000	88.513.500	-	25.967.657.396	71.056.170.896	Balance as at December 31, 2019
Laba netto tahun berjalan		-	-	-	8.034.248.568	8.034.248.568	Net income for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:							Other comprehensive income (loss):
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17	-	-	-	(40.006.295)	(40.006.295)	Remeasurement of long-term employee benefits liabilities
Manfaat pajak penghasilan terkait	2,12	-	-	-	8.801.385	8.801.385	Related income tax benefit
Saldo 31 Desember 2020		45.000.000.000	88.513.500	-	33.970.701.054	79.059.214.554	Balance as at December 31, 2020

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2022 dan
 Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
 Serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Ten-Month Period Ended October 31, 2022 and
 Years Ended December 31, 2021, 2020, and 2019
 and For Ten-Month Period Ended October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 31 Desember 2020		45.000.000.000	88.513.500	33.970.701.054	79.059.214.554	Balance as at December 31, 2020
Laba neto periode berjalan		-	-	10.913.835.771	10.913.835.771	Net income for the period
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:						Other comprehensive income (loss):
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17	-	-	996.794.206	996.794.206	Remeasurement of long-term employee benefits liabilities
Beban pajak penghasilan terkait	2,12	-	-	(219.294.725)	(219.294.725)	Related income tax expenses
Saldo 31 Oktober 2021 (tidak diaudit)		45.000.000.000	88.513.500	45.662.036.306	90.750.549.806	Balance as at October 31, 2021 (unaudited)
Rugi neto periode berjalan		-	-	(265.869.216)	(265.869.216)	Net loss for the period
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:						Other comprehensive income (loss):
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17	-	-	199.358.841	199.358.841	Remeasurement of long-term employee benefits liabilities
Beban pajak penghasilan terkait	2,12	-	-	(43.858.945)	(43.858.945)	Related income tax expenses
Saldo 31 Desember 2021		45.000.000.000	88.513.500	45.551.666.986	90.640.180.486	Balance as at December 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2022 dan
 Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
 Serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Ten-Month Period Ended October 31, 2022 and
 Years Ended December 31, 2021, 2020, and 2019
 and For Ten-Month Period Ended October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings		Total Ekuitas/ Total Equity	
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 31 Desember 2021		45.000.000.000	88.513.500	-	45.551.666.986	90.640.180.486	Balance as at December 31, 2021
Cadangan umum	18	-	-	9.000.000.000	(9.000.000.000)	-	Appropriation of retained earnings
Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui kapitalisasi saldo laba	18	30.000.000.000	-	-	(30.000.000.000)	-	Additional issued and fully paid capital through capitalization of retained earnings
Penerbitan saham baru	18	16.600.000.000	-	-	-	16.600.000.000	Issuance of new shares
Laba neto periode berjalan		-	-	-	516.206.273	516.206.273	Net income for the period
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:							Other comprehensive income (loss):
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2,17	-	-	-	909.794.622	909.794.622	Remeasurement of long-term employee benefits liabilities
Manfaat pajak penghasilan terkait	2,12	-	-	-	(200.154.817)	(200.154.817)	Related income tax benefit
Saldo 31 Oktober 2022		91.600.000.000	88.513.500	9.000.000.000	7.777.513.064	108.466.026.564	Balance as at October 31, 2022

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein
are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Sepuluh Bulan
yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2022 dan Tahun-Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Ten-Month Period Ended
October 31, 2022 And Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
and For Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Oktober/October 31, 2021		31 Desember/December 31,			
	2022	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	85.197.932.168	125.720.348.127	143.316.419.220	115.327.853.103	133.277.252.124	Receipts from customers
Penerimaan dari penghasilan keuangan	775.710.233	49.670.739	76.999.665	8.358.574	6.465.478	Receipts from finance income
Pembayaran kepada: Pemasok	(51.515.703.153)	(69.973.883.534)	(81.611.657.767)	(57.084.833.526)	(66.057.447.409)	Payment to: Suppliers
Karyawan	(27.154.640.615)	(27.438.563.316)	(32.400.372.501)	(27.043.983.257)	(26.233.386.497)	Employees
Penerimaan dari (pembayaran untuk) pajak	(3.204.702.556)	3.116.887.364	(1.527.019.355)	(2.315.510.271)	(11.903.100.751)	Receipt from (payment of) taxes
Pembayaran beban keuangan	(3.059.238.263)	(3.187.979.262)	(3.786.090.211)	(5.880.380.991)	(3.432.737.066)	Payment of finance expenses
Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasional lainnya	(6.523.634.207)	(7.891.698.040)	(4.818.585.377)	(39.338.455.382)	(7.769.415.812)	Receipts from (payment for) others operating activities
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(5.484.276.393)	20.394.782.078	19.249.693.674	(16.326.951.750)	17.887.630.067	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8 900.000.000	-	-	118.000.000	-	Proceeds from sales of property, plant and equipment
Perolehan aset tetap	8 (5.440.421.985)	(4.405.268.652)	(5.315.034.742)	(3.386.212.553)	(26.508.619.386)	Acquisition of property, plant and equipment
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	7 (491.364.092)	(252.945.455)	(349.982.992)	(37.963.637)	(340.979.465)	Additions of advance for purchase of property, plant and equipment
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5.031.786.077)	(4.658.214.107)	(5.665.017.734)	(3.306.176.190)	(26.849.598.851)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Sepuluh Bulan
yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2022 dan Tahun-Tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Serta Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Ten-Month Period Ended
October 31, 2022 And Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
and For Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Oktober/October 31, 2021		31 Desember/December 31,			
		2022	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI							CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS							FINANCING
PENDANAAN							ACTIVITIES
Penambahan modal	18	16.600.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Additional capital
Pembayaran utang bank	14	(2.096.691.637)	(2.550.007.121)	(3.500.237.841)	(19.365.692.416)	(2.278.879.539)	Payment of long-term
jangka panjang							bank loans
Pembayaran bagian							Payments of principal
pokok							portion of lease
liabilitas sewa	15	(451.404.871)	-	-	-	-	liabilities
Pembayaran bagian							Payments of principal
pokok utang							portion of consumer
pembiayaan							financing payables
konsumen	16	(43.226.345)	(42.918.118)	(47.950.118)	(221.619.683)	(479.687.199)	
Penerimaan dari							Proceeds from
utang bank jangka							long-term bank loans
panjang	14	-	-	-	49.946.400.000	-	
Arus Kas Neto yang							Net Cash Provided by
Diperoleh dari							(Used in) Financing
(Digunakan untuk)							Activities
Aktivitas							
Pendanaan		14.008.677.147	(2.592.925.239)	(3.548.187.959)	30.359.087.901	2.241.433.262	
KENAIKAN							NET INCREASE
(PENURUNAN)							(DECREASE)
NETO KAS DAN							IN CASH AND
SETARA KAS		3.492.614.677	13.143.642.732	10.036.487.981	10.725.959.961	(6.720.535.522)	CASH
							EQUIVALENTS
KAS, SETARA							CASH, CASH
KAS DAN							EQUIVALENTS
CERUKAN PADA							AND OVERDRAFT
AWAL PERIODE/		2.533.990.853	(7.502.497.128)	(7.502.497.128)	(18.228.457.089)	(11.507.921.567)	AT BEGINNING OF
TAHUN							THE PERIOD/YEAR
KAS, SETARA							CASH, CASH
KAS DAN							EQUIVALENTS
CERUKAN PADA							AND OVERDRAFT
AKHIR PERIODE/		6.026.605.530	5.641.145.604	2.533.990.853	(7.502.497.128)	(18.228.457.089)	AT END OF THE
TAHUN							PERIOD/YEAR
Kas, setara kas dan							Cash, cash
cerukan terdiri dari:							equivalents and
Kas dan setara kas	4	6.026.605.530	5.641.145.604	4.676.042.551	1.367.710.829	1.367.597.777	overdraft consists of:
Cerukan	13	-	-	(2.142.051.698)	(8.870.207.957)	(19.596.054.866)	Cash and cash
							equivalents
							Overdraft
Total		6.026.605.530	5.641.145.604	2.533.990.853	(7.502.497.128)	(18.228.457.089)	Total

Pengungkapan tambahan laporan arus kas disajikan pada Catatan 26.

Supplementary information for cash flows is presented in Note 26.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 11 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 tanggal 1 Agustus 2002. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 51 yang dibuat di hadapan Ratna Ramli, S.H., M.Kn., tanggal 24 Juni 2022 yaitu mengenai penambahan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perusahaan. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0028557 tanggal 1 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri makanan lainnya. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002.

Perusahaan berdomisili di Bogor dengan alamat di Jl. Olympic Raya B-11, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Entitas induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Karya Nusa Perdana, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) adalah Carolina Renata Djaja.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Ir. Wong Budi Setiawan
Candra Gunawan

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Sarkoro Handajani
Garret Suryowijoyo Kartono
Carolina Renata Djaja

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Ir. Wong Budi Setiawan
Carolina Renata Djaja

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Sarkoro Handajani
Garret Suryowijoyo Kartono
Bun Toro

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki 187, 191, 166 dan 144 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 26 of Dwi Swandiani, S.H., dated July 11, 2002. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-14335 HT.01.01.TH.2002 dated August 1, 2002. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 51 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., dated June 24, 2022 concerning the increase of the Company's authorized, issued and fully paid capital. This amendment of Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0028557 dated July 1, 2022.

According to Article 3 of the Company's Article of Association, the Company's scopes of activities are to engage in miscellaneous food industry. The Company started its commercial operations in 2002.

The Company is domiciled at Jl. Olympic Raya B-11, Sentul, Bogor, West Java.

The Company's immediate and ultimate parent Company is PT Karya Nusa Perdana, which is established and domiciled in Indonesia. Ultimate beneficial owner is Carolina Renata Djaja.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

As at October 31, 2022, the composition of the Company's Board of Commissioner and Directors, are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director
Director

As at December 31, 2021, 2020 and 2019, the composition of the Company's Board of Commissioner and Directors, are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director
Director

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has 187, 191, 166 and 144 permanent employees, respectively (unaudited).

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 12 Mei 2023. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan PSAK 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa pos pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

1. GENERAL (continued)

c. Completion of the Financial Statements

These financial statements are completed and authorized for issuance by the Company's Directors on May 12, 2023. The Company's Directors who signed the Directors' Statement is responsible for the fair preparation and presentation of these financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk have been prepared and presented in accordance with financial accounting standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and the Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants (DSAS-IAI) and regulations of Capital Market Regulators for entities under its control.

Financial Statements are prepared based on PSAK 1 (2015), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2022.

The financial statements, except for statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Penerapan dari interpretasi standar baru dan standar revisi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Biaya untuk memenuhi kontrak sendiri terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang lebih lanjut terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

- Penyesuaian Tahunan 2020

Penyesuaian ini terdiri dari:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

The implementation of the interpretation of the new standard and the revised standards which is effective as at January 1, 2022 which is relevant to the Company's operations but does not result in significant changes to the Company's accounting policies are as follows:

- Amendment of PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets" on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling Contracts.

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract to determine whether a contract is an onerous contract. The cost of fulfilling contracts itself consists of costs directly related to the contract, which further consists of the incremental costs to fulfill the contract and the allocation of other costs directly related to fulfilling the contract.

- 2020 Annual Improvements

These improvements consist of:

- PSAK 71, "Financial Instruments"

PSAK 71 (2020 Annual Improvements) clarifies *fee* recognized by the borrower in relation to derecognition of financial liabilities. In determining the *fee* to be paid after deducting the *fee* received, entity includes only fees paid or received between the entity (the borrower) and the lender, including fees paid or received by either the entity or the lender on the other's behalf.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2020

Penyesuaian ini terdiri dari:

- PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian biaya properti sewaan dari pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan terkait perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena bagaimana insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

c. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan, atau
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year (continued)

- 2020 Annual Improvements

These improvements consist of:

- PSAK 73, "Leases"

PSAK 73 (2020 Annual Improvements) removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

c. Current and Non-current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading, or
- expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- expected to be settled in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak, dan Entitas Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada Entitas Induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of the parent of the Company.
- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the Company.
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a.
 - (vii) a person identified in a (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of the parent of the entity).
 - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan". PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Amendemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perubahan pada kebijakan akuntansi dan penyesuaian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan klasifikasi dan pengukuran, dan penurunan aset keuangan telah diubah untuk mematuhi standar ini, PSAK 71 efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dan Perusahaan mengadopsi PSAK 71 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dalam metode ini, angka komparatif tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari adopsi standar diakui dalam laba ditahan sebagai penyesuaian pada tanggal 1 Januari 2020.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020.

Instrumen utang Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan.

Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments

The Company applied PSAK 71, "Financial Instruments". PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

The amendments require debt instruments to be measured either at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI) or fair value through profit or loss (FVTPL). Classification of debt instruments, depends on the entity's business model for managing the financial assets and whether the contractual cash flows represent solely payments of principal and interest (SPPI).

The adoption of PSAK 71 resulted in changes to the accounting policies and adjustment to the financial statements. The accounting policies that relate to the classification and measurement, and impairment of financial assets, are amended to comply with this standard. PSAK 71 is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2020, and the Company adopted PSAK 71 using the modified retrospective method. Under this method, comparative figures are not restated and the financial impact of the adoption of the standard is recognized in retained earnings as adjustment on January 1, 2020.

The assessment of the business model and whether the financial assets meet the SPPI requirements was made as at January 1, 2020, and then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognized before January 1, 2020.

The Company's debt instruments have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest. The Company holds its current financial assets to collect contractual cash flows, and accordingly measured at amortized cost when it applies PSAK 71.

PSAK 71 requires all equity instruments to be carried at FVTPL, unless an entity chooses on initial recognition, to present fair value changes in other comprehensive income.

PSAK 71 requires the Company to record expected credit losses (ECL) on all of its financial assets measured at amortized cost or FVOCI and financial guarantees.

The Company previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks ketentuan untuk menilai ECL pada semua piutang dagang. Perusahaan telah menilai dan menyimpulkan bahwa risiko gagal bayar adalah tidak material untuk piutang usaha yang jatuh tempo dari pihak ketiga, oleh karena itu, manajemen menyimpulkan tidak ada ECL yang disediakan.

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Mulai 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui FVOCI dan FVTPL.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Upon adoption of PSAK 71, the Company applies the simplified approach using provision matrix to assess the ECL on all trade receivables. The Company has assessed and concluded that the risk of default is low or remote for the trade receivables due from third parties, hence, management has concluded no ECL is provided.

Based on the assessment of the Company's business model as at the date of initial application, January 1, 2020, cash and cash equivalents, trade receivables - third parties and other receivables which are previously classified as loans and receivables are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest are now classified and measured as financial instruments at amortized cost. The change of the classification of the Company's financial assets do not result in changes in their measurement.

The Company has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in the classification and measurement for the Company's financial liabilities.

Classification

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

From January 1, 2020

(i) Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, FVOCI and FVTPL.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables - third parties and other receivables classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, utang bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal, dan jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari dari kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, utang bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

From January 1, 2020 (continued)

(ii) Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities consist short-term bank loan, trade payables - third parties, other payables - third parties, bank loans, lease liabilities and consumer financing payables classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Before January 1, 2020

(i) Financial Assets

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity investments, or available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition, and where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Company's financial assets consist cash and cash equivalents, trade receivables - third parties and other receivables as loans and receivables.

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company's financial liabilities consist of consist short-term bank loan, trade payables - third parties, other payables third parties, bank loans, lease liabilities and consumer financing payables classified as financial liabilities measured at amortized cost.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

Mulai 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *SPPI testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran aset keuangan bergantung pada klasifikasinya, sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement

From January 1, 2020

(i) Financial Assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the *SPPI testing* and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

The measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Aset Keuangan (lanjutan)

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi dan PKL hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

(i) Financial Assets (continued)

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at amortized cost

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in profit or loss.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

(i) Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Before January 1, 2020

(i) Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

(ii) Financial Liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost, subsequent after the initial recognition are measured at amortized cost, using the effective interest rate unless the discount effect is not material, then it is stated at cost.

Interest expense is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities is derecognized and through the amortization process.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Mulai 1 Januari 2020

Perusahaan mengakui cadangan untuk ECL untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Sebelum 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables are written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Before January 1, 2020

The Company assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses have occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kasa masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan setelah periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Financial assets carried at amortized cost

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

(i) Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau mentransfer pengendalian atas aset, atau
- (b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition

(i) Financial Assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- (b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement and have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. Transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in other comprehensive income is recognized to profit or loss.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatan, yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya dan memiliki risiko tidak signifikan terhadap perubahan nilai.

g. Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

h. Persediaan

Perusahaan menerapkan PSAK 14, "Persediaan."

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya untuk memproses sampai dengan persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan atau dijual, dicatat sebagai berikut:

Bahan baku: Biaya pembelian dengan metode rata-rata.

Barang jadi dan barang dalam proses: Biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja dan proporsi biaya overhead manufaktur berdasarkan kapasitas operasi normal, tetapi tidak termasuk biaya pinjaman.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

(ii) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprise of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity period of three months or less from the time of placement, which are neither pledged as collateral nor restricted for use and are subject to an insignificant risk of changes in value.

g. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

Advances are presented as part of current assets in the statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

h. Inventories

The Company adopted Amendments to PSAK 14, "Inventories".

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

Raw materials: Purchase cost on average basis.

Finished goods and work in process: Cost of direct material and labor and a proportion of manufacturing overhead based on normal operating capacity but excluding borrowing costs.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

i. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap."

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, kecuali untuk tanah yang tidak terdepresiasi. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Instalasi dan prasarana	8	Installation
Kendaraan	8	Vehicles
Mesin	8	Machineries
Peralatan pabrik	4 - 8	Factory equipment
Inventaris kantor	4	Office equipment

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Setelah penerapan PSAK 73, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

i. Property, Plant and Equipment

The Company adopted PSAK 16, "Property and Equipment".

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost is incurred if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Instalasi dan prasarana	8	Installation
Kendaraan	8	Vehicles
Mesin	8	Machineries
Peralatan pabrik	4 - 8	Factory equipment
Inventaris kantor	4	Office equipment

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Upon adoption of PSAK 73, the Company analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Company applies PSAK 16, "Property, plant and equipment".

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal nilai terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Property, Plant and Equipment (continued)

The carrying value of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized. The costs of the construction of property, plant and equipment are capitalized as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Construction in progress are stated at cost. The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

j. Impairment of Non-financial Assets

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in profit or loss as "impairment losses".

In assessing the value in use (VIU), the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 46, "Pajak Penghasilan."

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba rugi, apakah sebagai penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan laporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

k. Income Tax

The Company applied Amendments to PSAK 46, "Tax Income".

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly to equity.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

k. Income Tax (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

I. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Perusahaan menerapkan PSAK 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (Pendekatan Umum) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

m. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa".

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

I. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

The Company applied PSAK 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities".

This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No. 11 year 2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.

PSAK 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (General Approach) or to follow the provisions stated in PSAK 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.

Tax amnesty assets are measured at acquisition cost based on Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP). Tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Company shall recognize the difference between assets and liabilities of tax amnesty as part of additional paid-in capital in equity. This difference shall not be recycled to profit or loss or reclassified to retained earnings subsequently.

Tax amnesty assets and liabilities are presented separately from other assets and liabilities in the statement of financial position.

m. Leases

The Company applied PSAK 73, "Leases".

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

PSAK 73 requires lessees to recognize most leases on balance sheets. The standard includes two recognition exemptions for lessees- leases of 'low value' assets and short-term leases. At commencement date of a lease, a lessee will recognize a liability to make a lease payment (the lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (the right-of-use asset). Lessees will be required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa.

Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan memilih untuk menggunakan transisi cara praktis untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perusahaan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal awal perjanjian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Leases (continued)

The right-of-use asset is initially measured at cost and subsequently measured at cost (subject to certain exceptions) less accumulated depreciation and impairment losses, adjusted for any remeasurement of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at that date. Subsequently, the lease liability is adjusted for interest and lease payment, as well as the impact of lease modifications, amongst others.

Furthermore, the classification of cash flows will also be affected as operating lease payments under PSAK 30 are presented as operating cash flows; whereas under the PSAK 73 model, the lease payments will be split into a principal and an interest portion which will be presented as financing and operating cash flows respectively.

In contrast to lessee accounting, PSAK 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in PSAK 30, and continues to require a lessor to classify a lease either as an operating lease or a finance lease.

The Company adopted PSAK 73 using the modified retrospective method. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application.

The Company elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is, or contains a lease on January 1, 2020. Instead, the Company applied the standard only to contracts that were previously identified as leases applying PSAK 30 at the date of initial application.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal 1 Januari 2020
- penentuan jangka waktu sewa pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa
- ketergantungan pada penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sebelum tanggal penerapan awal

Aset hak guna telah diakui sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan.

Mulai 1 Januari 2020

Sebagai lessee

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah.

Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Leases (continued)

In applying PSAK 73 for the first time, the Company used the following practical expedients permitted by the standard:

- *use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics*
- *recognition of lease liabilities and right-of-use assets not to include leases with lease terms that ends during the current financial year or for leases of low-value assets*
- *exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets on January 1, 2020*
- *determination of lease term on January 1, 2020 using hindsight where the contract contained options to extend or terminate the lease*
- *election by class of underlying asset not to separate non-lease components from lease components*
- *reliance on its assessment of whether leases are onerous immediately before the date of initial application*

Right-of-use assets were recognized and presented as part of "Property, Plant and Equipment" in the statement of financial position.

From January 1, 2020

As lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets.

For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position. The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Bangunan

Tahun/Years

3

Building

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Selain itu, aset hak guna juga disesuaikan dengan pengukuran kembali tanggung jawab sewa tertentu. Aset hak guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Leases (continued)

From January 1, 2020 (continued)

As lessee (continued)

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

In addition, the right-of-use assets are also adjusted for certain remeasurement of lease liability. The right-of-use assets are presented as part of "Property, plant and Equipment" in the statement of financial position.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

n. Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK 24, "Imbalan Kerja"

Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tanggal 25 Maret 2003 pada tahun 2020 dan 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan 2021. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, kenaikan gaji rata-rata per tahun, usia pension normal dan tingkat mortalitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Leases (continued)

Before January 1, 2020

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

n. Employee Benefits

The Company Applied PSAK 24 "Employee Benefits"

Defined benefit plan

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 in 2020 and 2019 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2022 and 2021. Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the *projected-unit-credit* method and applying the assumptions on discount rate, average salary increase per year, normal retirement age and mortality rate.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24, "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, "Employee Benefits". Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

In April 2022, DSAK-IAI issued an explanatory material through press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24, "Employee Benefits" which was adopted from IAS 19, "Employee Benefits". The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan, dengan demikian mengubah kebijakan akuntansi mengenai atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya, sehingga laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 telah disajikan kembali sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

The Company has implemented the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied, and therefore the financial statements of the Company as at December 31, 2021 and 2020 and for the year then ended and the statement of financial position as at December 31, 2019 have been restated as follows:

2021				
	Dilaporkan sebelumnya/ Reported previously	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
Saldo awal	10.292.169.535	(3.076.539.737)	7.215.629.798	<i>Beginning balance</i>
Beban (pendapatan) tahun berjalan	1.550.116.501	(418.527.850)	1.131.588.651	<i>Expense (income) during the year</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(1.453.116.917)	256.963.870	(1.196.153.047)	<i>Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income</i>
Perubahan program manfaat	(2.405.134.713)	609.949.671	(1.795.185.042)	<i>Changes of benefit plan</i>
Saldo akhir tahun	7.984.034.406	(2.628.154.046)	5.355.880.360	Ending balance
2020				
	Dilaporkan sebelumnya/ Reported previously	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
Saldo awal	8.386.329.547	(2.734.826.001)	5.651.503.546	<i>Beginning balance</i>
Beban (pendapatan) tahun berjalan	2.159.133.061	(635.013.104)	1.524.119.957	<i>Expense (income) during the year</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(253.293.073)	293.299.368	40.006.295	<i>Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income</i>
Saldo akhir tahun	10.292.169.535	(3.076.539.737)	7.215.629.798	Ending balance
2019				
	Dilaporkan sebelumnya/ Reported previously	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
Saldo awal	6.505.165.151	-	6.505.165.151	<i>Beginning balance</i>
Beban (pendapatan) tahun berjalan	1.875.827.760	(2.201.819.315)	(325.991.555)	<i>Expense (income) during the year</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	5.336.636	(533.006.686)	(527.670.050)	<i>Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income</i>
Saldo akhir tahun	8.386.329.547	(2.734.826.001)	5.651.503.546	Ending balance

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Standar tersebut mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan saat menerapkan setiap langkah model untuk kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menentukan bagaimana memperhitungkan biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Persyaratan pengungkapan baru berdasarkan PSAK 72 mencakup informasi terpilah tentang pendapatan dan informasi tentang kewajiban kinerja yang tersisa pada tanggal pelaporan.

Standar pendapatan baru dapat diterapkan ke semua entitas dan akan menggantikan semua persyaratan pengakuan pendapatan saat ini berdasarkan PSAK. Baik penerapan retrospektif penuh atau penerapan retrospektif yang dimodifikasi diperlukan untuk periode tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan telah mengadopsi standar tersebut pada tanggal efektifnya, dengan menggunakan metode adopsi retrospektif yang dimodifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

0. Revenue and Expenses Recognition

The Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customer".

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, "Revenue", PSAK 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, PSAK 72 introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- Step 1: Identify the contract(s) with a customer
- Step 2: Identify the performance obligations in the contract
- Step 3: Determine the transaction price
- Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
- Step 5: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation

Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

The standard requires entities to exercise judgment, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with their customers. The standard also specifies how to account for the incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a contract. New disclosure requirements under PSAK 72 include disaggregated information about revenue and information about the performance obligations remaining at the reporting date.

The new revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition requirements under PSAK. Either a full retrospective application or a modified retrospective application is required for annual periods beginning on or after January 1, 2020. The Company has adopted the standard on its effective date, using the modified retrospective method of adoption.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan sebelumnya.

Setelah penerapan PSAK 72, pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam manfaat ekonomi akan diperoleh dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Sebelum penerapan PSAK 72, Perusahaan telah menerapkan PSAK 23 dimana pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar penerimaan atau piutang untuk jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha normal.

Saldo kontrak

Uang muka pelanggan

Uang muka pelanggan diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Perusahaan mengalihkan barang atau jasa terkait. Uang muka pelanggan diakui sebagai pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kontrak tersebut (yaitu, mengalihkan kendali atas barang dan jasa terkait kepada pelanggan).

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan, yaitu pada saat pelanggan membeli barang. Pembayaran harga transaksi jatuh tempo segera pada saat pelanggan membeli barang sesuai dengan persyaratan penjualan yang telah disepakati.

Pendapatan dan beban keuangan

Pendapatan dan beban keuangan dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

p. Beban Ditangguhkan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor setelah proses Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expenses Recognition (continued)

The adoption of PSAK 72 has no material impact on the amounts reported for the previous financial periods.

Upon adoption of PSAK 72, revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Prior to implementation of PSAK 72, the Company has adopted PSAK 23 wherein revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable for the services rendered in the ordinary course of business.

Contract balances

Advance from customers

Advance from customers is recognized if a payment is received or a payment is due (whichever is earlier) from a customer before the Company transfers the related goods or services. Advance from customers are recognized as revenue when the Company performs under the contract (i.e., transfers control of the related goods or services to the customer).

Sale of goods

Revenue from sales arising from physical delivery of the Company's products is recognized when control of the goods has transferred, being at the point the customer purchases the goods. Payment of the transaction price is due immediately at the point the customer purchases the goods in accordance with the terms of the sale.

Finance income and expenses

Finance income and expense for all financial instruments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on accrual basis using the effective interest rate method.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

p. Deferred Charges

Expenses incurred in connection with the Company's plans to conduct Initial Public Offering were deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital account after the Initial Public Offering is conducted.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus bisa diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

q. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *in the principal market for the asset or liability; or*
2. *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that significant to fair value measurement as a whole:

1. *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
2. *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
3. *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

r. Laba per Saham

Jumlah laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Oktober 2022 dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

s. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

t. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

q. Fair Value Measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing the total income for the period by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as at October 31, 2022, accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

s. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

t. Foreign Currency Transactions and Balances

The accounting record of the Company is maintained in Rupiah. Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted using the Bank Indonesia's middle rates of exchange prevailing at that date. Foreign exchange gains and losses arising from foreign currency transactions and the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies into Rupiah are charged to profit or loss.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 2019, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut, yang dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal tersebut:

	31 Oktober, 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31				
		2021	2020	2019		
1 Dolar Amerika Serikat	15.542	14.269	14.105	13.901	1 United States Dollar	
1 Dolar Australia	9.980	10.344	10.771	9.739	1 Australian Dollar	
1 Dolar Singapura	11.006	10.534	10.644	10.321	1 Singapore Dollar	

u. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan.

v. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal penyelesaian liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

As at October 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 2019, the exchange rates used are as follows, which are calculated based on the average buying and selling rates of the exchange rates of Bank Indonesia transactions on that date:

u. Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Company's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

v. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

Effective beginning on or after January 1, 2023

- Amendment of PSAK 1, "Presentation of Financial Statement" Classification of a Liability as Current or Non-Current

The narrow-scope amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (e.g the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the settlement of a liability.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

v. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi
Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan
(lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023
(lanjutan)

- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" Tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

v. Standards, Amendments/Improvements and
Interpretations to Standards Issued not yet Adopted
(continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023
(continued)

- Amendment of PSAK 16, "Property, Plant and Equipment" Regarding Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit an entity from deducting from the cost of a property, plant and equipment the proceeds received from selling items produced by the property, plant and equipment before it is ready for its intended use. The sales proceeds would have met the revenue definition and therefore should be recognized in profit or loss.

- Amendment of PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" Definition of Accounting Estimates

The amendment introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

- Amendment of PSAK 1, "Presentation of Financial Statement" - Disclosure of accounting policies

This amendment provides guidance and examples to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

- Amendment of PSAK 46, "Income Taxes" - Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The Company is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Company's financial statements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 29.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (mulai 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 29.

Classification of Financial Instruments

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71 (from January 1, 2020) and PSAK 55 (before January 1, 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2.

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of goods sold. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Rupiah.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis.

Penilaian mencakup semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki sesuai dan jika tidak sesuai apakah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Perusahaan cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian di atas akan ditelaah kembali.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed to achieve a business objective.

This assessment includes all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company monitors financial assets measured at amortized cost that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate, whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Determining the Lease Term of Contracts with Renewal and Termination Options - Company as Lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Company is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan berdasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 24.

Penyisihan untuk ECL di Piutang Usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha dan kontrak aset. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat *default* yang diamati secara historis Perusahaan. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default*, maka tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisa.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili *default* aktual pelanggan di masa depan. Jumlah tercatat piutang usaha sebelum penyisihan diungkapkan dalam Catatan 5.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Valuation of Financial Instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's profit or loss. The fair value of financial assets and liabilities are set out in Note 24.

Allowance for ECLs on Trade Receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The carrying amounts of trade receivables before allowance are disclosed in Note 5.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 8.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi potensi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 4 to 20 years. The useful life of each item of the Company's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets. The carrying values of property, plant and equipment are disclosed in Note 8.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or cash generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan utang dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun, dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat tentang liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan dalam Catatan 17.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Estimasi Bunga Pinjaman Inkremental untuk Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental (IBR) untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Company's obligations and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the periods which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of long-term employee benefits liabilities are disclosed in Note 17.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 12.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 12.

Estimating the Incremental Borrowing Rate for Leases

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Company 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates).

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Kas	332.350.201	313.559.998	70.494.218	19.853.263	Cash on hand
Bank					Cash in banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	2.600.091.825	1.600.000	1.060.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	490.124.995	12.089.198	-	17.167.900	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	57.113.400	61.618.886	5.022.979	12.903.035	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	2.343.099.331	3.373.616.612	17.181.172	1.251.134.132	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	141.318.899	346.516.059	122.085.068	-	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	16.041.520	15.441.066	16.468.587	17.132.995	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	14.078.676	11.003.260	13.536.728	12.708.237	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.580.662	10.012.348	11.139.040	11.791.445	PT Bank Central Asia Tbk
<u>Dolar Australia</u>					<u>Australian Dollar</u>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	13.756.583	20.481.486	1.099.296.853	13.757.494	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.049.438	10.103.638	11.426.184	11.149.276	PT Bank Central Asia Tbk
Subtotal bank	5.694.255.329	3.862.482.553	1.297.216.611	1.347.744.514	Subtotal cash in banks
Deposito berjangka					Time deposit
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT BPR Akasia Mas	-	500.000.000	-	-	PT BPR Akasia Mas
Total kas dan setara kas	6.026.605.530	4.676.042.551	1.367.710.829	1.367.597.777	Total cash and cash equivalents

Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah 6,00% pada tahun 2021.

The annual interest rates of time deposit is 6.00% in 2021.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents balances that are restricted in use or placed in related parties.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - NETO

Terdiri dari:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	2019
Wai Lana Productions LLC, Amerika Serikat	16.523.753.637	4.165.056.955	2.095.408.690	161.841.119
The Vege Chip Company Pty Ltd, Australia	4.686.845.794	6.737.873.860	4.460.321.930	4.967.934.436
Intersnack Nederland BV, Belanda	1.281.375.732	596.829.881	584.549.698	1.645.657.168
Baland International BV, Belanda	486.222.145	2.873.322.006	-	417.322.221
Jans Enterprises, Amerika Serikat	234.995.040	981.707.888	2.589.245.825	2.456.754.411
PT Setia Kawan Indonesia	-	711.439.955	711.439.955	711.439.955
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	666.996.436	1.044.443.809	640.387.112	456.821.123
Subtotal	23.880.188.784	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433
Provisi kerugian kredit ekspektasian	(329.898.831)	-	-	-
Total piutang usaha - pihak ketiga - neto	23.550.289.953	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES - NET

Consists of:

Wai Lana
Productions LLC,
United States
The Vege Chip
Company Pty Ltd,
Australia
Intersnack Nederland
BV, Netherlands
Baland International BV,
Netherlands
Jans Enterprises,
United States
PT Setia Kawan
Indonesia
Others (each below
Rp500 millions)
Subtotal
Provision for expected
credit losses
**Total trade receivables
third parties - net**

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah
sebagai berikut:

The details of trade receivables based on aging are as
follows:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	2019
Belum jatuh tempo	8.575.714.462	8.524.399.635	6.173.822.167	7.103.902.098
Telah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	3.251.025.826	3.866.764.853	1.149.073.676	1.039.064.633
31 - 60 hari	3.468.153.738	678.979.426	475.451.201	1.674.760.044
61 - 90 hari	2.165.312.148	931.784.617	2.098.389.925	206.765.705
Lebih dari 90 hari	6.419.982.610	3.108.745.823	1.184.616.241	793.277.953
Provisi kerugian kredit ekspektasian	(329.898.831)	-	-	-
Total piutang usaha - pihak ketiga - neto	23.550.289.953	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433

Not yet due
Past due:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
Over 90 days
Provision for expected
credit losses
**Total trade receivables
third parties - net**

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah
sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as
follows:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	2019
Rupiah	187.046.000	711.440.956	718.121.296	731.921.153
Dolar Amerika Serikat	18.803.785.529	9.340.607.242	5.572.804.821	4.776.804.066
Dolar Australia	4.686.848.143	6.737.872.859	4.460.321.930	4.967.934.436
Dolar Singapura	202.509.112	320.753.297	330.105.163	341.110.778
Provisi kerugian kredit ekspektasian	(329.898.831)	-	-	-
Total piutang usaha - pihak ketiga - neto	23.550.289.953	17.110.674.354	11.081.353.210	10.817.770.433

Rupiah
US Dollar
Australian Dollar
Singapore Dollar
Provision for expected
credit losses
**Total trade receivables
third parties - net**

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - NETO (lanjutan)

Mutasi penyisihan atas ECLs piutang usaha milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Provisi tahun berjalan	329.898.831	-	-	-	Provision during the year
Total	329.898.831	-	-	-	Total

Pada tanggal 31 Oktober 2022, manajemen berpendapat bahwa provisi kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Movements in the Company's allowance for ECLs on trade receivables are as follows:

As at October 31, 2022, management believes that the provision for expected credit losses is adequate to cover losses on uncollectible trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat penyisihan atas ECL.

As at December 31, 2021, 2020 and 2019, management believes that all trade receivables are collectible, therefore no allowance for ECLs was provided.

6. PERSEDIAAN

Terdiri dari:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Bahan baku	6.973.974.791	6.235.670.066	9.687.128.661	9.632.244.985	Raw materials
Barang jadi	1.001.968.658	1.285.185.005	1.357.873.538	710.533.153	Finished goods
Barang dalam proses	196.955.186	40.438.565	42.559.013	272.911.415	Work-in-process
Total persediaan	8.172.898.635	7.561.293.636	11.087.561.212	10.615.689.553	Total inventories

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai untuk persediaan sehingga tidak diperlukan membentuk penyisihan penurunan nilai pasar dan persediaan usang.

6. INVENTORIES

Consists of:

The management of the Company believes that there is no indication of impairment in the value of inventories, therefore there is no need to establish allowance for decline in market values and obsolescence of inventories.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan karena sebagian besar persediaan merupakan barang yang pergerakannya cepat.

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company did not insure its inventories since most of them are fast-moving goods.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Terdiri dari:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Beban dibayar di muka					Prepaid expenses
Sewa	-	216.416.668	176.666.668	166.666.667	Rent
Asuransi	9.801.897	37.558.005	32.364.409	33.556.960	Insurance
Uang muka					Advances
Pembelian aset tetap	692.872.230	290.909.092	37.963.637	340.979.465	Purchases of property, plant and equipment
Pembelian untuk operasional	166.714	283.714.580	2.300.864.950	2.302.774.573	Purchases for operational
Lainnya	634.776.764	914.791.023	976.564.355	1.012.100.456	Others
Total	1.337.617.605	1.743.389.368	3.524.424.019	3.856.078.121	Total

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Consists of:

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

The details of property, plant and equipment are as follows:

31 Oktober 2022/October 31, 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	67.495.666.718	-	-	-	67.495.666.718	Land
Bangunan	31.751.520.955	305.000.000	-	-	32.056.520.955	Building
Mesin	18.657.853.166	-	-	-	18.657.853.166	Machinery
Inventaris	5.026.003.695	495.105.191	-	-	5.521.108.886	Office equipment
Kendaraan	2.950.348.782	-	1.254.366.300	-	1.695.982.482	Vehicles
Peralatan	2.991.240.746	68.445.736	-	-	3.059.686.482	Factory equipment
Instalasi	427.774.696	-	-	-	427.774.696	Installation
<u>Aset dalam pembangunan</u>						<u>Construction in progress</u>
Bangunan	3.856.760.000	4.862.780.150	-	-	8.719.540.150	Building
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use asset</u>
Bangunan	-	1.272.852.601	-	-	1.272.852.601	Building
Total harga perolehan	133.157.168.758	7.004.183.678	1.254.366.300	-	138.906.986.136	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	6.799.718.429	1.325.521.706	-	-	8.125.240.135	Building
Mesin	9.777.346.752	1.694.895.836	-	-	11.472.242.588	Machinery
Inventaris	4.307.720.238	376.497.820	-	-	4.684.218.058	Office equipment
Kendaraan	1.445.406.264	196.079.043	640.249.466	-	1.001.235.841	Vehicles
Peralatan	1.702.292.132	249.953.417	-	-	1.952.245.549	Factory equipment
Instalasi	421.139.993	6.634.706	-	-	427.774.699	Installation
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use asset</u>
Bangunan	-	70.714.033	-	-	70.714.033	Building
Total akumulasi penyusutan	24.453.623.808	3.920.296.561	640.249.466	-	27.733.670.903	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Neto	108.703.544.950				111.173.315.233	Net Book Value

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Keperilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	67.495.666.718	-	-	-	67.495.666.718	Land
Bangunan	31.011.816.363	739.704.592	-	-	31.751.520.955	Building
Mesin	18.657.853.166	-	-	-	18.657.853.166	Machinery
Inventaris	4.727.126.273	298.877.422	-	-	5.026.003.695	Office equipment
Kendaraan	2.383.943.972	566.404.810	-	-	2.950.348.782	Vehicles
Peralatan	2.811.695.291	179.545.455	-	-	2.991.240.746	Factory equipment
Instalasi	427.774.696	-	-	-	427.774.696	Installation
<u>Aset dalam pembangunan</u>						<u>Construction in progress</u>
Bangunan	62.980.000	3.793.780.000	-	-	3.856.760.000	Building
Total harga perolehan	127.578.856.479	5.578.312.279	-	-	133.157.168.758	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	5.233.882.534	1.565.835.895	-	-	6.799.718.429	Building
Mesin	7.733.724.212	2.043.622.540	-	-	9.777.346.752	Machinery
Inventaris	3.583.314.276	724.405.962	-	-	4.307.720.238	Office equipment
Kendaraan	1.143.822.750	301.583.514	-	-	1.445.406.264	Vehicles
Peralatan	1.392.426.152	309.865.980	-	-	1.702.292.132	Factory equipment
Instalasi	386.908.478	34.231.515	-	-	421.139.993	Installation
Total akumulasi penyusutan	19.478.078.402	4.979.545.406	-	-	24.453.623.808	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Neto	108.104.778.077				108.703.544.950	Net Book Value

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	67.495.666.718	-	-	-	67.495.666.718	Land
Bangunan	30.750.813.318	261.003.045	-	-	31.011.816.363	Building
Mesin	16.254.534.416	2.403.318.750	-	-	18.657.853.166	Machinery
Inventaris	4.361.480.595	365.645.678	-	-	4.727.126.273	Office equipment
Kendaraan	2.578.759.972	-	194.816.000	-	2.383.943.972	Vehicles
Peralatan	2.177.450.746	634.244.545	-	-	2.811.695.291	Factory equipment
Instalasi	427.774.696	-	-	-	427.774.696	Installation
<u>Aset dalam pembangunan</u>						<u>Construction in progress</u>
Bangunan	-	62.980.000	-	-	62.980.000	Building
Total harga perolehan	124.046.480.461	3.727.192.018	194.816.000	-	127.578.856.479	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	3.691.991.816	1.541.890.718	-	-	5.233.882.534	Building
Mesin	5.808.985.200	1.924.739.012	-	-	7.733.724.212	Machinery
Inventaris	2.762.415.623	820.898.653	-	-	3.583.314.276	Office equipment
Kendaraan	1.062.692.028	275.946.722	194.816.000	-	1.143.822.750	Vehicles
Peralatan	1.139.641.300	252.784.852	-	-	1.392.426.152	Factory equipment
Instalasi	349.649.984	37.258.494	-	-	386.908.478	Installation
Total akumulasi penyusutan	14.815.375.951	4.853.518.451	194.816.000	-	19.474.078.402	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Neto	109.231.104.510				108.104.778.077	Net Book Value

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	15.852.250.900	51.643.415.818	-	-	67.495.666.718	Land
Bangunan	30.750.813.318	-	-	-	30.750.813.318	Building
Mesin	13.126.654.715	3.127.879.701	-	-	16.254.534.416	Machinery
Inventaris	4.026.836.728	334.643.867	-	-	4.361.480.595	Office equipment
Kendaraan	2.234.802.500	343.957.472	-	-	2.578.759.972	Vehicles
Peralatan	2.126.450.746	51.000.000	-	-	2.177.450.746	Factory equipment
Instalasi	427.774.696	-	-	-	427.774.696	Installation
Total harga perolehan	68.545.583.603	55.500.896.858	-	-	124.046.480.461	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	2.154.451.150	1.537.540.666	-	-	3.691.991.816	Building
Mesin	4.183.722.138	1.625.263.062	-	-	5.808.985.200	Machinery
Inventaris	1.964.563.391	797.852.232	-	-	2.762.415.623	Office equipment
Kendaraan	773.141.978	289.550.050	-	-	1.062.692.028	Vehicles
Peralatan	905.666.010	233.975.290	-	-	1.139.641.300	Factory equipment
Instalasi	312.391.490	37.258.494	-	-	349.649.984	Installation
Total akumulasi penyusutan	10.293.936.157	4.521.439.794	-	-	14.815.375.951	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Neto	58.251.647.446				109.231.104.510	Net Book Value

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Beban penyusutan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 sebagai berikut:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	3.842.947.821	4.130.843.678	4.945.313.891	4.816.259.957	4.484.181.300	Cost of sales (Note 20)
Beban usaha (Catatan 21)	77.348.740	31.048.745	34.231.515	37.258.494	37.258.494	Operating expenses (Note 21)
Total	3.920.296.561	4.161.892.423	4.979.545.406	4.853.518.451	4.521.439.794	Total

8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

Depreciation expenses for the ten-month periods ended October 31, 2022 and 2021 (unaudited) and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are allocated as follows:

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

For the ten-month periods ended October 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, the details of gain on sale of property and equipment are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Harga jual	900.000.000	-	-	118.000.000	-	Selling price
Nilai buku	614.116.834	-	-	-	-	Net book value
Laba penjualan aset tetap	285.883.166	-	-	118.000.000	-	Gain on sale of property, plant and equipment

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih digunakan adalah sebagai berikut:

The cost of property, plant, and equipment which are fully depreciated but still in use are as follows:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Mesin	2.401.457.595	2.308.872.845	2.308.872.845	2.162.322.845	Machinery
Inventaris	3.670.932.942	2.570.192.197	1.474.278.422	1.091.323.547	Office equipment
Kendaraan	315.370.200	315.370.200	371.186.200	371.186.200	Vehicles
Peralatan	640.673.067	541.681.315	472.373.133	315.053.133	Factory equipment
Instalasi	427.774.696	275.001.746	129.706.746	129.706.746	Installation
Total	7.456.208.500	6.011.118.303	4.756.417.346	4.069.592.471	Total

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tanah, bangunan dan mesin digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13 dan 14).

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, land, building, and machinery are used as collateral for bank loans obtained by the Company (Notes 13 and 14).

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kendaraan digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan (Catatan 16).

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, vehicles are used as collateral for consumer financing payables obtained by the Company (Note 16).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment in value of property, plant and equipment as at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Tingkat penyelesaian dan estimasi penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			Percentage of completion Factory
		2021	2020	2019	
Persentase penyelesaian					
Pabrik	10%	5%	1%	-	
Tahun penyelesaian					Year of completion Factory
Pabrik	2023	2023	2023	-	

Aset tetap milik Perusahaan, kecuali tanah, dilindungi oleh asuransi terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, dan risiko lainnya, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar:

Stages of completion and estimated completion of construction in progress are as follows:

Property, plant and equipment owned by the Company, except for the land, are covered against fire, natural disaster, theft and other possible risk with an aggregate coverage amounted, respectively:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
PT Multi Artha Guna	23.756.070.000	23.756.000.000	23.756.000.000	27.600.000.000	PT Multi Artha Guna
PT BCA Insurance	10.328.500.000	-	-	-	PT BCA Insurance
PT Sahabat Insurance	715.000.000	-	-	-	PT Sahabat Insurance
PT Asuransi Raksa	207.800.000	207.800.000	-	-	PT Asuransi Raksa
PT ABDA Insurance	50.000.000	6.660.000.000	6.660.000.000	6.660.000.000	PT ABDA Insurance
Total	35.057.370.000	30.623.800.000	30.416.000.000	34.260.000.000	Total

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

The Company's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

9. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

9. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties. The nature of relationship with the related parties and type of transaction are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Type of transaction
PT Karya Nusa Perdana (KNP)	Pemegang saham/ Shareholders	Jaminan perusahaan/ Corporate guarantee
PT Bintang Mulia Gemilang (BMG)	Pemegang saham/ Shareholders	Jaminan perusahaan/ Corporate guarantee
PT Akasia Mas Investama (AMI)	Pemegang saham/ Shareholders	Jaminan perusahaan/ Corporate guarantee
Murniaty Kartono	Pemegang saham KNP/ KNP's shareholder	Letter of Comfort/
Tjhin Leeris Harni	Pemegang saham KNP/ KNP's shareholder	Letter of Comfort/
Bong Djun Ngian	Pemegang saham KNP/ KNP's shareholder	Letter of Comfort/
Jenty	Pemegang saham KNP/ KNP's shareholder	Letter of Comfort/
Carolina Renata Djaja	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder/	Letter of Comfort/
Liknawaty Kuwikatmadja	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder/	Letter of Comfort/
Hariati Tupang	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder/	Letter of Comfort/

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

9. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Type of transaction
Stephen Surya Djaja	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
Sukijo Tupang	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
Ir. Tinawati Susanto	Pemegang saham BMG/ BMG's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
PT Esta Utama Corpora	Pemegang saham EPI/ EPI's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
PT Bartley Sejahtera Investama	Pemegang saham EPI/ EPI's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
Jane Dewi Tahir	Pemegang saham AMI/ AMI's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
Wong Budi Setiawan	Pemegang saham AMI/ AMI's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
Hantje	Pemegang saham AMI/ AMI's shareholder	Letter of Comfort/ Letter of Comfort
a. Jaminan		a. Guarantue
Jaminan yang diberikan oleh pihak berelasi atas utang bank jangka panjang (Catatan 14) yang didapat Perusahaan terdiri atas:		Guarantee granted by related parties to the long term bank loans (Note 14) obtained by the Company consists of:
PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA)		PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA)
- Jaminan perusahaan dari PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.		- Corporate Guarantee on behalf of PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.
- Letter Of Comfort dari Seluruh Pemegang Saham PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama dan PT Akasia Mas Investama.		- Letter Of Comfort from All Shareholders of PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama and PT Akasia Mas Investama.
b. Gaji dan tunjangan kepada Komisaris dan Direksi		a. Salaries and allowances to Commissioner and Directors
Total gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.365.000.000 Rp2.365.000.000, Rp3.225.000.000, Rp2.532.232.500 dan Rp2.255.000.000 atau setara dengan 8,71%, 8,62%, 9,95%, 9,36% dan 8,60% dari beban gaji pada tahun bersangkutan.		Total salaries and allowance paid to the Company's board of commissioners and directors for ten-month period ended October 31, 2022 and 2021, and years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp2,365,000,000 Rp2,365,000,000, Rp3,225,000,000, Rp2,532,232,500 and Rp2,255,000,000, respectively or equivalent to 8.71%, 8.62%, 9.95%, 9.36% and 8.60% of salaries expenses for the year, respectively.
c. Pendapatan keuangan		a. Finance income
Pada tanggal 26 April 2022, Perusahaan memberikan pinjaman kepada Carolina Renata Djaja, Garrett Suryowijoyo Kartono dan Sarkoro Handajani dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp5.297.070.000, Rp3.070.000.000 dan Rp7.894.400.000. Perusahaan mencatat pendapatan keuangan atas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp234.336.303, Rp143.600.000 dan Rp384.307.319 sebagai bagian dari pada akun Penghasilan (beban) lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pada tanggal 19 Oktober 2022, pinjaman tersebut telah dilunasi.		On April 26, 2022, the Company provided loans to Carolina Renata Djaja, Garrett Suryowijoyo Kartono and Sarkoro Handajani with total loan amounting to Rp5,297,070,000, Rp3,070,000,000 and Rp7,894,400,000, respectively. The Company recorded finance income from these loans amounting to Rp234,336,303, Rp143,600,000 and Rp384,307,319, respectively, as part of Other income (expense) account in the statement of profit or loss and other comprehensive income. On October 19, 2022, the loan was repaid in full.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Terdiri dari:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
PT Asian Agro Agung Jaya	546.015.610	722.112.000	1.023.768.590	562.228.000	PT Asian Agro Agung Jaya
PT Polikemas Sanputra	536.353.999	-	909.380.717	388.309.198	PT Polikemas Sanputra
PT Umas Jaya Agrotama	359.640.000	-	105.600.000	275.000.000	PT Umas Jaya Agrotama
PT Mentari Prima Jayaabadi	178.710.000	268.150.000	96.000.000	401.650.000	PT Mentari Prima Jayaabadi
PT Uniair Indotama	115.250.523	146.779.457	277.339.292	747.735.005	PT Uniair Indotama
PT Kemasindo Cepat Nusantara	98.716.186	356.967.593	250.156.360	92.790.115	PT Kemasindo Cepat Nusantara
PT Interflex Sejahtera Perdana	6.493.500	641.894.000	44.200.000	659.700.000	PT Interflex Sejahtera Perdana
PT Ramos Global Logistics	-	338.444.568	-	-	PT Ramos Global Logistics
PT Mane Indonesia	-	-	142.293.580	337.598.900	PT Mane Indonesia
Lainnya (Di bawah Rp 300 juta)	1.298.415.491	1.303.733.943	1.899.930.036	2.233.777.772	Others (each below Rp 300 million)
Total	3.139.595.309	3.778.081.561	4.748.668.575	5.698.788.990	Total

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	714.485.699	699.344.326	1.751.842.766	1.458.208.390	Not yet due
Telah jatuh tempo:					Past due:
1 - 30 hari	2.355.158.400	3.038.302.017	2.464.256.409	1.962.658.900	1 - 30 days
31 - 60 hari	69.951.210	-	492.134.182	2.245.455.652	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	-	40.435.218	40.435.218	32.466.048	Over 90 days
Total utang usaha - pihak ketiga	3.139.595.309	3.778.081.561	4.748.668.575	5.698.788.990	Total trade payables third parties - net

Seluruh utang usaha Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah.

All of the Company's trade payables are denominated in Rupiah currency.

11. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini merupakan utang lain-lain atas operasional Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan utang dari pembelian tanah yang terletak di kawasan industri Kendal, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dengan bukti kepemilikan SHGB No.00288 seluas 35.379m² atas nama Perusahaan, dan telah dilunasi pada tanggal 23 Januari 2020.

11. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

As at October 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, this account represents other payables for operational of the Company.

As at December 31, 2019, this account represents payable for the purchase of land located in the Kendal industrial area, Wonorejo Village, Kaliwungu District, Kendal, Central Java with proof of ownership SHGB No.00288 covering an area of 35,379m² in the name of the Company, and has been paid on January 23, 2020.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibayar di Muka

Pada 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, akun ini merupakan PPN dibayar di muka masing-masing sebesar Rp8.497.141.017, Rp8.448.091.188, Rp12.278.765.174 dan Rp12.749.364.701.

b. Utang Pajak

Terdiri atas:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Pajak Penghasilan					Income taxes
Pasal 4 Ayat 2	23.358.300	13.912.500	1.479.305	-	Article 4(2)
Pasal 21	99.653.682	347.052.759	183.778.843	207.667.394	Article 21
Pasal 23	8.659.696	22.847.907	9.273.674	11.707.065	Article 23
Pasal 25	-	220.917.164	143.718.542	356.399.687	Article 25
Pasal 29	-	795.161.643	936.714	1.720.046	Article 29
Total utang pajak	131.671.678	1.399.891.973	339.187.078	577.494.192	Total taxes payable

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Laba sebelum taksiran Pajak penghasilan	696.516.174	14.006.752.189	13.644.835.681	10.407.488.584	16.151.580.147	Income before Income tax
Beda temporer:						Temporary differences:
Imbalan kerja	853.681.213	(552.996.993)	(663.596.391)	1.524.119.957	(325.991.555)	Employee benefit
Sewa	8.892.496	-	-	-	-	Lease
Provisi kerugian kredit ekspektasian	329.898.831	-	-	-	-	Provision for expected credit loss
Beda tetap:						Permanent differences:
Rumah tangga dan sanitasi	502.880.808	260.588.646	269.974.546	158.434.149	195.101.318	Household and sanitation
Pengobatan	192.839.545	186.698.579	220.994.301	67.773.074	159.300.856	Medicine
Biaya pajak	59.734.333	104.631.326	126.498.087	138.837.145	404.781.284	Tax
Penyusutan kendaraan	26.132.631	65.331.578	78.397.894	78.397.894	78.397.894	Depreciation of vehicles
Tunjangan lainnya	10.500.000	-	-	3.000.000	2.432.500	Other allowances
Pendapatan bunga dan jasa giro	(3.458.709)	(49.670.739)	(76.999.665)	(8.358.574)	(6.465.478)	Interest Income
Bunga bank	-	120.833.333	129.166.667	-	-	Interest expense
Lain-lain	(665.553.988)	(636.453.298)	(770.734.587)	(828.776.619)	(771.643.178)	Others
Jumlah beda tetap	123.074.620	51.959.425	(22.702.757)	(390.692.931)	61.905.196	Subtotal
Taksiran Laba Fiskal	2.012.063.334	13.505.714.621	12.958.536.533	11.540.915.610	15.887.493.788	Taxable income
Taksiran Laba Fiskal (dibulatkan)	2.012.063.000	13.505.714.000	12.958.536.000	11.540.915.000	15.887.493.000	Taxable income (rounded)

12. TAXATION

a. Prepaid Value Added Taxes (VAT)

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, this account represents prepaid VAT amounting to Rp8,497,141,017, Rp8,448,091,188, Rp12,278,765,174 and Rp12,749,364,701, respectively.

b. Tax Payable

Consists of:

c. Income Tax

The reconciliation between income before income tax expenses as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the ten-month period ended October 31, 2022 and 2021, and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax (continued)

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Beban pajak kini (25%) (22%)	- 442.653.860	- 2.971.257.080	- 2.850.877.920	- 2.539.001.300	3.971.873.250 -	Current tax expense (25%) (22%)
Pajak dibayar di muka Pasal 22 Pasal 25	- 2.087.587.248	1.206.400 1.391.758.385	1.206.400 2.054.509.877	2.936.400 2.535.128.186	46.003.456 3.924.149.748	Prepaid income tax Article 22 Article 25
Total pajak dibayar di muka	2.087.587.248	1.392.964.785	2.055.716.277	2.538.064.586	3.970.153.204	Total prepaid income tax
(Tagihan restitusi pajak penghasilan) utang pajak penghasilan	(1.644.933.388)	1.578.292.295	795.161.643	936.714	1.720.046	(Claim for tax refund) Income tax payable

Laba kena pajak tahun 2021, 2020 dan 2019 seperti yang disebutkan di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

The taxable income for the years 2021, 2020 and 2019 mentioned above is the basis for filling in the Corporate Income Tax Return (SPT).

Perusahaan telah melaporkan jumlah penghasilan kena pajak tahun 2021, 2020 dan 2019 dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak.

The Company has reported the amount of taxable income in 2021, 2020 and 2019 in the SPT which has been submitted to the Tax Office.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Laba sebelum taksiran Pajak penghasilan	696.516.174	14.006.752.189	13.644.835.681	10.407.488.584	16.151.580.147	Income before Income tax
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	(153.233.558)	(3.081.485.482)	(3.001.863.850)	(2.289.647.489)	(4.037.895.037)	Tax calculated based on the applicable rate
Pengaruh pajak atas beda permanen	(27.076.416)	(11.431.074)	4.994.607	85.952.445	(15.476.299)	Tax effect permanent differences
Penyesuaian terhadap pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak	-	-	-	(169.545.106)	-	Adjustments on deferred tax due to change in tax rate
Efek pembulatan	73	138	117	134	197	Rounding effect
Beban pajak penghasilan	(180.309.901)	(3.092.916.418)	(2.996.869.126)	(2.373.240.016)	(4.053.371.139)	Income tax expense

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan berdasarkan beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets from temporary differences between commercial and tax reporting by using the applicable tax rate are as follows:

31 Oktober 2022/October 31, 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefit (Expense)	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.178.293.679	187.809.867	(200.154.817)	1.165.948.729	Employee benefits liabilities
Sewa	-	1.956.349	-	1.956.349	Leasing
Provisi kerugian kredit ekspektasian	-	72.577.743	-	72.577.743	Provision for expected credit losses
Total aset pajak tangguhan	1.178.293.679	262.343.959	(200.154.817)	1.240.482.821	Total deferred tax assets

2021

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefit (Expense)	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.587.438.555	(145.991.206)	(263.153.670)	1.178.293.679	Employee benefits liabilities

2020

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefit (Expense)	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.412.875.886	165.761.284	8.801.385	1.587.438.555	Employee benefits liabilities

2019

	Penyesuaian Saldo Awal/ Beginning Balance adjustment	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefit (Expense)	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.626.291.288	(81.497.889)	(131.917.513)	1.412.875.886	Employee benefits liabilities

Pengakuan pemanfaatan aset pajak tangguhan oleh Perusahaan bergantung pada laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenai pajak.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Company is dependent upon future taxable profits and in excess of profits resulting from the reversal of existing taxable temporary differences.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi pajak di Indonesia

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

f. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No. 7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

12. TAXATION (continued)

e. Tax administration in Indonesia

The taxation laws of Indonesia require that each company within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

f. Changes in Corporate Tax Rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts (Perpu) No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Year 2020

In October 2021, the Government of Indonesia approved Law No. 7 Year 2021 ("Law No. 7/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No. 7/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing taxpayer voluntary compliance.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga;
- Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh dari bank dengan rincian sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	2019
PT Bank Central Asia Tbk	-	2.142.051.698	8.870.207.957	19.596.054.866

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0040/095/KRED/BGR/2015 tanggal 27 Februari 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp13.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 14 November 2017 yang diaktakan oleh Lisa Karwati S.H, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, dan langsung diperpanjang setiap tahunnya.

12. TAXATION (continued)

f. Changes in Corporate Tax Rate (continued)

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 7/2021, among others, are as follows:

- The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;
- VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;
- Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services, which also applies from April 1, 2022; and
- Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of assets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.

13. SHORT-TERM BANK LOAN

This account represents short-term credit facilities obtained from banks with the following details:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,		
		2021	2020	2019
PT Bank Central Asia Tbk	-	2.142.051.698	8.870.207.957	19.596.054.866

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Based on Credit Agreement No. 0040/095/KRED/BGR/2015 dated February 27, 2015, the Company obtained credit facility with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp13,000,000,000, which bears interest rate of 12% per annum. This facility will mature in one year.

Based on the Notarial Deed of Amendment to the Credit Agreement No. 02 dated November 14, 2017 which was notarized by Lisa Karwati S.H, the Company's credit facility terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp20,000,000,000, which bears interest rate of 10.5% per annum. This facility will mature in one year and automatically renewed each year.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00659 tanggal 13 Maret 2019, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00512 tanggal 26 Februari 2020, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00803 tanggal 22 Maret 2021, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00542 tanggal 21 Februari 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp20.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 103 luas 6.076m² a/n Perusahaan, terletak di Jl. Olympic Raya Blok B-11, Bogor.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perusahaan wajib melaksanakan hal-hal berikut:

- Memberitahu BCA secara tertulis apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direksi dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- Mempertahankan merek dagang Perusahaan.
- Menjaga *Debt-to-Equity Ratio* maksimal sebesar 3x dan *EBITDA/Installment* minimal 1x.

Selama jangka waktu pinjaman dengan BCA, Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari BCA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjamin harta kekayaan kepada pihak lain.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
- Mengubah status kelembagaan.
- Membagikan dividen lebih dari 30% laba bersih tahun berjalan.
- Apabila ada, utang pemegang saham tidak dapat dilunasi, kecuali dialihkan menjadi setoran modal.

13. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

Based on Notice of Term Extension No. 00659 dated March 13, 2019, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp20,000,000,000, which bears interest rate of 10% per annum. This facility will mature in one year.

Based on Notice of Term Extension No. 00512 dated February 26, 2020, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp20,000,000,000, which bears interest rate of 10% per annum. This facility will mature in one year.

Based on Credit Term Extension Notification Letter No. 00803 dated March 22, 2021, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp20,000,000,000, which bears interest rate of 10% per annum. This facility will mature in one year.

Based on Credit Term Extension Notification Letter No. 00542 dated February 21, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp20,000,000,000, which bears interest rate of 9.5% per annum. This facility will mature in one year.

This credit facility is collateralized with:

- SHGB No. 103 of 6,076m² on behalf of the Company, located at Jl. Olympic Raya Blok B-11, Bogor.

During the term of the loan with BCA, the Company is obliged to perform following activities:

- Notify BCA in writing if there any changes to the Articles of Association including shareholders, directors and or commissioners, capital and share value.
- Preserve the trade rights of the Company.
- Maintain *Debt-to-Equity Ratio* to be maximum of 3x and *EBITDA/Installment* minimum of 1x.

During the term of the loan with BCA, the Company, without written approval from BCA, is prohibited to perform the following:

- Bind themselves as guarantor of debt or guarantee assets to other parties.
- Providing loans, including but not limited to related parties, except in normal business transactions.
- Conduct consolidation, merger, takeover, dissolve/liquidation.
- Change institutional status.
- Declare dividends more than 30% of net income for the current year.
- If any, due to shareholders are not to be paid, except transferred to paid-in capital.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan, telah memenuhi persyaratan - persyaratan tersebut diatas.

Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank Central Asia Tbk sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia dan telah menandatangani perubahan Perjanjian Kredit pada tanggal 26 Januari 2023 (Catatan 28).

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit No. 32/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/I/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun. Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun.

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dijamin dengan aset seperti yang dijamin dalam fasilitas kredit pada utang bank jangka panjang.

Pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan, telah memenuhi persyaratan - persyaratan tersebut diatas.

13. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has complied the above requirements.

The Company received a letter from PT Bank Central Asia Tbk regarding the Company's plan to conduct an Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange and has signed an amendment to the Credit Agreement on January 26, 2023 (Note 28).

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Based on Credit Notification Letter No. 32/005/C2/Kredit/20 dated January 17, 2020, the Company obtained credit facility with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp5,000,000,000, which bears interest rate of 10% per annum. This facility will mature in one year.

Based on the second Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 005/I/M/2021 dated January 12, 2021, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp5,000,000,000, which bears interest rate of 10% per annum. This facility will mature in one year.

Based on the third Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 008/PK/BGR/2022 dated January 14, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp5,000,000,000, which bears interest rate of 9.5% per annum. This facility will mature in one year.

Based on Notification of Changes in Credit Interest Rates No. 34/073/COM2/2022 dated June 10, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp5,000,000,000, which bears interest rate of 8.5% per annum.

Based on fourth Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 077/PK/BGR/2022 dated September 20, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- Overdraft facility amounting to Rp5,000,000,000, which bears interest rate of 8.5% per annum. This facility will mature in one year.

Overdraft Facility collateralized by assets as collateral in credit facilities on long-term bank loans.

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has complied the above requirements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan utang yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Total utang bank jangka panjang	42.946.439.513	45.043.131.151	48.543.368.991	17.962.661.407	Total long - term bank loans
Dikurangi:					Less:
Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang	9.537.968.819	3.076.949.911	3.655.904.917	2.464.719.482	Current maturities of long-term liabilities
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	33.408.470.694	41.966.181.240	44.887.464.074	15.497.941.925	Long-term liabilities - net of current maturities

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberitahuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 29/153/C2/Kredit/17 tanggal 21 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas *Investment Loan 1* (IL 1) sebesar Rp23.000.000.000, dengan jangka waktu 8 tahun. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,25% *fixed* 2 tahun pertama dengan selanjutnya suku bunga *floating* dan provisi 0,5% untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 032/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memperoleh Fasilitas Kredit *Investment Loan 2* (IL 2) berjumlah USD1.350.000, yang bertujuan untuk alokasi plafond dari Fasilitas Kredit IL 1 dengan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan + 3% efektif mengambang (*floating*). IL 2 berjangka waktu enam tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit *Investment Loan 3* (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, yang bertujuan untuk pembelian tanah kavling industri di kawasan Industri Kendal, Jl. Saptanegara, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah, seluas 35.379 m², dengan tingkat suku bunga 10% p.a. dan provisi 0,5%. IL 3 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk masa tenggang (*Grace Period/GP*) selama dua tahun.
- Memperoleh Fasilitas Kredit *Investment Loan 4* (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, yang bertujuan untuk pembiayaan Pembangunan Konstruksi Pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal Kel. Brangsong, Kec. Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 4 ini berjangka waktu 8 tahun termasuk GP selama dua tahun.

14. LONG - TERM BANK LOANS

This account represents loans obtained from PT Bank KEB Hana Indonesia (HANA) with the following details:

Based on Credit Facility Notification Letter No. 29/153/C2/Kredit/17 dated July 21, 2017, the Company obtained credit facility with details as follows:

- *Investment Loan 1* (IL 1) credit facility amounting to Rp23,000,000,000, with maturity of 8 years. This credit facility bears interest rate of 9.25% per annum for the first 2 years, and floating interest rates with 0.5% provision rate for subsequent years.

Based on Credit Facility Notification Letter No. 032/005/C2/Kredit/20 dated January 17, 2020, the Company obtained credit facility with details as follows:

- Obtained *Investment Loan 2* (IL 2) Credit Facility amounting to USD1,350,000, with the purpose of allocating the ceiling of the IL 1 Credit Facility with an interest rate of 3 months LIBOR + 3% effective floating. IL 2 has a term of six years.
- Obtained *Investment Loan 3* (IL 3) Credit Facility amounting to Rp31,500,000,000, with the purpose of purchasing the industrial plots of land in the Kendal Industrial area, Jl. Saptanegara, Brangsong, Kendal, Central Java, with an area of 35,379 m², with an interest rate of 10% p.a. and 0.5% provision. IL 3 has a term of 8 years including a grace period (GP) of two years.
- Obtained *Investment Loan 4* (IL 4) Credit Facility totaling USD4,100,000, with the purpose of financing the Construction of Factory Construction located in the Kendal Industrial area Kel. Brangsong, Kec. Kendal, Central Java Province with a three-month LIBOR interest rate + 3.0% effective floating and a provision of 0.5%. The IL 4 has a term of 8 years including the GP for two years.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit (SPPK) No. 032/005/C2/Kredit/20 tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut: (lanjutan)

- Memperoleh Fasilitas Kredit *Investment Loan 5* (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, yang bertujuan untuk pembelian mesin-mesin baru yang akan ditempatkan di pabrik yang berlokasi di kawasan Industri Kendal, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah dengan tingkat suku bunga tiga bulan LIBOR + 3.0% efektif mengambang dan provisi 0,5%. IL 5 ini berjangka waktu 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan.

Berdasarkan Surat Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 005/I/M/2021 tanggal 12 Januari 2021, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit *Investment Loan 4* (IL 4) yang berjumlah USD4.100.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP selama 2 tahun, menjadi 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama.
- Fasilitas Kredit *Investment Loan 5* (IL 5) berjumlah Rp19.000.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan, menjadi 5 tahun termasuk GP selama 18 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Perubahan ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 008/PK/BGR/2022 tanggal 14 Januari 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit *Investment Loan 3* (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 2 tahun sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga Kredit No. 34/073/COM2/2022 tanggal 10 Juni 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit *Investment Loan 3* (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.
- Fasilitas Kredit *Investment Loan 5* (IL 5) yang berjumlah Rp19.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 8,5% per tahun.

14. LONG - TERM BANK LOANS (continued)

Based on Credit Facility Notification Letter No. 032/005/C2/Kredit/20 dated January 17, 2020, the Company obtained credit facility with details as follows: (continued)

- Obtained *Investment Loan 5* (IL 5) Credit Facility amounting to Rp19,000,000,000, with the purpose of purchasing new machines to be placed in factories located in the Kendal Industrial area, Brangsong, Kendal, Central Java with an interest rate of three months LIBOR + 3.0% effective floating and 0.5% provision. IL 5 has a term of 5 years including GP for 18 months.

Based on the second Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 005/I/M/2021 dated January 12, 2021, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- *Investment Loan 4* (IL 4) Credit Facility amounting to USD4,100,000, with a previous term of 8 years including GP for 2 years, now 8 years including GP 2 years since the first credit disbursement.
- *Investment Loan Credit Facility 5* (IL 5) amounting to Rp19,000,000,000, with a previous term of 5 years including GP for 18 months, now 5 years including GP for 18 months since the first credit disbursement.

Based on the third Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 008/PK/BGR/2022 dated January 14, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- *Investment Loan 3* (IL 3) Credit Facility amounting to Rp31,500,000,000, with a previous term of 8 years including GP 2 years since the first credit disbursement, now 8 years including GP 30 months since the first credit disbursement.

Based on Notification of Changes in Credit Interest Rates No. 34/073/COM2/2022 dated June 10, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- *Investment Loan 3* (IL 3) Credit Facility amounting to Rp31,500,000,000, which bears interest rate of 8.5% per annum.
- *Investment Loan 5* (IL 5) Credit Facility amounting to Rp19,000,000,000, which bears interest rate of 8.5% per annum.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berdasarkan Surat Perubahan keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 077/PK/BGR/2022 tanggal 20 September 2022, fasilitas kredit Perusahaan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit *Investment Loan* 3 (IL 3) yang berjumlah Rp31.500.000.000, dengan jangka waktu sebelumnya 8 tahun termasuk GP 30 bulan sejak pencairan kredit pertama, menjadi 8 tahun termasuk GP 3 tahun sejak pencairan kredit pertama.

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Fasilitas Kredit *Investment Loan* 4 (IL 4) dan *Investment Loan* 5 (IL 5) ini belum digunakan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- SHGB No. 216 luas 370m² a/n Perusahaan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 313 luas 3.134m² a/n Perusahaan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 314 luas 527m² a/n Perusahaan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- SHGB No. 319 luas 521m² a/n Perusahaan, terletak di Leuwintuq, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
- Mesin-mesin atas nama Perusahaan senilai Rp8.137.148.474.
- Tanah Kavling Industri PPJB No. 047/KAV/PPJB-KIK/2020 seluas 35.379 m².
- Jaminan Perusahaan atas nama PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.
- Letter Of Comfort dari Seluruh Pemegang Saham PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama dan PT Akasia Mas Investama.
- Mesin-mesin atas nama Perusahaan senilai Rp31.985.316.760, yang akan dibeli dan ditempatkan di kawasan industri Kendal.

Selama jangka waktu pinjaman dengan HANA, Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari HANA, tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.
- Wajib menjaga saldo rekening koran pada bank untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 bulan.
- Melakukan perubahan anggaran dasar.
- Melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi persyaratan - persyaratan tersebut diatas.

Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank KEB Hana Indonesia sehubungan dengan Permohonan Pengesampingan Pasal Pembatasan dalam Perjanjian Kredit (Catatan 28).

14. LONG - TERM BANK LOANS (continued)

Based on fourth Amendment Letter and Restatement of Credit Agreement No. 077/PK/BGR/2022 dated September 20, 2022, the Company's credit facilities terms are changed with details as follows:

- *Investment Loan* 3 (IL 3) Credit Facility amounting to Rp31,500,000,000, with a previous term of 8 years including GP 30 months since the first credit disbursement, now 8 years including GP 3 years since the first credit disbursement.

As of October 31, 2022, the *Investment Loan* 4 (IL 4) and *Investment Loan* 5 (IL 5) Credit Facility has not been used.

This credit facility is collateralized with:

- SHGB No. 216 of 370m² on behalf of the Company, located in Leuwintuq, Citeureup, Bogor, West Java.
- SHGB No. 313 of 3,134m² on behalf of the Company, located in Leuwintuq, Citeureup, Bogor, West Java.
- SHGB No. 314 of 527m² on behalf of the Company, located in Leuwintuq, Citeureup, Bogor, West Java.
- SHGB No. 319 of 521m² on behalf of the Company, located in Leuwintuq, Citeureup, Bogor, West Java.
- Machines owned by the Company amounting to Rp8,137,148,474.
- PPJB Industrial Plot Land No. 047/KAV/PPJB-KIK/2020 covering an area of 35,379 m².
- Corporate Guarantee on behalf of PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Akasia Mas Investama.
- Letter Of Comfort from All Shareholders of PT Karya Nusa Perdana, PT Bintang Mulia Gemilang, PT Esta Prima Investama and PT Akasia Mas Investama.
- Machines on behalf of the Company worth Rp31,985,316,760, which will be purchased and placed in the Kendal industrial area.

During the term of the loan with HANA, the Company, without written approval from HANA, is prohibited to perform the following:

- Obtain credit/loan facilities from other parties.
- Required to maintain a bank account balance for charging interest/installments a minimum of 1 month.
- Making changes to the articles of association.
- Make a decrease in capital and changes in shareholders.
- Declare dividends.

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has complied the above requirements.

The Company received a letter from PT Bank KEB Hana Indonesia regarding the Request for Waiver of Articles of Restriction in the Credit Agreement (Note 28).

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS SEWA

Perusahaan memiliki kontrak sewa dengan Tuan Wansoen Widjaja, pihak ketiga, untuk sewa tanah dan bangunan yang digunakan dalam operasinya. Tanah dan bangunan memiliki jangka waktu sewa 3 tahun tanpa batasan atau perjanjian yang diberlakukan dan mencakup opsi perpanjangan sewa. Pada tanggal 31 Oktober 2022, nilai tercatat aset hak guna adalah sebesar Rp1.202.138.567 (Catatan 8).

Perubahan liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober 2022/ October 31, 2022</u>	
Saldo awal	-	Beginning balance
Penambahan	1.272.852.601	Additions
Penambahan bunga	16.095.129	Accretion of interest
Pembayaran		Payments
Pokok	(451.404.871)	Principal
Bunga	(16.095.129)	Interest
Total	<u>821.447.730</u>	Total
Jangka pendek	391.814.104	Current
Jangka panjang	429.633.626	Non-current
Total	<u>821.447.730</u>	Total

Rata-rata tertimbang dari kenaikan suku bunga pinjaman yang diterapkan Perusahaan adalah 9,25%.

The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied is 9.25%.

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa diungkapkan dalam Catatan 24.

The maturity analysis of lease liabilities is disclosed in Note 24.

Jumlah total yang diakui dalam laporan laba rugi terdiri dari:

Total amount recognized in profit or loss consists of the following:

	<u>31 Oktober 2022/ October 31, 2022</u>	
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek:		Expenses relating to short-term leases:
Beban usaha (Catatan 21)	216.416.668	Operating expenses (Note 21)
Beban penyusutan atas aset hak guna (Catatan 21)	70.714.033	Depreciation expense of right-of-use assets (Note 21)
Beban bunga atas liabilitas sewa	16.095.129	Interest expense on lease liabilities
Total	<u>303.225.830</u>	Total

Total arus kas keluar untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk semua kontrak sewa adalah sebesar Rp683.916.668 yang termasuk biaya sewa yang tidak diakui dalam kewajiban sewa.

The total cash outflows for ten-month periods ended October 31, 2022 for all lease contracts amounted to Rp683,916,668, which include rental expenses that are not recognized in the lease liabilities.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Utang pembiayaan konsumen	125.800.000	176.120.000	43.409.600	274.693.400	Consumer financing payables
Dikurangi beban bunga di masa depan	(7.818.345)	(14.912.000)	(491.482)	(10.155.599)	Less interest expense in the future
Nilai tunai pembayaran utang pembiayaan konsumen	117.981.655	161.208.000	42.918.118	264.537.801	Cash value of payment consumer financing payables
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(54.798.168)	(52.133.236)	(42.918.118)	(221.619.683)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	63.183.487	109.074.764	-	42.918.118	Non-current maturities

Utang pembiayaan konsumen ini dikenai tingkat suku bunga sebesar 6,00% - 9,17% per tahun dengan menggunakan metode anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% - 4,50% per tahun dan akan dilunasi selama 2-3 tahun melalui angsuran bulanan.

Aset tetap - kendaraan yang diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 8).

Pembayaran atas pokok utang pembiayaan konsumen tersebut masing-masing sebesar Rp43.226.345, Rp47.950.118, Rp221.619.683 dan Rp479.687.199, pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Beban bunga atas utang pembiayaan konsumen tersebut masing-masing sebesar Rp7.093.655, Rp491.482, Rp491.482, Rp9.664.117 dan Rp32.440.445 untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Besarnya imbalan kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan dengan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Perusahaan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam penetapan kewajiban imbalan kerja untuk periode pelaporan berikutnya. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

15. CONSUMER FINANCING PAYABLES

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company entered into consumer financing agreements with PT BCA Finance for the purchase of vehicles. Details of consumer financing payables are as follows:

This consumer financing payables bears an interest rate of 6.00% - 9.17% per year using the annuity method or equivalent to a flat rate of 2.99% - 4.50% per year and will be repaid over 2-3 years through monthly payments.

Fixed assets - vehicles acquired through consumer financing payables are used as collateral for consumer financing payables as of October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 (Note 8).

Payment of the principal of the consumer financing debt amounted to Rp43,226,345, Rp47,950,118, Rp221,619,683 and Rp479,687,199 as of October 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Interest expense on this consumer financing loan amounted, Rp7,093,655, Rp491,482, Rp491,482, Rp9,664,117 and Rp32,440,445 for ten-month period ended October 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

17. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The amount of employee benefits is determined based on the Labor Law No. 13 Year 2003 and with the Company Regulation which were still in effect as at December 31, 2020. Effective February 2, 2021, the Company has apply the Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021), implementing the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation in its determination of the employee benefits liability for the next reporting period. No funding of the benefits has been made to date.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dalam laporannya tertanggal 22 Desember 2022 dan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Tingkat diskonto per tahun	7,12% - 7,62%	6,88% - 7,12%	6,88% - 7,78%	7,7% - 8,50%	Discount rate per annum
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	8%	8%	8%	8%	Salary increase rate per annum
Usia pensiun normal	58	58	55	55	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	100% TMI-2019	100% TMI-2019	100% TMI-2019	100% TMI-2011	Mortality rate

As at October 31, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the Company recognizes employee benefits cost based on the independent actuary's calculation, KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan in its reports dated December 22, 2022, using "Projected Unit Credit" method.

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the employee benefits are as follows:

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
		(tidak diaudit/ unaudited)				
Beban jasa kini	536.117.677	529.174.173	635.009.008	1.084.432.981	862.046.417	Current service expenses
Beban bunga	317.563.536	413.816.369	496.579.643	439.686.976	552.939.038	Interest expenses
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	(1.740.977.010)	Past service cost
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	-	(1.495.987.535)	(1.795.185.042)	-	-	Remeasurement of other long-term employee benefit
Total	853.681.213	(552.996.993)	(663.596.391)	1.524.119.957	(325.991.555)	Total

Rincian imbalan kerja karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits recognized in other comprehensive income are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
		(tidak diaudit/ unaudited)				
Pengukuran kembali Pengaruh penyesuaian pengalaman	(636.375.347)	(290.318.710)	(348.382.452)	(343.427.861)	(636.375.347)	Remeasurement Effect of experience adjustment
Pengaruh perubahan asumsi keuangan	(273.419.275)	(706.475.496)	(847.770.595)	383.434.156	(273.419.275)	Effect of changes in financial assumptions
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(909.794.622)	(996.794.206)	(1.196.153.047)	40.006.295	(909.794.622)	Actuarial gain (loss)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	5.355.880.360	7.215.629.798	7.215.629.798	5.651.503.546	6.505.165.151	Beginning balance
Beban (pendapatan) tahun/periode berjalan	853.681.213	942.990.542	1.131.588.651	1.524.119.957	(325.991.555)	Expense (income) during the year/period
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(909.794.622)	(996.794.206)	(1.196.153.047)	40.006.295	(527.670.050)	Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income
Perubahan program manfaat	-	(1.495.987.535)	(1.795.185.042)	-	-	Changes of benefit plan
Saldo akhir tahun	5.299.766.951	5.665.838.599	5.355.880.360	7.215.629.798	5.651.503.546	Ending balance

Analisa Sensitivitas

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

		Discount rate assumptions
Asumsi tingkat diskonto		Discount rate assumptions
Tingkat diskonto + 1%	(459.398.947)	Discount rate + 1%
Tingkat diskonto - 1%	529.749.825	Discount rate - 1%
Asumsi tingkat kenaikan gaji		Future salary incremental rate assumptions
Tingkat kenaikan gaji + 1%	505.722.419	Salary growth rate +1%
Tingkat kenaikan gaji - 1%	(448.205.560)	Salary growth rate - 1%

Perkiraan analisis jatuh tempo atas kewajiban imbalan pasti per 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut.

Expected maturity analysis of defined benefits obligation as at October 31, 2022 is presented below.

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	
Kurang dari 2 tahun	707.664.933	Less than 2 year
Antara 2 - 5 tahun	778.393.099	Between 2 - 5 years
Antara 5 - 10 tahun	1.063.892.038	Between 5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	2.749.816.881	Over 10 years
Total	5.299.766.951	Total

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP 35/2021.

The Company's management believes that the amount of liability for employee benefits as at October 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 is sufficient to meet the requirements of the Employment Law and PP 35/2021.

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja karyawan di akhir periode laporan adalah 21,34 tahun.

The average duration of employee benefits liabilities at the end of reporting period is 21,34 years.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 56 pada tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Ratna Ramli, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp9.000.000.000 dari laba neto tahun 2021. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031364.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 57 pada tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Ratna Ramli, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp45.000.000.000 menjadi sebesar Rp75.000.000.000, dan perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp100.000 ke Rp10. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp30.000.000.000 melalui konversi dari saldo laba Perusahaan, diambil bagian oleh PT Bintang Mulia Gemilang sebesar Rp11.859.066.670, PT Karya Nusa Perdana sebesar Rp11.748.000.000, PT Akasia Mas Investama sebesar Rp3.600.000.000, dan PT Esta Prima Investama sebesar Rp2.792.933.330. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031457.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 pada tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat oleh Flora Elisabeth, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan saham sebanyak 16.667 lembar saham atau sebesar Rp166.670 milik PT Bintang Mulia Gemilang ke PT Esta Prima Investama. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0019696 tanggal 8 Juni 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 9 pada tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Ratna Ramli, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal dasar dari Rp75.000.000.000 menjadi sebesar Rp365.000.000.000, serta modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp75.000.000.000 menjadi sebesar Rp91.600.000.000. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp16.600.000.000 akan diambil oleh pemegang saham baru di bawah 5%. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0248840 tanggal 13 Juni 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 51 pada tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Ratna Ramli, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan saham sebanyak 250.000.000 lembar saham atau sebesar Rp2.500.000.000 milik PT Satu Nusa Investama ke PT Dalles Capital Asia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0028557 tanggal 1 Juli 2022.

18. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Share Capital

Based on Notarial Deed No. 56 dated March 31, 2022 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the appropriation of general reserves amounting to Rp9,000,000,000 from net income in 2021. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0031364.AH.01.02.TAHUN 2022 dated April 28, 2022.

Based on Notarial Deed No. 57 dated March 31, 2022 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the increase of authorized capital, and issued and fully paid capital from Rp45,000,000,000 to Rp75,000,000,000, and the change of nominal value per share from Rp100,000 to Rp10. The increase of issued and fully paid capital of Rp30,000,000,000 through the conversion of the Company's retained earnings was taken in shares by PT Bintang Mulia Gemilang amounting to Rp11,859,066,670, PT Karya Nusa Perdana amounting to Rp11,748,000,000, PT Akasia Mas Investama amounting to Rp 3,600,000,000 and PT Esta Prima Investama amounting to Rp2,792,933,330. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0031457.AH.01.02.TAHUN 2022 dated April 28, 2022.

Based on Notarial Deed No. 1 dated May 9, 2022 of Flora Elisabeth, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the transfer of 16,667 shares or amounting to Rp166,670, from PT Bintang Mulia Gemilang to PT Esta Prima Investama. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0019696 dated June 8, 2022.

Based on Notarial Deed No. 9 dated May 13, 2022 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the increase of authorized capital from Rp75,000,000,000 to Rp365,000,000,000, and issued and fully paid capital from Rp75,000,000,000 to Rp91,600,000,000. The increase of issued and fully paid capital amounting to Rp16,600,000,000 were subscribed by new shareholders below 5%. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0248840 dated June 13, 2022.

Based on Notarial Deed No. 51 dated June 24, 2022 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the transfer of 250,000,000 shares or amounting to Rp2,500,000,000, from PT Satu Nusa Investama to PT Dalles Capital Asia. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0028557 dated July 1, 2022.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share Capital (continued)

The composition of the Company's shareholders as at October 31, 2022 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Modal/ Share Capital
PT Bintang Mulia Gemilang	2.964.750.000	32,37%	29.647.500.000
PT Karya Nusa Perdana	2.937.000.000	32,06%	29.370.000.000
PT Akasia Mas Investama	900.000.000	9,83%	9.000.000.000
PT Esta Prima Investama	698.250.000	7,62%	6.982.500.000
Armanda Indra Putra	275.520.000	3,01%	2.755.200.000
PT Dalles Capital Asia	250.000.000	2,73%	2.500.000.000
Freddy Soejandy	192.000.000	2,10%	1.920.000.000
Meicy Thomas	148.960.000	1,63%	1.489.600.000
Harry Istianto	148.747.000	1,62%	1.487.470.000
Henny Setiawan	137.600.000	1,50%	1.376.000.000
Wewe Harjono	130.880.000	1,43%	1.308.800.000
Suwandy	119.093.000	1,30%	1.190.930.000
Yurry Kurniawan Liumenta	82.560.000	0,90%	825.600.000
Edwin Andrianto	66.267.000	0,72%	662.670.000
Bambang Harliyanto	60.000.000	0,66%	600.000.000
Tan Li Hock	29.760.000	0,32%	297.600.000
Ir. Indahwati	18.613.000	0,20%	186.130.000
Total	9.160.000.000	100,00%	91.600.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 pada tanggal 29 November 2019 yang dibuat oleh Ratna Ramli, S.H., M.Kn., pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp40.000.000.000 menjadi sebesar Rp45.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5.000.000.000, disetor oleh PT Bintang Mulia Gemilang sebesar Rp1.976.500.000, PT Karya Nusa Perdana sebesar Rp1.958.000.000, PT Akasia Mas Investama sebesar Rp600.000.000, dan PT Esta Prima Investama sebesar Rp465.500.000. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0104099.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Based on Notarial Deed No. 34 dated November 29, 2019 of Ratna Ramli, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the increase of authorized capital, and issued and fully paid capital from Rp40,000,000,000 to Rp45,000,000,000. The increase of issued and fully paid capital of Rp5,000,000,000 was subscribed by PT Bintang Mulia Gemilang amounting to Rp1,976,500,000, PT Karya Nusa Perdana amounting to Rp1,958,000,000, PT Akasia Mas Investama amounting to Rp600,000,000 and PT Esta Prima Investama amounting to Rp465,500,000. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0104099.AH.01.02.TAHUN 2019 dated December 12, 2019.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Modal/ Share Capital
PT Bintang Mulia Gemilang	177.886	39,53%	17.788.600.000
PT Karya Nusa Perdana	176.220	39,16%	17.622.000.000
PT Akasia Mas Investama	54.000	12,00%	5.400.000.000
PT Esta Prima Investama	41.894	9,31%	4.189.400.000
Total	450.000	100,00%	45.000.000.000

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Tambahan Modal Disetor

Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengakuan Pajak (SKPP) pada tanggal 27 Maret 2017 dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berupa uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp88.513.500.

Pada tanggal 17 Maret 2017, Perusahaan telah membayar uang tebusan sebesar Rp4.425.675 sehingga tidak ada lagi pencatatan liabilitas pajak atas pengampunan pajak terkait dan telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan mengakui aset pengampunan pajak sebesar Rp88.513.500 pada harga perolehan sesuai dengan Sesuai dengan PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", dimana aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas dan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan. Aset pengampunan pajak telah dicatat sebagai aset sesuai dengan klasifikasinya

19. PENJUALAN NETO

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
<i>Chips</i>	58.173.163.718	88.605.210.793	101.441.317.936	81.691.183.769	90.140.396.081	<i>Chips</i>
<i>Crackers</i>	33.606.948.008	40.527.920.900	47.861.254.499	33.791.626.655	34.324.271.275	<i>Crackers</i>
Lainnya	427.035.362	103.877.272	168.686.362	108.625.453	-	<i>Others</i>
Subtotal	92.207.147.088	129.237.008.965	149.471.258.797	115.591.435.877	124.464.667.356	Subtotal
Potongan penjualan	(583.747.319)	(125.518.434)	(125.518.434)	-	-	Discount and return
Total	91.623.399.769	129.111.490.531	149.345.740.363	115.591.435.877	124.464.667.356	Total

Rincian penjualan kepada pelanggan dari pihak ketiga yang melebihi 10% dari total penjualan neto:

The details of sales to a single customer, third parties, exceeding 10% of total net sales are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
The Vege Chip Company Pty Ltd, Australia	32.519.446.594	75.420.434.962	84.936.275.488	63.898.327.909	64.996.234.117	The Vege Chip Company Pty Ltd, Australia
Intersnack Nederland BV, Belanda	28.324.758.784	33.945.587.090	39.326.025.130	25.974.798.883	25.894.559.197	Intersnack Nederland BV, Netherlands
Wai Lana Productions LLC, Amerika Serikat	25.559.983.086	7.320.639.713	10.250.247.965	10.025.216.022	8.410.854.332	Wai Lana Productions LLC, United States
Total	86.404.188.464	116.686.661.765	134.512.548.583	99.898.342.814	99.301.647.646	Total

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

20. COST OF SALES

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Persediaan bahan baku						Raw materials
Saldo awal	6.235.670.066	9.687.128.661	9.687.128.661	9.632.244.985	8.650.721.563	Beginning balance
Pembelian	35.661.598.686	53.134.237.001	61.262.468.522	43.258.973.960	53.003.663.803	Purchases
Saldo akhir	(6.973.974.791)	(7.358.427.297)	(6.235.670.066)	(9.687.128.661)	(9.632.244.985)	Ending balance
Pemakaian bahan baku	34.923.293.961	55.462.938.365	64.713.927.117	43.204.090.284	52.022.140.381	Raw materials used
Biaya produksi:						Manufacturing costs:
Gaji dan tunjangan	15.699.612.866	17.310.616.630	20.210.177.404	17.395.642.981	17.490.941.239	Salaries and allowances
Pengiriman	5.396.639.358	3.941.259.780	5.267.422.980	594.614.075	573.770.000	Shipment
Penyusutan (Catatan 8)	3.842.947.821	4.130.843.678	4.945.313.891	4.816.259.957	4.484.181.300	Depreciation (Note 8)
Gas	3.247.229.129	4.366.998.781	5.330.595.449	5.541.327.073	5.613.894.565	Gas
Higienis dan sanitasi	2.644.195.541	3.280.661.085	3.769.171.368	3.170.740.295	3.170.857.053	Hygiene and sanitation
Listrik dan air	1.359.767.308	1.421.852.244	1.832.247.262	1.485.165.263	1.434.103.648	Electricity and water
Pemeliharaan	1.165.499.769	1.779.819.145	2.038.357.993	1.242.822.350	1.264.310.731	Maintenance
Transportasi	243.865.600	301.574.290	351.916.890	313.697.600	305.746.100	Transportation
Lainnya	1.158.421.511	654.164.057	788.890.288	520.497.493	993.657.326	Others
Subtotal	34.758.178.903	37.187.789.690	44.534.093.525	35.080.767.087	35.331.461.962	Subtotal
Barang dalam proses						Work-in-process
Saldo awal	40.438.565	42.559.013	42.559.013	272.911.415	685.414.746	Beginning balance
Saldo akhir	(196.955.186)	(119.792.516)	(40.438.565)	(42.559.013)	(272.911.415)	Ending balance
Harga pokok produksi	69.524.956.243	92.573.494.552	109.250.141.090	78.515.209.773	87.766.105.674	Cost of goods manufactured
Barang jadi						Finished goods
Saldo awal	1.285.185.005	1.357.873.538	1.357.873.538	710.533.153	157.539.541	Beginning balance
Saldo akhir	(1.001.968.658)	(958.564.120)	(1.285.185.005)	(1.357.873.538)	(710.533.153)	Ending balance
Total beban pokok penjualan	69.808.172.590	92.972.803.970	109.322.829.623	77.867.869.388	87.213.112.062	Total cost of sales

Rincian pembelian ke pihak ketiga yang melebihi 10% dari total beban pokok penjualan:

The details of purchases to a single supplier, third parties, exceeding 10% of total cost of sales are as follows:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	2019	
PT Asian Agro						PT Asian Agro
Agung Raya	5.321.017.000	9.653.760.735	11.577.139.735	8.517.027.386	7.830.290.424	Agung Raya
Budiono	3.905.279.800	4.419.588.200	6.226.160.200	3.734.346.200	4.947.464.800	Budiono
PT Polikemas Sanputra	2.609.289.989	4.324.862.433	4.486.353.279	3.423.468.367	5.361.453.329	PT Polikemas Sanputra
Total	11.835.586.789	18.398.211.368	22.289.653.214	15.674.841.953	18.139.208.553	Total

21. BEBAN USAHA

21. OPERATING EXPENSES

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Beban riset dan pengembangan	237.373.576	264.089.953	304.869.129	305.594.109	557.255.132	Research and development expenses
Beban penjualan	3.704.086.757	6.425.005.574	7.607.887.423	6.558.353.366	5.686.412.750	Selling expenses
Beban umum dan administrasi						General and administrative expenses
Gaji dan tunjangan	11.455.027.749	10.127.946.686	12.190.195.097	9.655.215.277	8.742.445.255	Salaries and allowances
Imbalan kerja (Catatan 17)	853.681.213	942.990.543	1.131.588.651	1.524.119.957	(325.991.555)	Employee benefits (Note 17)
Perjalanan dinas	761.865.109	135.519.100	164.770.449	-	-	Business trip

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN USAHA (lanjutan)

21. OPERATING EXPENSES (continued)

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Legal dan perizinan	707.411.334	619.967.784	654.231.727	1.230.736.223	596.344.940	Legal and permit
Sewa	216.416.668	199.854.167	238.500.000	254.999.999	83.333.333	Rent
Konsultan	189.615.516	156.800.000	194.824.490	324.652.581	330.086.200	Consultant
Telekomunikasi	105.244.767	104.399.974	127.680.597	123.414.545	117.649.161	Telecommunication
Penyusutan (Catatan 8)	77.348.740	31.048.745	34.231.515	37.258.494	37.258.494	Depreciation (Note 8)
Pajak	59.734.333	25.085.227	25.085.227	49.261.658	212.700.234	Taxes
Administrasi bank	48.537.096	47.311.301	54.054.324	159.206.052	56.363.497	Bank administration
Lainnya	775.830.410	460.343.175	561.009.771	279.733.908	531.021.109	Others
Subtotal	15.250.712.935	12.851.266.702	15.376.171.848	13.638.598.694	10.381.210.668	Subtotal
Total beban usaha	19.192.173.268	19.540.362.229	23.288.928.400	20.502.546.169	16.624.878.550	Total operating expenses

22. LABA NETO PER SAHAM DASAR

22. BASIC NET EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan:

The computation of basic earnings per share attributable to owners of the Company is based on the following data:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (Tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Laba bersih untuk perhitungan saham	516.206.273	10.913.835.771	10.647.966.555	8.034.248.568	12.098.209.008	Net income for computation of earnings
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar	7.555.643.564	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.043.956.044	Weighted average number of ordinary share outstanding
Laba per saham dasar	0,07	2,43	2,37	1,79	2,99	Basic earnings per share

23. INFORMASI SEGMENT

23. SEGMENT INFORMATION

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan benua. Tabel berikut ini menyajikan informasi segmen mengenai hasil operasi Perusahaan:

The Company manages and evaluates its operations based on continent. The following table provides operating segment information of the Company:

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Oktober 2022/October 31, 2022					Total	
	Afrika/Africa	Amerika/America	Asia/Asia	Australia/Australia	Eropa/Europe		
PENJUALAN NETO	-	25.857.617.897	1.791.553.137	32.637.836.981	31.336.391.754	91.623.399.769	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	-	19.701.004.956	1.364.990.285	24.866.876.395	23.875.300.954	69.808.172.590	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	-	6.156.612.941	426.562.852	7.770.960.586	7.461.090.800	21.815.227.179	GROSS PROFIT
Beban usaha	-	5.416.344.343	375.273.110	6.836.583.493	6.563.972.322	19.192.173.268	Operating expenses
LABA USAHA	-	740.268.598	51.289.742	934.377.093	897.118.478	2.623.053.911	OPERATING INCOME
Beban lain-lain - neto						(1.926.537.737)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN						696.516.174	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto						(180.309.901)	Income tax expense - net
LABA NETO PERIODE BERJALAN						516.206.273	NET INCOME FOR THE PERIOD
Total penghasilan komprehensif lain - neto						709.639.805	Total other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF						1.225.846.078	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Aset tidak dapat dialokasi						162.688.077.383	Unallocated assets
Liabilitas tidak dapat dialokasi						54.222.050.819	Unallocated Liabilities

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Oktober 2021 (Tidak diaudit)/October 31, 2021 (Unaudited)					Total	
	Afrika/Africa	Amerika/America	Asia/Asia	Australia/Australia	Eropa/Europe		
PENJUALAN NETO	-	11.146.755.368	3.054.939.705	75.525.568.348	39.384.227.110	129.111.490.531	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	-	8.026.745.702	2.199.853.082	54.385.739.270	28.360.465.916	92.972.803.970	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	-	3.120.009.666	855.086.623	21.139.829.078	11.023.761.194	36.138.686.561	GROSS PROFIT
Beban usaha	-	1.687.004.283	462.349.464	11.430.407.604	5.960.600.878	19.540.362.229	Operating expenses
LABA USAHA		1.433.005.383	392.737.159	9.709.421.474	5.063.160.316	16.598.324.332	OPERATING INCOME
Beban lain-lain - neto						(2.591.572.143)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN						14.006.752.189	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto						(3.092.916.418)	Income tax expense - net
LABA NETO PERIODE BERJALAN						10.913.835.771	NET INCOME FOR THE PERIOD
Total penghasilan komprehensif lain - neto						777.499.481	Total other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF						11.691.335.252	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Aset tidak dapat dialokasi						148.080.158.547	Unallocated assets
Liabilitas tidak dapat dialokasi						57.329.608.744	Unallocated Liabilities

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2021/December 31, 2021					Total	
	Afrika/Africa	Amerika/America	Asia/Asia	Australia/Australia	Eropa/Europe		
PENJUALAN NETO	-	14.169.685.026	3.306.192.319	85.166.927.309	46.702.935.709	149.345.740.363	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	-	10.372.375.256	2.420.171.468	62.343.187.432	34.187.095.467	109.322.829.623	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	-	3.797.309.770	886.020.851	22.823.739.877	12.515.840.242	40.022.910.740	GROSS PROFIT
Beban usaha	-	2.209.616.285	515.566.605	13.280.904.211	7.282.841.299	23.288.928.400	Operating expenses
LABA USAHA		1.587.693.485	370.454.246	9.542.835.666	5.232.998.943	16.733.982.340	OPERATING INCOME
Beban lain-lain - neto						(3.089.146.659)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN						13.644.835.681	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto						(2.996.869.126)	Income tax expense - net
LABA NETO TAHUN BERJALAN						10.647.966.555	NET INCOME FOR THE YEAR
Total penghasilan komprehensif lain - neto						932.999.377	Total other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF						11.580.965.932	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Aset tidak dapat dialokasi						149.787.275.894	Unallocated assets
Liabilitas tidak dapat dialokasi						59.147.095.408	Unallocated Liabilities

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Afrika/Africa	Amerika/America	Asia/Asia	Australia/Australia	Eropa/Europe	Total	
PENJUALAN NETO	198.200.941	15.667.676.414	3.867.091.256	63.898.327.910	31.960.139.356	115.591.435.877	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	133.517.547	10.554.489.364	2.605.055.943	43.044.941.989	21.529.864.545	77.867.869.388	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	64.683.394	5.113.187.050	1.262.035.313	20.853.385.921	10.430.274.811	37.723.566.489	GROSS PROFIT
Beban usaha	35.155.061	2.778.988.396	685.909.094	11.333.697.935	5.668.795.683	20.502.546.169	Operating expenses
LABA USAHA	29.528.333	2.334.198.654	576.126.219	9.519.687.986	4.761.479.128	17.221.020.320	OPERATING INCOME
Beban lain-lain - neto						(6.813.531.736)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN						10.407.488.584	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto						(2.373.240.016)	Income tax expense - net
LABA NETO TAHUN BERJALAN						8.034.248.568	NET INCOME FOR THE YEAR
Total penghasilan komprehensif lain - neto						(31.204.910)	Total other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF						8.003.043.658	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Aset tidak dapat dialokasi						149.108.748.579	Unallocated assets
Liabilitas tidak dapat dialokasi						70.049.534.025	Unallocated Liabilities

The original financial statements herein are in Indonesian language.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

23. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Afrika/Africa	Amerika/America	Asia/Asia	Australia/Australia	Eropa/Europe	Total	
PENJUALAN NETO	386.306.774	17.694.225.822	8.927.334.218	64.755.898.782	32.700.901.760	124.464.667.356	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	270.687.390	12.398.446.340	6.255.434.705	45.374.832.690	22.913.710.937	87.213.112.062	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	115.619.384	5.295.779.482	2.671.899.513	19.381.066.092	9.787.190.823	37.251.555.294	GROSS PROFIT
Beban usaha	51.599.408	2.363.436.641	1.192.433.567	8.649.514.561	4.367.894.373	16.624.878.550	Operating expenses
LABA USAHA	64.019.976	2.932.342.841	1.479.465.946	10.731.551.531	5.419.296.450	20.626.676.744	OPERATING INCOME
Beban lain-lain - neto						(4.475.096.597)	Other expenses - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN						16.151.580.147	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto						(4.053.371.139)	Income tax expense - net
LABA NETO TAHUN BERJALAN						12.098.209.008	NET INCOME FOR THE YEAR
Total penghasilan komprehensif lain - neto						395.752.537	Total other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF						12.493.961.545	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Aset tidak dapat dialokasi						150.160.482.481	Unallocated assets
Liabilitas tidak dapat dialokasi						79.104.311.585	Unallocated Liabilities

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
<u>ASET KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL ASSETS</u>
Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	6.026.605.530	6.026.605.530	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga - neto	23.550.289.953	23.550.289.953	Trade receivables third parties - net
Piutang lain-lain	494.793.201	494.793.201	Other receivables
Total aset keuangan	30.071.688.684	30.071.688.684	Total financial assets
<u>LIABILITAS KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL LIABILITIES</u>
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang usaha - pihak ketiga	3.139.595.309	3.139.595.309	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	668.819.380	668.819.380	Other payables - third parties
Beban akrual	1.068.941.104	1.068.941.104	Accrued expenses
Utang bank	42.946.439.513	42.946.439.513	Bank loans
Liabilitas sewa	821.447.730	821.447.730	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	117.981.655	117.981.655	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	48.763.224.691	48.763.224.691	Total financial liabilities

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

24. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2021/December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
<u>ASET KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL ASSETS</u>
Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	4.676.042.551	4.676.042.551	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga - neto	17.110.674.354	17.110.674.354	Trade receivables third parties - net
Piutang lain-lain	365.946.168	365.946.168	Other receivables
Total aset keuangan	22.152.663.073	22.152.663.073	Total financial assets
<u>LIABILITAS KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL LIABILITIES</u>
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	2.142.051.698	2.142.051.698	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	3.778.081.561	3.778.081.561	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	629.949.427	629.949.427	Other payables - third parties
Beban akrual	623.661.737	623.661.737	Accrued expenses
Utang bank	45.043.131.151	45.043.131.151	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	161.208.000	161.208.000	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	52.378.083.574	52.378.083.574	Total financial liabilities
	31 Desember 2020/December 31, 2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
<u>ASET KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL ASSETS</u>
Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan setara kas	1.367.710.829	1.367.710.829	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	11.081.353.210	11.081.353.210	Trade receivables third parties
Piutang lain-lain	76.717.503	76.717.503	Other receivables
Total aset keuangan	12.525.781.542	12.525.781.542	Total financial assets
<u>LIABILITAS KEUANGAN</u>			<u>FINANCIAL LIABILITIES</u>
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	8.870.207.957	8.870.207.957	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	4.748.668.575	4.748.668.575	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	266.326.470	266.326.470	Other payables - third parties
Beban akrual	10.139.704	10.139.704	Accrued expenses
Utang bank	48.543.368.991	48.543.368.991	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	42.918.118	42.918.118	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	62.481.629.815	62.481.629.815	Total financial liabilities

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

24. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2019/December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
ASET KEUANGAN			FINANCIAL ASSETS
Pinjaman dan piutang:			Loans and receivables:
Kas dan setara kas	1.367.597.777	1.367.597.777	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	10.817.770.433	10.817.770.433	Trade receivables third parties
Piutang lain-lain	110.001.499	110.001.499	Other receivables
Total aset keuangan	12.295.369.709	12.295.369.709	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN			FINANCIAL LIABILITIES
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	19.596.054.867	19.596.054.867	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	5.698.788.990	5.698.788.990	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	28.867.146.469	28.867.146.469	Other payables - third parties
Beban akrual	474.152.624	474.152.624	Accrued expenses
Utang bank	17.962.661.407	806.441.104	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	264.537.801	806.441.104	Consumer financing payables
Total liabilitas keuangan	72.863.342.158	72.863.342.158	Total financial liabilities

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
 - Nilai wajar dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.
 - Nilai tercatat liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran kontraktual lessor selama masa sewa, dengan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada tarif implisit dalam sewa kecuali hal ini tidak dapat segera ditentukan, dalam hal ini, bunga pinjaman inkremental Perusahaan digunakan saat dimulainya sewa.
- Cash and cash equivalents, trade receivables - third parties, other receivables - third parties, trade payables - third parties, other payables - third parties, and accrued expenses approximate their carrying values due to the short-term nature and will be due within 12 months.
 - The fair value of short term bank loans, long term bank loans and consumer financing payables is determined by discounting cash flow using effective interest rate.
 - Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term, with the discount rate determined by reference to the rate implicit in the lease unless this is not readily determinable, in which case, the Company's incremental borrowing rate on commencement of the lease is used.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (risiko suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan risiko suku bunga.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Potential risks arising from the Company's financial instruments relates to market risk (interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The policies on the importance of managing the risk level has increased significantly considering changes of several parameters and volatility of financial markets both in Indonesia and international. The Company's Directors review and approve risk policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the risks which are summarized below.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by market risks, especially foreign currency risk and interest rate risk.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to the interest rate risk relates primarily to bank loans, consumer financing payables and lease liabilities.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through a fixed interest rate, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter a new loan agreement.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial liabilities that are exposed to interest rate risk:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022				
	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due Within One (1) Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 Years	Total/Total
Aset/Asset					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Bank dan setara kas/banks and cash equivalents	0,25% - 0,50%	5.694.255.329	-	-	5.694.255.329
Liabilitas/Liabilities					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Utang bank /bank loans	8,50%	9.537.968.819	11.258.470.694	22.150.000.000	42.946.439.513
Liabilitas sewa/ lease liabilities	9,25%	391.814.104	429.633.626	-	821.447.730
Utang pembiayaan konsumen/ consumer financing payables	6,00%	54.798.168	63.183.487	-	117.981.655

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due Within One (1) Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 Years	Total/Total
Aset/Asset					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Bank dan setara kas/banks and cash equivalents	0,25 - 0,50%	4.362.482.553	-	-	4.362.482.553
Liabilitas/Liabilities					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Utang bank jangka pendek/short-term bank loans	10,00%	2.142.051.698	-	-	2.142.051.698
Utang bank/ bank loans	8,50%	3.076.949.911	10.466.181.240	31.500.000.000	45.043.131.151
Utang pembiayaan konsumen/ consumer financing payables	6,00%	52.133.236	109.074.764	-	161.208.000

31 Desember 2020/December 31, 2020

	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due Within One (1) Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 Years	Total/Total
Aset/Asset					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Bank dan setara kas/banks and cash equivalents	0,25% - 0,50%	1.297.216.611	-	-	1.297.216.611
Liabilitas/Liabilities					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Utang bank jangka pendek/short-term bank loans	10,00%	8.870.207.957	-	-	8.870.207.957
Utang bank/ bank loans	8,50%	3.655.904.917	13.387.464.074	31.500.000.000	48.543.368.991
Utang pembiayaan konsumen/ consumer financing payables	9,17%	42.918.118	-	-	42.918.118

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Interest Rate Risk (continued)

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Rata-rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun/ Due Within One (1) Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 Years	Total/Total
Aset/Asset					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Bank dan setara kas/banks and cash equivalents	0,25%-0,50%	1.347.744.514	-	-	1.347.744.514
Liabilitas/Liabilities					
Bunga tetap/ Fixed rate					
Utang bank jangka pendek/short-term bank loans	10,05%	19.596.054.867	-	-	19.596.054.867
Utang bank/ bank loans	9,25%	2.464.719.482	15.497.941.925	-	17.962.661.407
Utang pembiayaan konsumen/ consumer financing payables	7,39% - 9,17%	221.619.683	42.918.118	-	264.537.801

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo pinjaman, dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum beban pajak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on the loans, with all other variables held constant, to the income before tax for the ten-month period ended October 31, 2022 and year ended December 31, 2021, 2020 and 2019:

Tahun/ Year	Kenaikan (penurunan) dalam suku bunga/ Increase (decrease) in interest rate	Efek terhadap laba sebelum pajak/ Effect on income before tax
31 Oktober 2022/ October 31, 2022	+1%	(381.916.136)
	-1%	381.916.136
31 Desember 2021/ December 31, 2021	+1%	(429.839.083)
	-1%	429.839.083
31 Desember 2020/ December 31, 2020	+1%	(561.592.785)
	-1%	561.592.785
31 Desember 2019/ December 31, 2019	+1%	(364.755.096)
	-1%	364.755.096

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari bank dan piutang usaha dalam mata uang asing.

Perusahaan memiliki aset dalam mata uang asing dinyatakan sebagai berikut:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Foreign currency exchange risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign currency exchange rates. The Company's exposures to exchange rate fluctuations are mainly from bank and trade receivables in foreign currencies.

The Company has monetary assets denominated in foreign currencies as follows:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/Equivalent Rp	
Aset			Assets
Bank			Bank
USD	160.884	2.500.459.750	USD
AUD	2.286	22.806.021	AUD
SGD	2.150	23.659.338	SGD
Piutang usaha			Trade receivables
USD	1.209.869	18.803.785.529	USD
AUD	469.718	4.686.848.143	AUD
SGD	18.400	202.509.112	SGD
Liabilitas			Liabilities
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
USD	768.629	11.822.468.860	USD
Aset moneter			Monetary asset
USD	602.124	9.481.776.419	USD
AUD	472.004	4.709.654.164	AUD
SGD	20.550	226.168.450	SGD
	2021		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/Equivalent Rp	
Aset			Assets
Bank			Bank
USD	261.796	3.735.573.737	USD
AUD	2.957	30.585.124	AUD
SGD	1.995	21.015.608	SGD
Piutang usaha			Trade receivables
USD	654.608	9.340.607.242	USD
AUD	651.380	6.737.872.859	AUD
SGD	30.449	320.753.297	SGD
Liabilitas			Liabilities
Utang bank jangka panjang			Long-term bank loans
USD	949.129	13.543.131.151	USD
Aset moneter			Monetary asset
USD	(32.725)	(466.950.172)	USD
AUD	654.337	6.768.457.983	AUD
SGD	32.444	341.768.905	SGD

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

		2020		
		<u>Mata Uang Asing/ Foreign Currency</u>	<u>Ekuivalen/Equivalent</u>	
		Rp		
Aset				Assets
Bank				Bank
USD	11.041		155.734.827	USD
AUD	103.122		1.110.723.037	AUD
SGD	2.318		24.675.768	SGD
Piutang usaha				Trade receivables
USD	395.094		5.572.804.821	USD
AUD	414.105		4.460.321.930	AUD
SGD	31.013		330.105.163	SGD
Liabilitas				Liabilities
Utang bank jangka panjang				Long-term bank loans
USD	1.163.468		17.043.368.992	USD
Aset moneter				Monetary asset
USD	(757.333)		(11.314.829.344)	USD
AUD	517.227		5.571.044.967	AUD
SGD	33.331		354.780.931	SGD
		2019		
		<u>Mata Uang Asing/ Foreign Currency</u>	<u>Ekuivalen/Equivalent</u>	
		Rp		
Aset				Assets
Bank				Bank
USD	91.236		1.268.267.127	USD
AUD	2.557		24.906.770	AUD
SGD	2.374		24.499.682	SGD
Piutang usaha				Trade receivables
USD	322.049		4.776.804.066	USD
AUD	510.107		4.967.934.436	AUD
SGD	33.050		341.110.778	SGD
Aset moneter				Monetary asset
USD	413.285		6.045.071.193	USD
AUD	512.664		4.992.841.206	AUD
SGD	35.424		365.610.460	SGD

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities, include deposits with banks, foreign exchange transactions, and other financial instruments. Credit risk arises mainly from cash in banks, trade receivables and other receivables.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen Perusahaan.

Risiko kredit timbul dari bank. Untuk memitigasi risiko kredit Perusahaan menempatkan bank pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Credit risk arising from trade receivables and other receivables is managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management of the Company.

Credit risk arises from banks. To mitigate the credit risk the Company places its banks and cash equivalents with reputable financial institutions. The Company does not enter into derivatives to manage credit risk although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai eksposur maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

The following table provides information regarding the maximum exposure to Company's credit risk as at October 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022						
	Total/ Total	Belum Jatuh tempo/ Not yet due	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired				Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired
			1-30 hari/ 1-30 days	31-60 hari/ 31-60 days	61-90 hari/ 61-90 days	Lebih dari 90 hari/ More than 90 days	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/Financial assets measured at amortized cost							
Bank/Cash in banks	5.694.255.329	5.694.255.329	-	-	-	-	-
Piutang usaha/Trade receivables Pihak ketiga/Third parties	23.880.188.784	8.575.714.462	3.251.025.826	3.468.153.738	2.165.312.148	6.090.083.779	329.898.831
Piutang lain-lain/Other receivables Pihak ketiga/Third parties	494.793.201	494.793.201	-	-	-	-	-
Total	30.069.237.314	14.764.762.992	3.251.025.826	3.468.153.738	2.165.312.148	6.090.083.779	329.898.831
	2021						
			Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired				
	Total/ Total	Belum Jatuh tempo/ Not yet due	1-30 hari/ 1-30 days	31-60 hari/ 31-60 days	61-90 hari/ 61-90 days	Lebih dari 90 hari/ More than 90 days	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/Financial assets measured at amortized cost							
Bank/Cash in banks	3.862.482.553	3.862.482.553	-	-	-	-	-
Piutang usaha/Trade receivables Pihak ketiga/Third parties	17.110.674.354	8.524.399.635	3.866.764.853	678.979.426	931.784.617	3.108.745.823	-
Piutang lain-lain/Other receivables Pihak ketiga/Third parties	365.946.168	365.946.168	-	-	-	-	-
Total	21.339.103.075	12.752.828.356	3.866.764.853	678.979.426	931.784.617	3.108.745.823	

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

	2020						Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired
	Total/ Total	Belum Jatuh tempo/ Not yet due	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired				
			1-30 hari/ 1-30 days	31-60 hari/ 31-60 days	61-90 hari/ 61-90 days	Lebih dari 90 hari/ More than 90 days	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/Financial assets measured at amortized cost							
Bank/Cash in banks	1.297.216.611	1.297.216.611	-	-	-	-	-
Piutang usaha/Trade receivables Pihak ketiga/Third parties	11.081.353.210	6.173.822.167	1.149.073.676	475.451.201	2.098.389.925	1.184.616.241	-
Piutang lain-lain/Other receivables Pihak ketiga/Third parties	76.717.503	76.717.503	-	-	-	-	-
Total	12.455.287.324	7.547.756.281	1.149.073.676	475.451.201	2.098.389.925	1.184.616.241	
	2019						
	Total/ Total	Belum Jatuh tempo/ Not yet due	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired				Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired
			1-30 hari/ 1-30 days	31-60 hari/ 31-60 days	61-90 hari/ 61-90 days	Lebih dari 90 hari/ More than 90 days	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/Financial assets measured at amortized cost							
Bank/Cash in banks	1.347.744.514	1.347.744.514	-	-	-	-	-
Piutang usaha/Trade receivables Pihak ketiga/Third parties	10.817.770.433	7.103.902.098	1.039.064.633	1.674.760.044	206.765.705	793.277.953	-
Piutang lain-lain/Other receivables Pihak ketiga/Third parties	110.001.499	110.001.499	-	-	-	-	-
Total	12.275.516.446	8.561.648.111	1.039.064.633	1.674.760.044	206.765.705	793.277.953	

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk piutang usaha, Perusahaan telah menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 71 untuk mengukur cadangan kerugian ECL sepanjang umur. Perusahaan menentukan kerugian kredit ekspektasian atas pos-pos ini dengan menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status jatuh tempo debitur, disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan estimasi kondisi ekonomik masa depan. Oleh karena itu, profil risiko kredit dari aset tersebut disajikan berdasarkan status tunggakannya dalam matriks provisi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel berikut menjelaskan jatuh tempo kontraktual (mewakili arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) dari liabilitas keuangan:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	3.139.595.309	-	-	3.139.595.309	Third parties
Utang lain-lain					Other payable
Pihak ketiga	668.819.380	-	-	668.819.380	Third parties
Beban akrual	1.068.941.104	-	-	1.068.941.104	Accrued expenses
Utang bank	9.537.968.819	11.258.470.694	22.150.000.000	42.946.439.513	Bank loans
Liabilitas sewa	391.814.104	429.633.626	-	821.447.730	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	54.798.168	63.183.487	-	117.981.655	Consumer financing payables
Total Liabilitas	14.861.936.884	11.751.287.807	22.150.000.000	48.763.224.691	Total Liabilities

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

For trade receivables, the Company has applied the simplified approach in PSAK 71 to measure the loss allowance at lifetime ECL. The Company determines the expected credit losses on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions. Accordingly, the credit risk profile of these assets is presented based on their past due status in terms of the provision matrix.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The following table sets out the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of financial liabilities:

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

		2021				
		Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	2.142.051.698			-	2.142.051.698	Short-term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	3.778.081.561		-	-	3.778.081.561	Trade payables Third parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	629.949.427		-	-	629.949.427	Other payable Third parties
Beban akrual	623.661.737		-	-	623.661.737	Accrued expenses
Utang bank	3.076.949.911	10.466.181.240		31.500.000.000	45.043.131.151	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	52.133.236	109.074.764		-	161.208.000	Consumer financing payables
Total Liabilitas	10.302.827.570	10.575.256.004		31.500.000.000	52.378.083.574	Total Liabilities
		2020				
		Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	8.870.207.957		-	-	8.870.207.957	Short-term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	4.748.668.575		-	-	4.748.668.575	Trade payables Third parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	266.326.470		-	-	266.326.470	Other payable Third parties
Beban akrual	10.139.704		-	-	10.139.704	Accrued expenses
Utang bank	3.655.904.917	13.387.464.074		31.500.000.000	48.543.368.991	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	42.918.118		-	-	42.918.118	Consumer financing payables
Total Liabilitas	17.594.165.741	13.387.464.074		31.500.000.000	62.481.629.815	Total Liabilities
		2019				
		Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 Year	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total/ Total	
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	19.596.054.867		-	-	19.596.054.867	Short-term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	5.698.788.990		-	-	5.698.788.990	Trade payables Third parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	28.867.146.469		-	-	28.867.146.469	Other payable Third parties
Beban akrual	474.152.624		-	-	474.152.624	Accrued expenses
Utang bank	2.464.719.482	15.497.941.925		-	17.962.661.407	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	221.619.683	42.918.118		-	264.537.801	Consumer financing payables
Total Liabilitas	57.322.482.115	42.918.118		-	72.863.342.158	Total Liabilities

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara liabilitas bersih dengan modal. Liabilitas bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2022/ October 31, 2022	31 Desember/December 31,			
		2021	2020	2019	
Total liabilitas	54.222.050.819	59.147.095.408	70.049.534.025	79.104.311.585	Total liabilities
Dikurangi kas dan setara kas	6.026.605.530	4.676.042.551	1.367.710.829	1.367.597.777	Less cash and cash equivalents
Liabilitas - bersih	48.195.445.289	54.471.052.857	68.681.823.196	77.736.713.808	Net Liabilities
Total ekuitas	108.466.026.564	90.640.180.486	79.059.214.554	71.056.170.896	Total equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	0,44	0,60	0,87	1,09	Net debt-to-equity ratio

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit rating and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (*gearing ratio*), which is calculated as net liabilities divided by total equity. Net liabilities is total liabilities as presented in the statement of financial position less cash and cash equivalents. Whereas, total equity is all components of equity in the statement of financial position.

The gearing ratio as at October 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan:

	31 Oktober/October 31,		31 Desember/December 31,			
	2022	2021 (tidak diaudit/ unaudited)	2021	2020	2019	
Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui kapitalisasi saldo laba	30.000.000.000	-	-	-	-	Additional of issued and fully paid capital through capitalization of retained earnings
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	1.272.852.601	-	-	-	-	Additions to right-of-use assets through lease liabilities
Penambahan aset tetap melalui: Uang muka	290.909.092	-	97.037.537	340.979.465	105.007.472	Additions to property, plant and equipment through: Advances
Utang pembelian aset tetap	-	-	-	-	28.648.320.000	Payables for purchase of fixed assets
Utang pembiayaan konsumen	-	-	166.240.000	-	238.950.000	Consumer financing payables

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

26. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing and financing activities:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember 2021/December 31, 2021	Arus kas/ Cash flow	Non-kas/ Non-cash	31 Oktober 2022/October 31, 2022	
Utang bank jangka panjang	45.043.131.150	(2.096.691.637)	-	42.946.439.513	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	-	(451.404.871)	1.272.852.601	821.447.730	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	161.208.000	(43.226.345)	-	117.981.655	Consumer financing payables
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	45.204.339.150	(2.591.322.853)	1.272.852.601	43.885.868.898	Total liabilities from financing activities
	31 Desember 2020/December 31, 2020	Arus kas/ Cash flow	Non-kas/ Non-cash	31 Oktober 2021/October 31, 2021	
Utang bank jangka panjang	48.543.368.991	(2.550.007.121)	-	45.993.361.870	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	42.918.118	(42.918.118)	-	-	Consumer financing payables
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	48.586.287.109	(2.592.925.239)	-	45.993.361.870	Total liabilities from financing activities

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

	2020	Arus kas/ Cash flow	Non-kas/ Non-cash	2021	
Utang bank jangka panjang	48.543.368.991	(3.500.237.841)	-	45.043.131.150	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	42.918.118	(47.950.118)	166.240.000	161.208.000	Consumer financing payables
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	48.586.287.109	(3.548.187.959)	166.240.000	45.204.339.150	Total liabilities from financing activities
	2019	Arus kas/ Cash flow	Non-kas/ Non-cash	2020	
Utang bank jangka panjang	17.962.661.407	30.580.707.584	-	48.543.368.991	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	264.537.801	(221.619.683)	-	42.918.118	Consumer financing payables
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	18.227.199.208	30.359.087.901	-	48.586.287.109	Total liabilities from financing activities
	2018	Arus kas/ Cash flow	Non-kas/ Non-cash	2019	
Utang bank jangka panjang	20.241.540.946	(2.278.879.539)	-	17.962.661.407	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	505.275.000	(479.687.199)	238.950.000	264.537.801	Consumer financing payables
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	20.746.815.946	(2.758.566.738)	238.950.000	18.227.199.208	Total liabilities from financing activities

27. PERJANJIAN PENTING

Wai Lana Productions, LLC (Wai Lana)

Pada tanggal 7 Mei 2021, Perusahaan menandatangani Supply Agreement dengan Wai Lana, dimana Perusahaan ditunjuk untuk melakukan penjualan atas produk-produk milik Perusahaan kepada Wai Lana. Syarat dan ketentuan atas perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Territory : Worldwide
 b. Order currency : US Dollar
 c. Departure port : FOB Jakarta
 d. Shipping agent : Top Ocean or similar
 e. Compliance requirements : BRC or ISO 22000 equivalent

Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dijelaskan didalam perjanjian.

Perjanjian ini berlaku dari tanggal perjanjian dan akan berakhir sampai salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Wai Lana Productions, LLC (Wai Lana)

On May 7, 2021, the Company has entered into Supply Agreement with Wai Lana, which appointed the Company was appointed to sale its products to Wai Lana. The terms and conditions of this agreement are as follows:

- a. Territory : Worldwide
 b. Order currency : US Dollar
 c. Departure port : FOB Jakarta
 d. Shipping agent : Top Ocean or similar
 e. Compliance requirements : BRC or ISO 22000 equivalent

More complete terms and conditions are explained in the agreement.

This agreement is valid from the date of the agreement and will be ended if one of the parties ended the agreement.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

The Vege Chip Company Pte Ltd (Vege)

Pada tanggal 3 Mei 2018, Perusahaan menandatangani Supply Agreement dengan Vege, dimana Perusahaan ditunjuk untuk melakukan penjualan atas produk-produk milik Perusahaan kepada Vege. Syarat dan ketentuan atas perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Territory | : Australia and New Zealand |
| b. Order currency | : Australian Dollar |
| c. Depature port | : FOB Jakarta |
| d. Shipping agent | : As nominated by Vege |
| e. Compliance requirements | : HACCP certification |

Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dijelaskan didalam perjanjian.

Perjanjian ini berlaku dari tanggal perjanjian dan akan berakhir sampai salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini.

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Utang bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 00047 tanggal 26 Januari 2023, pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari BCA sebelum:

- Mengubah status kelembagaan, dan
- Membagikan dividen lebih dari 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah memenuhi kewajiban di BCA pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari bank BCA berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan No.00065/SLK-KOM/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang pada pokoknya menyampaikan hal persetujuan Perubahan Status Perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, dengan syarat:

- Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit.
- Menyerahkan kepada BCA berupa *Prospectus* dan *Due diligence* Perusahaan sebelum dilakukan *listing*.
- Akta Perusahaan terbaru berikut bukti pelaporan/pemberitahuan dan/atau persetujuannya dari pihak yang berwenang (setelah proses IPO selesai) ke BCA.
- Mempertahankan kepemilikan saham mayoritas PT Bintang Mulia Gemilang dan PT Karya Nusa Persada. Selain itu, manajemen harus tetap berada dibawah kontrol Sarkoro Handajani.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Vege Chip Company Pte Ltd (Vege)

On May 3, 2018, the Company has entered into Supply Agreement with Vege, which appointed the Company was appointed to sale its products to Vege. The terms and conditions of this agreement are as follows:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Territory | : Australia and New Zealand |
| b. Order currency | : Australian Dollar |
| c. Depature port | : FOB Jakarta |
| d. Shipping agent | : As nominated by Vege |
| e. Compliance requirements | : HACCP certification |

More complete terms and conditions are explained in the agreement.

This agreement is valid from the date of the agreement and will be ended if one of the parties ended the agreement.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Bank Loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Based on the Amendment to Credit Agreement Number 00047 dated January 26, 2023, initially the agreement has a provision that the Company must obtain prior written approval from BCA before:

- Changing institutional status, and
- Distributing dividends of more than 30% of the current year's net profit after fulfilling obligations to BCA in the current year.

In connection with these restrictions, the Company has received approval from BCA bank based on Approval Letter of Change of Company Status No.00065/SLK-KOM/2023 dated January 9, 2023, which basically conveyed the approval of the Company's Status Change to become a public company related to the Company's Initial Public Offering plan, with conditions:

- Sign the Credit Agreement Amendment.
- Submit to BCA the Company's Prospectus and Due Diligence prior to listing.
- The Company deed update along with evidence of reporting/notification and/or approval from the authorities (after the IPO process is completed) to BCA.
- Maintain majority share ownership by PT Bintang Mulia Gemilang and PT Karya Nusa Persada. In addition, management must remain under the control of Sarkoro Handajani.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Atas Surat Waiver BCA sebagaimana di atas, Perusahaan dan BCA telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No.00047 tanggal 26 Januari 2023, yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit BCA yang mengakomodir Surat Waiver BCA (Catatan 13).

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank KEB Hana Indonesia sehubungan dengan perubahan terakhir dalam perubahan kelima No. 004/PK/BGR/2023. Pada awalnya perjanjian tersebut memiliki ketentuan bahwa Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HANA sebelum membayar dividen dan melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari HANA berdasarkan surat pemberitahuan No.35/036/COM2/Kredit/I/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyetujui rencana penawaran umum dan aksi korporasi Perusahaan dengan syarat bahwa Perusahaan harus menjaga kepemilikan saham dari PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana dan PT Akasia Mas Investama secara bersama minimal sebesar 55%. Apabila terdapat perubahan pemegang saham yang berdampak menurunnya kepemilikan ketiga pemegang saham tersebut menjadi dibawah 55%, maka Perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari HANA minimal 30 hari sebelum perubahan pemegang saham (Catatan 14).

Perubahan Anggaran Dasar

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Akta Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., No. 6, seluruh pemegang saham telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Maxindo Karya Anugerah menjadi PT Maxindo Karya Anugerah Tbk dan penyesuaian-penyesuaian untuk memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Terbuka. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003068.AH.01.02.Tahun 2023.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

Based on the BCA Waiver Letter as above, the Company and BCA have signed an Amendment to Credit Agreement No.00047 dated January 26, 2023, which is an amendment to the BCA Credit Agreement that accommodates the BCA Waiver Letter (Note 13).

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana)

On January 27, 2023, the Company has received a letter from PT Bank KEB Hana Indonesia in relation to the latest amendment in the fifth amendment No. 004/PK/BGR/2023. The agreement originally had a provision that the Company must obtain prior written approval from HANA before paying dividends and making distributions on other income to its shareholders. In connection with these restrictions, the Company has received approval from HANA based on notification letter No.35/036/COM2/Kredit/I/2023 dated February 27, 2023 which basically approves the Company's public offering plan and corporate action with the condition that the Company must maintain the share ownership of PT Bintang Mulia Gemilang, PT Karya Nusa Perdana and PT Akasia Mas Investama together at least 55%. If there is a change in shareholders that results in a decrease in the ownership of the three shareholders to below 55%, the Company is required to submit a written request and must obtain prior approval from HANA at least 30 days before the change in shareholders. (Note 14).

Amendment to the Articles of Association

On January 13, 2023, based on Deed of Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., No. 6, all shareholders have approved the Amendment to the Company's Articles of Association regarding the change in the name of the Company from PT Maxindo Karya Anugerah to PT Maxindo Karya Anugerah Tbk and adjustments to meet the requirements as a public company. The Changes of Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0003068.AH.01.02.Tahun 2023.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2022
dan Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
for the Ten-Month Period Ended
October 31, 2022
and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
and Ten-Month Period Ended
October 31, 2021 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Akta Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., No. 6, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Ir. Wong Budi Setiawan
Candra Gunawan
Drs., Latip Wiyono

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Sarkoro Handajani
Carolina Renata Djaja
Garret Suryowijoyo Kartono

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 067/SK-EKS/MAXI/I/2023, Perusahaan menunjuk Carolina Renata Djaja sebagai Sekretaris Perusahaan.

On January 13, 2023, based on the Decree of the Board of Directors Number 067/SK-EKS/MAXI/I/2023, the Company appointed Carolina Renata Djaja as Corporate Secretary.

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/SK-EKS/MAXI/I/2023, Perusahaan menunjuk Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

On January 13, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners Number 063/SK-EKS/MAXI/I/2023, the Company appoints the Company Audit Committee as follows:

Komite Audit

Ketua Komite Audit
Anggota Komite
Anggota Komite

Drs. Latip Wiyono Ak
Andri Indradi
Stephanie Kuntara

Audit Committee
Chairman of the Audit Committee
Committee member
Committee member

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 065/SK-EKS/MAXI/I/2023, Perusahaan menunjuk Buntoro dan Sandhy Artha sebagai Audit Internal Perusahaan.

On January 13, 2023, based on based on the Board of Commissioners' Approval Letter Number 065/SK-EKS/MAXI/I/2023, the Company appointed Buntoro and Sandhy Artha as the Company's Internal Audit

Pada tanggal 13 Januari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 062/SK-EKS/MAXI/I/2023, Perusahaan menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan sebagai berikut:

On January 13, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners Number 062/SK-EKS/MAXI/I/2023, the Company appointed the Company's Nomination and Remuneration Committee as follows:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Anggota Komite
Anggota Komite

Drs. Latip Wiyono Ak
Anis Frestani
Dixon D. Sinaga

Nomination and Remuneration Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Committee member
Committee member

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00056/2.1058/AU.1/04/0006-1/1/IV/2022 tanggal 18 April 2022, No. 00069/1.2016/AU.1/04/0744-6/1/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dan No. 00055/1.2016/AU.1/04/0744-5/1/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

Manajemen Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan sehubungan dengan penerapan PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

Rincian perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan yang disajikan kembali adalah sebagai berikut:

29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company have restated the financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019 that have been audited by Public Accountant Firm, Abdul Ghonie & Rekan with independent auditor's report No. 00056/2.1058/AU.1/04/0006-1/1/IV/2022 dated April 18, 2022, No. 00069/1.2016/AU.1/04/0744-6/1/IV/2021 dated April 21, 2021 and No. 00055/1.2016/A.U.1/04/0744-5/1/IV/2020 dated April 15, 2020.

The Company's management restate its financial statements with changes in or additional disclosure on the financial statements in relation with the applied of PSAK 25 (Revised 2009) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

The details of the changes and additional disclosures to the restated financial statements are as follows:

	2021			
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4.676.042.551	-	4.676.042.551	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga - neto	17.110.674.354	-	17.110.674.354	Trade parties - net
Piutang lain-lain	365.946.167	1	365.946.168	Other receivables
Persediaan	7.561.293.636	-	7.561.293.636	Inventories
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	8.934.016.568	(485.925.380)	8.448.091.188	Prepaid Value Added Taxes
Beban dibayar di muka dan uang muka	1.743.389.368	-	1.743.389.368	Prepaid expenses and advances
Total Aset Lancar	40.391.362.644	(485.925.379)	39.905.437.265	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	110.509.192.780	(1.805.647.830)	108.703.544.950	Property, plant and equipment - net
Aset pajak tangguhan	-	1.178.293.679	1.178.293.679	Deferred tax assets
Aset lainnya	3.856.760.000	(3.856.760.000)	-	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	114.365.952.780	(4.484.114.151)	109.881.838.629	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	154.757.315.424	(4.970.039.530)	149.787.275.894	TOTAL ASSETS

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2021			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2.142.051.698	-	2.142.051.698	Short term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	3.164.233.656	613.847.905	3.778.081.561	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	629.949.427	-	629.949.427	Other payables - third parties
Utang pembelian aset tetap	176.120.000	(176.120.000)	-	Fixed assets purchase payables
Beban akrual	1.237.509.642	(613.847.905)	623.661.737	Accrued expenses
Utang pajak	1.885.817.352	(485.925.379)	1.399.891.973	Taxes payables
Uang muka pelanggan	13.239.501	-	13.239.501	Advance from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of Long term liabilities
Utang bank	3.159.127.633	(82.177.722)	3.076.949.911	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	52.133.236	52.133.236	Consumer financing payables
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>12.408.048.909</u>	<u>(692.089.865)</u>	<u>11.715.959.044</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	41.884.003.518	82.177.722	41.966.181.240	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	109.074.764	109.074.764	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	7.984.034.406	(2.628.154.046)	5.355.880.360	Long-term employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>49.868.037.924</u>	<u>(2.436.901.560)</u>	<u>47.431.136.364</u>	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	<u>62.276.086.833</u>	<u>(3.128.991.425)</u>	<u>59.147.095.408</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	45.000.000.000	-	45.000.000.000	Share capital
Tambahan modal disetor	7.140.399.885	(7.051.886.385)	88.513.500	Additional paid-in capital
Saldo laba	40.340.828.706	5.210.838.280	45.551.666.986	Retained earnings
TOTAL EKUITAS	<u>92.481.228.591</u>	<u>(1.841.048.105)</u>	<u>90.640.180.486</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>154.757.315.424</u>	<u>(4.970.039.530)</u>	<u>149.787.275.894</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2021			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
PENJUALAN - NETO	149.345.740.363	-	149.345.740.363	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(110.029.730.332)	706.900.709	(109.322.829.623)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	39.316.010.031	706.900.709	40.022.910.740	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(23.809.259.197)	520.330.797	(23.288.928.400)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	15.506.750.834	1.227.231.506	16.733.982.340	OPERATING INCOME
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(2.444.630.416)	(644.516.243)	(3.089.146.659)	Other income (expenses) - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	13.062.120.418	582.715.263	13.644.835.681	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.850.877.920)	(145.991.206)	(2.996.869.126)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO SETELAH PAJAK	10.211.242.498	436.724.057	10.647.966.555	NET INCOME AFTER TAX
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	1.453.116.917	(520.117.540)	932.999.377	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	11.664.359.415	(83.393.483)	11.580.965.932	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2020			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.367.710.829	-	1.367.710.829	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga - neto	11.081.353.210	-	11.081.353.210	Trade parties - net
Piutang lain-lain	76.717.500	3	76.717.503	Other receivables
Persediaan	11.087.561.212	-	11.087.561.212	Inventories
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	12.726.696.917	(447.931.743)	12.278.765.174	Prepaid Value Added Taxes
Beban dibayar di muka dan uang muka	3.524.424.019	-	3.524.424.019	Prepaid expenses and advances
Total Aset Lancar	<u>39.864.463.687</u>	<u>(447.931.740)</u>	<u>39.416.531.947</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	114.497.607.476	(6.392.829.399)	108.104.778.077	Property, plant and equipment - net
Aset pajak tangguhan	-	1.587.438.555	1.587.438.555	Deferred tax assets
Aset lainnya	62.980.000	(62.980.000)	-	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	<u>114.560.587.476</u>	<u>(4.868.370.844)</u>	<u>109.692.216.632</u>	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	<u>154.425.051.163</u>	<u>(5.316.302.584)</u>	<u>149.108.748.579</u>	TOTAL ASSETS

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2020			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	8.870.207.957	-	8.870.207.957	Short term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	2.996.825.809	1.751.842.766	4.748.668.575	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	266.326.469	1	266.326.470	Other payables - third parties
Utang pembelian aset tetap	77.094.600	(77.094.600)	-	Fixed assets purchase payables
Beban akrual	1.761.982.470	(1.751.842.766)	10.139.704	Accrued expenses
Utang pajak	787.118.821	(447.931.743)	339.187.078	Taxes payables
Uang muka pelanggan	13.087.334	-	13.087.334	Advance from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of Long term liabilities
Utang bank	632.635.192	3.023.269.725	3.655.904.917	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	42.918.118	42.918.118	Consumer financing payables
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>15.405.278.652</u>	<u>2.541.161.501</u>	<u>17.946.440.153</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	47.910.733.799	(3.023.269.725)	44.887.464.074	Bank loans
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	10.292.169.535	(3.076.539.737)	7.215.629.798	Long-term employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>58.202.903.334</u>	<u>(6.099.809.462)</u>	<u>52.103.093.872</u>	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	<u>73.608.181.986</u>	<u>(3.558.647.961)</u>	<u>70.049.534.025</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	45.000.000.000	-	45.000.000.000	Share capital
Tambahan modal disetor	7.140.399.885	(7.051.886.385)	88.513.500	Additional paid-in capital
Saldo laba	28.676.469.291	5.294.231.763	33.970.701.054	Retained earnings
TOTAL EKUITAS	<u>80.816.869.176</u>	<u>(1.757.654.622)</u>	<u>79.059.214.554</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>154.425.051.162</u>	<u>(5.316.302.583)</u>	<u>149.108.748.579</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2020			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ <i>As previously Issued</i>	Penyesuaian penyajian kembali/ <i>Restatement adjustments</i>	Disajikan kembali/ <i>As restated</i>	
PENJUALAN - NETO	115.591.435.877	-	115.591.435.877	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(78.611.478.692)</u>	<u>743.609.304</u>	<u>(77.867.869.388)</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	<u>36.979.957.185</u>	<u>743.609.304</u>	<u>37.723.566.489</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	<u>(21.739.329.459)</u>	<u>1.236.783.290</u>	<u>(20.502.546.169)</u>	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	<u>15.240.627.726</u>	<u>1.980.392.594</u>	<u>17.221.020.320</u>	OPERATING INCOME
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(6.300.331.364)	(513.200.372)	(6.813.531.736)	<i>Other income (expenses) - net</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.940.296.362	1.467.192.222	10.407.488.584	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	<u>(2.539.001.300)</u>	<u>165.761.284</u>	<u>(2.373.240.016)</u>	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO SETELAH PAJAK	6.401.295.062	1.632.953.506	8.034.248.568	NET INCOME AFTER TAX
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	<u>253.293.073</u>	<u>(284.497.983)</u>	<u>(31.204.910)</u>	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	<u>6.654.588.135</u>	<u>1.348.455.523</u>	<u>8.003.043.658</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
	2019			
	Diterbitkan sebelumnya/ <i>As previously Issued</i>	Penyesuaian penyajian kembali/ <i>Restatement adjustments</i>	Disajikan kembali/ <i>As restated</i>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.367.597.777	-	1.367.597.777	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
Pihak ketiga - neto	10.817.770.433	-	10.817.770.433	<i>Trade parties - net</i>
Piutang lain-lain	110.001.500	(1)	110.001.499	<i>Other receivables</i>
Persediaan	10.615.689.553	-	10.615.689.553	<i>Inventories</i>
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	13.175.311.399	(425.946.698)	12.749.364.701	<i>Prepaid Value Added Taxes</i>
Beban dibayar di muka dan uang muka	<u>3.856.078.121</u>	-	<u>3.856.078.121</u>	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Total Aset Lancar	<u>39.942.448.783</u>	<u>(425.946.699)</u>	<u>39.516.502.084</u>	<i>Total Current Assets</i>
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	116.495.072.142	(7.263.967.632)	109.231.104.510	<i>Property, plant and equipment - net</i>
Aset pajak tangguhan	-	1.412.875.887	1.412.875.887	<i>Deferred tax assets</i>
Total Aset Tidak Lancar	<u>116.495.072.142</u>	<u>(5.851.091.745)</u>	<u>110.643.980.397</u>	<i>Total Non-Current Assets</i>
TOTAL ASET	<u>156.437.520.925</u>	<u>(6.277.038.444)</u>	<u>150.160.482.481</u>	TOTAL ASSETS

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2019			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian penyajian kembali/ Restatement adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	19.596.054.867	-	19.596.054.867	Short term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	4.240.580.601	1.458.208.389	5.698.788.990	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	28.867.146.469	-	28.867.146.469	Other payables - third parties
Utang pembelian aset tetap	274.693.400	(274.693.400)	-	Fixed assets purchase payables
Beban akrual	1.932.361.013	(1.458.208.389)	474.152.624	Accrued expenses
Utang pajak	1.003.440.890	(425.946.698)	577.494.192	Taxes payables
Uang muka pelanggan	11.971.689	-	11.971.689	Advance from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of Long term liabilities
Utang bank	2.464.719.482	-	2.464.719.482	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	221.619.683	221.619.683	Consumer financing payables
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>58.390.968.411</u>	<u>(479.020.415)</u>	<u>57.911.947.996</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	15.497.941.925	-	15.497.941.925	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	42.918.118	42.918.118	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	8.386.329.547	(2.734.826.001)	5.651.503.546	Long-term employee benefits liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>23.884.271.472</u>	<u>(2.691.907.883)</u>	<u>21.192.363.589</u>	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	<u>82.275.239.883</u>	<u>(3.170.928.298)</u>	<u>79.104.311.585</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	45.000.000.000	-	45.000.000.000	Share capital
Tambahan modal disetor	7.140.399.885	(7.051.886.385)	88.513.500	Additional paid-in capital
Saldo laba	22.021.881.157	3.945.776.239	25.967.657.396	Retained earnings
TOTAL EKUITAS	<u>74.162.281.042</u>	<u>(3.106.110.146)</u>	<u>71.056.170.896</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>156.437.520.925</u>	<u>(6.277.038.444)</u>	<u>150.160.482.481</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)	2019			29. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
	Diterbitkan sebelumnya/ <i>As previously Issued</i>	Penyesuaian penyajian kembali/ <i>Restatement adjustments</i>	Disajikan kembali/ <i>As restated</i>	
PENJUALAN - NETO	124.464.667.356	-	124.464.667.356	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(87.931.667.988)</u>	<u>718.555.926</u>	<u>(87.213.112.062)</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	<u>36.532.999.368</u>	<u>718.555.926</u>	<u>37.251.555.294</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	<u>(18.610.846.774)</u>	<u>1.985.968.224</u>	<u>(16.624.878.550)</u>	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	<u>17.922.152.594</u>	<u>2.704.524.150</u>	<u>20.626.676.744</u>	OPERATING INCOME
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(4.747.437.441)	272.340.844	(4.475.096.597)	<i>Other income (expenses) - net</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	13.174.715.153	2.976.864.994	16.151.580.147	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	<u>(3.971.873.250)</u>	<u>(81.497.889)</u>	<u>(4.053.371.139)</u>	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA NETO SETELAH PAJAK	9.202.841.903	2.895.367.105	12.098.209.008	NET INCOME AFTER TAX
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	<u>(5.336.636)</u>	<u>401.089.174</u>	<u>395.752.538</u>	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	<u>9.197.505.267</u>	<u>3.296.456.279</u>	<u>12.493.961.546</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

30. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Berdasarkan penilaian manajemen, peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup Perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan ini.

30. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of corona virus (Covid-19) as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

Based on the management's assessment, the above-mentioned event has no significant impact yet on going concern of the Company up to the date of issuance of these financial statements.

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2022
 dan Tahun-Tahun yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 serta Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir
 pada Tanggal 31 Oktober 2021 (Tidak Diaudit)
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 for the Ten-Month Period Ended
 October 31, 2022
 and Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019
 and Ten-Month Period Ended
 October 31, 2021 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No.00015/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 tanggal 19 Januari 2023, No.00075/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 tanggal 24 Februari 2023, No.00223/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan No.00588/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka laporan keuangan Perusahaan diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan arus kas.
3. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan (Catatan 2).
 - b. Uang muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7).
 - c. Utang usaha - pihak ketiga (Catatan 10).
 - d. Perpajakan (Catatan 12).
 - e. Liabilitas sewa (Catatan 15).
 - f. Utang pembiayaan konsumen (Catatan 16).
 - g. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang (Catatan 17).
 - h. Modal saham dan tambahan modal disetor (Catatan 18).
 - i. Perjanjian penting (Catatan 27).

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penerbitan kembali terhadap laporan keuangan:

31. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has issued financial statements for the ten-month period ending October 31, 2022. The financial statements for the ten-month period ending October 31, 2022 have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners with an independent auditor's report No.00015/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/II/2023 dated January 19, 2023, No.00075/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 dated February 24, 2023, No.00223/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2023 dated March 27, 2023 and No.00588/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2023 dated April 18, 2023. In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the Company's financial statements are reissued accompanied by changes or additional disclosures in the notes to financial statements as follows:

1. Statement of financial position.
2. Statement of cash flows.
3. Changes and additional disclosures on:
 - a. Summary of significant accounting policies (Note 2).
 - b. Advances and prepaid expenses (Note 7).
 - c. Trade payables - third parties (Note 10).
 - d. Taxation (Note 12).
 - e. Lease liabilities (Note 15).
 - f. Consumer financing payables (Note 16).
 - g. Long-term employee benefits liabilities (Note 17).
 - h. Share capital and additional paid-in capital (Note 18).
 - i. Significant agreements (Note 27).

The table below shows the impact of the adjustments to the reissuance on the financial statements:

	31 Oktober 2022/October 31, 2022			
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously Issued	Penyesuaian/ Adjustments	Diterbitkan kembali/ As issued	Statement of financial position
Laporan posisi keuangan				
Beban dibayar di muka dan uang muka	1.337.617.605	(1.337.617.605)	-	Prepaid expenses and advances
Beban dibayar di muka	-	9.801.897	9.801.897	Prepaid expenses
Uang muka	-	1.327.815.708	1.327.815.708	Advances
Kontrak liabilitas	27.387.500	(27.387.500)	-	Contract liabilities
Uang muka pelanggan	-	27.387.500	27.387.500	Advance from customers

